LAPORAN
HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NTB 2025
TRIWULAN II

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan II Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II merupakan Laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja secara berkala yang mencakup progres pencapaian Indikator Makro Daerah, Indkator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah serta pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2025. Laporan hasil pemantauan ini mengacu pada RKPD Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. NTB TA. 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2025, terdapat 13 sasaran pembangunan daerah dengan 36 Indikator, 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB, 241 Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan program pembangunan yang dilaksanakan sebanyak 216 program yang terdiri atas 1 program penunjang urusan, 153 program prioritas pembangunan daerah, dan 63 program penyelenggaraan urusan. Sedangkan jumlah kegiatan mencapai 710 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 3.056 sub kegiatan dengan indikasi pendanaan mencapai Rp.7.792.580.872.770,00 sedangkan yang terbiayai dalam APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 6.330.408.413.375,00. dan mengalami penyesuian dengan adanya kebijakan efiensi sehingga menjadi sebesar Rp.6.218.298.929.286.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, realisasi Rata-rata capaian kinerja program prioritas tahun 2024 sebesar 125,52% dengan realisasi keuangan mencapai 94,67%. Tingginya capaian kinerja program prioritas didorong oleh adanya 34 Program melampui target dengan rata-rata tingkat capaian 140,60%, 96 program sesuai yang ditargetkan atau capaianya 100% dan sedangkan 22 program tidak memenuhi target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 71,77%, sedangkan RKPD Tahun 2025 sampai triwulan II tahun 2025, Capaian kinerja berdasarkan indikator makro daerah sampai triwulan II tahun 2025 mencapai 66,67%. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Inflasi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio, sedangkan capaian Indikator

kinerja utama mencapai 4 indikator atau 40% sesuai bahkan melampui target kinerja tahun 2025 yaitu Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB, Angka kemiskinan, dan Gini rasio, sedangkan 6 indikator lainnya on progress. Adapun capaian kinerja perangkat daerah secara rata- rata mencapai 39,96%, faktor pendorong capaian kinerja sampai triwulan II yaitu tingginya capaian kinerja OPD didukung oleh adanya beberapa indikator yang capaian ratusan persen antara lain capaian peningkatan PAD pada beberapa OPD seperti Rumah Sakit (pendapatan BLUD), tingginya peningkatan ekspor non tambang mencapai 649,33 persen dari target 7%, sedangkan faktor penghambat terutama pada adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah, pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari DAK baru mencapai 5% yang disebabkan lambatnya penetapan juknis DAK 2025 yang baru ditetapkan pada bulan Juni 2025, serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi DPRD sebagian besar belum dapat dilakukan karena kendala kelengkapan administrasi dan kesiapan kelompok penerima.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Agustus 2025
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 serta penganggaraannya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. NTB TA. 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencakup 216 program yang terdiri atas 1 program penunjang urusan, 153 program prioritas pembangunan daerah, dan 63 program penyelenggaraan urusan. Sedangkan jumlah kegiatan mencapai 710 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 3.056 sub kegiatan dengan indikasi pendanaan mencapai Rp.7.792.580.872.770,00 sedangkan yang terbiayai dalam APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 6.330.408.413.375,00. dan mengalami penyesuian dengan adanya kebijakan efiensi sehingga menjadi sebesar Rp.6.218.298.929.286

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencananaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka pelaksanaan RKPD perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progres pelaksanaannya sebagai bahan masukan dalam perubahan RKPD tahun berjalan dan atau masukan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Laporan pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025 merupakan Laporan evaluasi secara berkala yang disusun berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja yang mencakup progres pencapaian Indikator Makro Daerah, Indkator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2025. Laporan hasil pemantauan ini mengacu pada RKPD Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. NTB TA. 2025 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2025, terdapat 13 sasaran pembangunan daerah dengan 36 Indikator, 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB, 241

Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan program pembangunan yang dilaksanakan sebanyak 216 program yang terdiri atas 1 program penunjang urusan, 153 program prioritas pembangunan daerah, dan 63 program penyelenggaraan urusan. Sedangkan jumlah kegiatan mencapai 710 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 3.056 sub kegiatan dengan indikasi pendanaan mencapai Rp.7.792.580.872.770,00 sedangkan yang terbiayai dalam APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 6.330.408.413.375,00. dan mengalami penyesuian dengan adanya kebijakan efiensi sehingga menjadi sebesar Rp.6.218.298.929.286.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, realisasi Rata-rata capaian kinerja program prioritas tahun 2024 sebesar 125,52% dengan realisasi keuangan mencapai 94,67%. Tingginya capaian kinerja program prioritas didorong oleh adanya 34 Program melampui target dengan rata-rata tingkat capaian 140,60%, 96 program sesuai yang ditargetkan atau capaianya 100% dan sedangkan 22 program tidak memenuhi target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 71,77%, %, sedangkan RKPD Tahun 2025 sampai triwulan II tahun 2025, Capaian kinerja berdasarkan indikator makro daerah sampai triwulan II tahun 2025 mencapai 66,67%. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Inflasi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio, sedangkan capaian Indikator kinerja utama mencapai 4 indikator atau 40% sesuai bahkan melampui target kinerja tahun 2025 yaitu Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB, Angka kemiskinan, dan Gini rasio, sedangkan 6 indikator lainnya on progress. Adapun capaian kinerja perangkat daerah secara rata- rata mencapai 39,96%, faktor pendorong capaian kinerja sampai triwulan II yaitu tingginya capaian kinerja OPD didukung oleh adanya beberapa indikator yang capaian ratusan persen antara lain capaian peningkatan PAD pada beberapa OPD seperti Rumah Sakit (pendapatan BLUD), tingginya peningkatan ekspor non tambang mencapai 649,33 persen dari target 7%, sedangkan faktor penghambat terutama pada adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah, pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari DAK baru mencapai 5% yang disebabkan lambatnya penetapan juknis DAK 2025 yang baru ditetapkan pada bulan Juni 2025, serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi DPRD sebagian besar belum dapat dilakukan karena kendala kelengkapan administrasi dan kesiapan kelompok penerima.. Disamping itu, untuk kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang tidak berdampak dari kebijakan efisiensi akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.

Dari 6 indikator makro provinsi NTB, capaian tahun 2024 sebanyak 4 indikator sesuai bahkan melampui target sedangkan 2 indikator tidak memenuhi target. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target yaitu Inflasi, Gini Ratio, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan indikator yang capaiannya belum sesuai

target yaitu pertumbuhan ekonomi baik dengan tambang maupun tanpa tambang dan tingkat kemiskinan. Sedangkan sampai triwulan II tahun 2025, dari 5 indikator yang telah dapat diukur capaiannya, terdapat 4 indikator yang telah memenuhi bahkan melampaui target atau 66,67%. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Inflasi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio. Pertumbuhan ekonomi NTB tanpa memperhitungkan pertambangan bijih logam mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 3,87% pada tahun 2024, sampai triwulan II 2025 telah mencapai 6,08%. Inflasi tetap stabil pada kisaran 2 $\pm$ 1 sebesar 2,51%, tingkat kemiskinan terus dapat ditekan dari 11,91% pada tahun 2024 menjadi 11,78% sampai triwulan II 2025, sedangkan gini ratio, meskipun ada kenaikan sebesar 0,005 tetapi masih sesuai dengan target tahun 2025. Adapun IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka pencapaian tahun 2024 sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan tahun 2025 tingkat pengangguran NTB mengalami peningkatan menjadi 3,22% dari 2,73% pada tahun 2024, untuk IPM belum ada rilis angkanya. Indikator yang capaiannya belum sesuai target yaitu pertumbuhan ekonomi dengan tambang. Pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang sampai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,30% sedangkan sampai triwulan kedua tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 0,82%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah pada tahun 2024, dari 10 indikator dengan tingkat Capaian sebesar 50%, sedangkan tahun 2025 pada triwulan II telah mencapai 40% dari 5 indikator yang sudah dapat diukur capaian, sedangkan 5 indikator blm dapat diukur sampai triwulan kedua 2025. Adapun beberapa capaian indikator yang sangat mengembirakan diantaranya capaian Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan ekspektasi yang telah 49,18% dan pada triwulan II tahun 2025 meningkat menjadi 54,19%, sehingga optimis bisa tercapai diatas 55% sesuai target akhir RPD Provinsi NTB pada tahun 2026. Pada indikator angka kemiskinan, sudah melampui target RPKD tahun 2025 sebesar 11,78% dari target 127 – 13,1%, dengan penurunan sampai bulan september 2024 cukup signifikan mencapai 1,94% tertinggi dalam 5 tahun terakhir bahkan terprogres kedua se-indonesia. Hal yang sama pada ketimpangan pengeluaran penduduk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 0,369 atau sesuai target sebesar 0,369-0,373. Sementara itu, pada indikator prevalensi stunting, mengalami sedikit peningkatan dari 12.17% menjadi 13,38% pada triwulan II tahun 2025.

Adapun capaian IPM, ILKH, Indeks Reformasi Birokrasi, Persentase capaian SD"s, dan Indeks Daya Saing Daerah, belum ada rilis datanya pada triwulan ke-II 2025, namun jika dilhat dari capaian tahun sebelumnya, ada peningkatan capaian yang signifikan antara lain IPM NTB telah masuk kategori tinggi dengan nilai mencapai 73,10, IKLH, Indeks Daya Saing Daerah telah mencapai 3,68. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan sangat signifikan dari 68,73 poin atau level B pada tahun 2023, meningkat menjadi 77,86 poin atau level BB pada tahun 2024, dan capaian ini sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini diindikasikan dalam keberhasilan dalam melakukan penyerdehaan birokrasi melalui 3 tahap yaitu penyederhanaan struktur oragnisasi, penyederhanaan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya profesionalisme ASN, serta didukung keberhasilan dalam reformasi

birokrasi tematik yang diindikasikan dengan mampu menjaga stabilitas inflasi, dan mampu menurunkan stunting dan kemiskinan secara signifikan. Hal yang sama pencapaian indeks daya saing daerah yang diperkirakan naik menjadi 3,68 poin, hal ini diidnikasikan dengan keberhasilan meningkatkan kualitas layanan infrastuktur, meningkatnya rasio elektrifikasi, rasio konektivitas, serta realisasi nilai investasi di daerah. Indiaktor-indikator tersebut belum ada rilis di triwulan II 2025.

Adapun Adapun capaian pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan daerah sesuai target pembangunan tahun 2024 mencapai 55,56%. Capaian sasaran pembangunan daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang sesuai bahkan melalui target $\geq$ 100% sebanyak 17 Indikator yaitu:

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
2. Tingkat Inflasi
3. Bauran Energi Baru Terbarukan
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5. Indeks Pembangunan Kebudayaan
6. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi
7. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan/*Universal Health Coverage* (UHC)
8. Indeks Kualitas Udara
9. Indeks Kualitas Air
10. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
11. Tingkat Literasi Keuangan
12. Indeks Ketahanan Pangan
13. Angka Kematian Ibu (AKI)
14. Angka Kematian Bayi (AKB)
15. Persentase Kota Kreatif
16. Persentase Penangnan Konflik SARA
17. Indeks Kesejahteraan Sosial

Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang belum sesuai target namun dengan tingkat capaian antara > 80 - > 100 sebanyak 16 Indikator yaitu:

1. Umur Harapan Hidup (UHH)
2. Indeks Resiko Bencana (IRB)
3. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
4. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
5. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang
7. Indeks Demokrasi
8. Nilai SAKIP
9. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial
10. Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM)
11. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
12. Harapan Lama Sekolah (RLS)
13. Rasio Konektivitas
14. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
15. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
16. Indeks Inovasi Daerah

Sedangkan Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang belum sesuai target namun dengan tingkat capaian antara < 80 sebanyak 3 Indikator yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang
2. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan
3. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Adapun progress capaian sasaran pembangunan daerah pada triwulan II tahun 2025, dari 36 indikator kinerja, baru 7 indikator yang sudah dapat diukur capaiannya, dengan 3 indikator telah memenuhi target RKPD Tahun 2025 yaitu Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat inflasi dan Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC). Sedangkan berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025, rata-rata capaian kinerja program baru mencapai 1,17 persen dengan realisasi keuangan mencapai 5,86%. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan rata-cata capaian kinerja baru mencapai 9,87% dengan realisasi keuangan 6,43%. Adapun pada triwulan II, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,96% dengan realiasasi keuangan mencapai 26,97% terhadap pagu RKPD Tahun 2025 atau 33,79% terhadap total APBD. Rendahnya capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2025 disebabkan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah. Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan meningkatkan efisiensi belanja, serta adanya penundaan pelaksanaan kegiatan supaya dapat diintegrasikan dengan program dan kegiatan kepala daerah terpilih akan akan dimasukkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2025. Disamping itu, untuk kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang tidak berdampak dari kebijakan efisiensi akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN iii
DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Tujuan 4
1.4. Sasaran 4
1.5. Sistimatika Penulisan Laporan 4

BAB II PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2025 6
2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 6
2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 10
2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 24
2.4. Target Pembangunan Daerah Tahun 2025 32

BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2025 52
3.1. Capaian Indikator Makro Daerah 52
3.2. Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah 64
3.3. Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah 74
3.4. Evaluasi Terhadap Capaian Pelaksanaan Program Prioritas 90
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 106
4.1. Kesimpulan 106
4.2. Rekomendasi 108

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian dari kegiatan pengendalian evaluasi pembangunan daerah dalam rangka mengawal pelaksanaan dan capaian pembangunan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan sehingga target-target pembangunan dapat diwujudkan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2025 merupakan laporan berkala yang disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencananaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 serta Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, Tema RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah "Penguatan Industrialisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Dukungan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan". Oleh karena itu Tujuan utama pembangunan provinsi NTB Tahun 2025 adalah memperkuat industrialisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung reformasi birokrasi dan menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB. Tema ini bermakna bahwa pada tahun 2025 Provinsi NTB dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui:

1. Penguatan industrialisasi

   Makna dari penguatan industrialisasi adalah upaya untuk mengembangkan dan memperkuat sektor industri dan industri pengolahan di Provinsi NTB berbasis sumber daya alam lokal. Pengembangan yang dilakukan adalah mendorong pertumbuhan industri lokal yang mengoptimalkan sumber daya alam dan sdm lokal

yang mampu memberikan nilai tambah produk lokal. Pengembangan industri lokal ini didukung oleh diversifikasi industri pada sektor strategis dan potensial di Provinsi NTB. Peningkatan investasi dengan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industri lokal. Kebijakan insentif dan kemudahan perijinan menjadi kunci untuk meningkatkan investasi.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

   Makna dari peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi NTB melalui penanganan berbagai isu strategis daerah terkait penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, konvergensi, dan tingginya kasus perkawinan anak, peningkatan kualitas layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, energi kelistrikan, dan lainnya. Kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai dengan pemberdayaa ekonomi lokal dari UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Dukungan Reformasi birokrasi

   Makna dari dukungan reformasi birokrasi adalah pengembangan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, perumusan kebijakan unggul untuk mendorong implementasi kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangkan implementasi, dan kerangka pendanaan yang lebih optimal. Hal ini didukung oleh digitalisassi pelayanan publik dengan mengoptimalkan teknologi, informasi, dan komunikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan publik, dan penyederhanaan proses birokrasi untuk proses perizinan dan pelayanan yang lebih berkualitas.

4. Implementasi pembangunan berkelanjutan

   Makna dari implementasi pembangunan berkelanjutan adalah perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 mengintegrasikan prinsip prinsip berkelanjutan dalam semua aspek pembangunan. Hal ini sangat signifikan untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan bekelanjutan, dengan upaya pelestarian lingkungan dan menjamin terlaksananya kesejahteraan sosial. Prinsip Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim (PRKBI) menjadi kunci implementasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB.

evaluasi pelaksanaan RKPD secara berkala dilakukan tidak hanya untuk mengetahui progress capaian pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan, tetapi juga dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan

daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai serta menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan perencanaan daerah ke depannya baik untuk triwulan berikutnya maupun pada penyusunan perencanaan pada tahun-tahun mendatang. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup capaian indikator makro daerah, capaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta capaian dari rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi dari target indikator makro daerah, realisasi indikatorkinerja utama, realisasi indikator kinerja daerah, serta realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2025 dan RKPD Provinsi NTB tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencananaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. NTB TA. 2025
5. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

6. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
7. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
8. Peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025.
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2025 ini adalah untuk mengukur capaian indikator makro daerah, Capaian Sasaran Pembangunan (Indikator Kinerja Utama Daerah), Capaian Indikator Kinerja Daerah, dan capaian program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2025.

1.5 Sistimatika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan sistimatika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistimatika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2025. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2025. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2025.

- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan II Tahun 2025. Bab ini berisi Capaian Target indikator makro daerah, Capaian Sasaran Pembangunan (Indikator Kinerja Utama Daerah), Capaian Indikator Kinerja Daerah, dan capaian program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
- Bab V : Penutup

BAB II :

PRIORITAS, SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2025

2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 disusun menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah pada tahun 2025. Perencanaan pembangunan jangka pendek ini mengacu pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045. Selanjutnya kedua dokumen perencanaan tersebut telah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang juga sedang proses penyusunan. Untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2025 telah disusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai acuan dalam proses penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 sehingga pembangunan nasional dan daerah menuju pada arah yang sama dan menjadi satu kesatuan yang sejak perencanaan telah diselearaskan.

Sesuai arahan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, indikator sasaran pembangunan daerah untuk Provinsi NTB tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Target Indikator Sasaran Provinsi NTB Dalam RKP Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,00 - 6,50
2	Tingkat Kemiskinan	%	11,68 - 12,18
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,19 - 2,79
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54
5	Rasio Gini	Indeks	0,369 – 0,373
6	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	25,99

Sumber: Rancangan RKP 2025

Tujuan pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tercapainya Indikator sasaran pembangunan nasional yang telah direncanakan pada dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sesuai Tema pembangunan nasional tahun 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Selain itu perumusan tujuan pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2025 juga perlu memperhatikan tujuan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Tujuan dan Prioritas Daerah pada RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar Tujuan dan Prioritas Daerah pada RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Sumber: RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Selanjutnya penyelarasan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Provinsi NTB Tahun 2025-2029 untuk implementasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Kesesuaian RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 yaitu pengembangan sektor industri dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tahap pertama tahun 2025-2029 yaitu penguatan fondasi transformasi pembangunan daerah. RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 ini juga mengintegrasikan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 untuk implementasi program dan kegiatan prioritas daerah yang mendukung tujuan jangka menengah. Berdasarkan hasil penyelerasan ini maka tujuan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT), dan SDM yang berdaya saing dan produktif
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri, menerapkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI)
4. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri;
5. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah (reformasi birokrasi);

6. Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
7. Terwujudnya peningkatan daya saing daerah;
8. Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas.

Tujuan Kedua dan Kedelapan merupakan integrasi dari tujuan Rancangan RKP 2025 dan Rancangan RPJMD Teknokratik Provinsi NTB untuk Tahun 2025-2029. Selanjutnya, implementasi program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2025 sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	2024	2025	Target RKPD 2025
1	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	50-53	53-55	53-55
2	Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	6.5	8	7,6
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	70.88	71.67	0,54 (IMM)
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	75.34	77.5	76,19
5	Angka kemiskinan	%	<10	9.57	12,7-13,1
6	Prevalensi Stunting	%	14	12	21,70 (SKI)
7	Gini rasio	angka	0.366	0.362	0,369 – 0,373
8	Indeks Reformasi Birokrasi	point	BB	BB	BB
9	Persentase Capaian Indikator SDGs	%	63	67	67
10	Indeks Daya Saing Daerah	point	3.35	3.38	3.50

Sumber: RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Selanjutnya perbandingan target Indikator Makro Provinsi NTB Dalam Rancangan RKP Tahun 2025, RPD NTB 2024-2026, dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4. 4 Perbandingan Target Indikator Makro Provinsi NTB Dalam Rancangan RKP Tahun 2025, RPD NTB 2024-2026, dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKP 2025	Target RPD NTB 2024-2026 (untuk tahun 2025)	Target RPJPD NTB 2025-2045 (untuk tahun 2025)	Target RKPD NTB 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,00 - 6,50	6,00 – 7,5* 5,5 – 6,9**		6,00 - 6,50
2	Tingkat Kemiskinan	%	11,68 - 12,18	9,57	11,68 - 12,18	12,7-13,1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,19 - 2,79	2,85	1,9 – 2,7	2,19 - 2,79
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54	-	0,53	0,54
5	Rasio Gini	Indeks	0,369 – 0,373	0,362	0,369 – 0,373	0,369 – 0,373
6	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	25,99	19,76	25,99	25,99

Sumber: Rancangan RKP 2025, RPD NTB 2024-2026, dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045
Keterangan: * : dengan tambang, **: tanpa tambang

RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 ini juga diarahkan untuk mencapai target sasaran visi RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan tahun awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa (KUAT) dan memiliki dayasaing;
2. Peningkatan produktivitas ekonomidaerah dan pendapatan perkapita;
3. Peningkatan kerjasama daerah dengan dunia internasional dalam bidang investasi, perdagangan, ekspor dan akselerasi dayasaing daerah;
4. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
5. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission.

Adapun target indikator sasaran RKPD 2025 sebagai berikut :

Tabel Target Indikator sasaran RKPD Tahun 2025 dalam Sasaran Visi RPJPD NTB Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi RPJPD NTB Tahun 2025-2045	Target 2025
I.	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Tinggi	
	A. PDRB Per Kapita (Rp Juta)	34,48-34,57
	B. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54,53
	C. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	7,6
II.	Kemiskinan Menuju Nol Persen dan ketimpangan Menurun	
	A. Tingkat Kemiskinan (%)	11,68 – 12,18
	B. Rasio Gini (Indeks)	0,369 - 0,373
	C. Kontribusi PDRB Provinsi NTB	0,85
III.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, daan Pembangunan yang Berkelanjutan di Tingkat Nasional	
	A. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	78,00
	B. Peningkatan Ekspor Non Tambang	6,50
	C. Peningkatan Investasi Modal Asing	8,40
	D. Peningkatan Kerjasama Internasional	5
	E. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,40
IV.	Daya Saing, Kehandalan dan Ketaqwaan SDM Meningkat	
	A. Indeks Modal Manusia	
	B. SDM KUAT	
	B1. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja (%)	10
	B2. Indeks Karakter Unggul	55
	B3. Keterampilan Masa Depan :	
	- Pemanfaatan Bidang IT (%)	20
	- Bahasa Asing (Toefl, IELTS) (%)	10
	- Bidang Akuntasi (%)	5
	B4. Ketaqwaan Beragama	
	- Peningkatan ZIS (%)	20
	- Bantuan Fasilitasi Rumah Ibadah (%)	5

No	Sasaran Visi RPJPD NTB Tahun 2025-2045	Target 2025
V.	Resiliensi Terhadap Perubahan Iklim dan Ketangguhan Terhadap Bencana Meningkat Serta Menurunnya Intensitas GRK	
	A. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	25,99

2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023, terdapat 7 Prioritas Daerah (PD) sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan di Provinsi NTB. Tujuh Prioritas Daerah ini adalah:

PD 1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang
PD 2 : Pembangunan Manusia
PD 3 : Pembangunan Lingkungan
PD 4 : Pembangunan Kesejahteraan
PD 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
PD 6 : Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
PD 7 : Peningkatan Daya Saing Daerah

Pada tingkat Provinsi NTB. dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB mengimplementasikan Pendekatan 5P (Productivitiy, People, Planet, Power, dan Prosperity) pada tahun 2025 untuk mengintegrasikan Prioritas Pembangunan Nasional (PN) dan Prioritas Pembangunan Daerah (PD), sebagai berikut:

Gambar Penjabaran Pendekatan 5P Prioritas Daerah untuk RKPD Provinsi NTB Tahun 2025

Tahap selanjutnya adalah memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi target pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk menyelaraskan Prioritas Nasional (PN) dalam Rancangan RKP Tahun

2025 dengan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir RPJPD Proivnsi NTB Tahun 2025-20245. Gambaran hasil penyelarasan ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel Penyelarasan Prioritas Daerah dalam RPD dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

PD dalam RPD 2024-2026	PN dalam RKP 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025
PD 1	PN 1	P 1
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang (PN 2)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (PD 2)	*Productivity* (PN 2), (PN 5)
PD 2	PN 2	P 2
Pembangunan Manusia (PN 1), (PN 4)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PD 1)	*People* (PN 1), (PN 4)
PD 3	PN 3	P 3
Pembangunan Lingkungan (PN 5), (PN 8)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PD 4)	*Planet* (PN 2), (PN 3), (PN 5), (PN 6)
PD 4	PN 4	P 4
Pembangunan Kesejahteraan (PN 3)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PD 2), (PD 6)	*Power* (PN 7)
PD 5	PN 5	P 5
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PN 7)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PD 3)	*Prosperity* (PN 8)
PD 6	PN 6	

PD dalam RPD 2024-2026	PN dalam RKP 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025
Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PN 4)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PD 7)	
PD 7	PN 7	
Peningkatan Dayasaing Daerah (PN 6)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (PD 5)	
	PN 8	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (PD 3)	

Gambar Penyelarasan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025 dengan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045

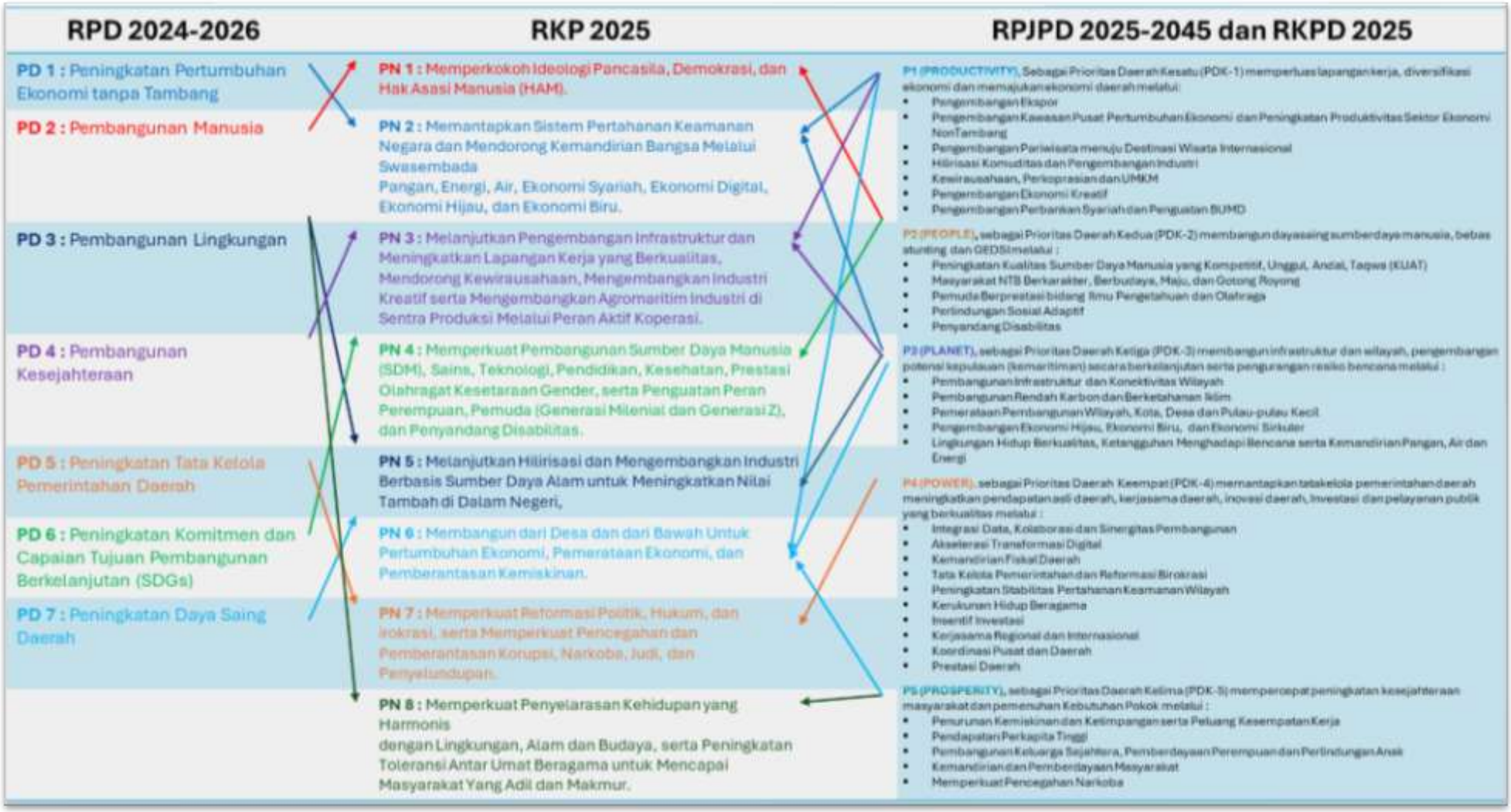

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Proivnsi NTB Tahun 2025-2045, kerangka Pendekatan 5P yaitu Productivity, People, Planet, Power, dan Prosperity menjadi kerangka substansi untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan. Untuk tahap pertama dari RPJPD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD) Tahun 2025-2029, dengan prioritas daerah pada penguatan fondasi untuk transformasi pembangunan di Provinsi NTB. Dengan kerangka Pendekatan 5P, Prioritas Daerah untuk pembangunan Provinsi NTB dalam jangka panjang, menengah, dan pendek adalah sebagai berikut:

P1 (PRODUCTIVITY), Sebagai Prioritas Daerah Kesatu (PDK-1) memperluas lapangan kerja, diversifikasi ekonomi dan memajukan ekonomi daerah melalui:

1) Pengembangan Ekspor
2) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi NonTambang
3) Pengembangan Pariwisata menuju Destinasi Wisata Internasional
4) Hilirisasi Komuditas dan Pengembangan Industri
5) Kewirausahaan, Perkoprasian dan UMKM
6) Pengembangan Ekonomi Kreatif
7) Pengembangan Perbankan Syariah dan Penguatan BUMD

P2 (PEOPLE), sebagai Prioritas Daerah Kedua (PDK-2) membangun dayasaing sumberdaya manusia, bebas stunting dan GEDSI melalui :

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal, Taqwa (KUAT)
2) Masyarakat NTB Berkarakter, Berbudaya, Maju, dan Gotong Royong
3) Pemuda Berprestasi bidang Ilmu Pengetahuan dan Olahraga
4) Perlindungan Sosial Adaptif
5) Penyandang Disabilitas

P3 (PLANET), sebagai Prioritas Daerah Ketiga (PDK-3) membangun infrastruktur dan wilayah, pengembangan potensi kepulauan (kemaritiman) secara berkelanjutan serta pengurangan resiko bencana melalui :

1) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
2) Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
3) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Kota, Desadan Pulau-pulau Kecil
4) Pengembangan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Sirkuler

5) Lingkungan Hidup Berkualitas, Ketangguhan Menghadapi Bencana serta Kemandirian Pangan, Air dan Energi

P4 (POWER), sebagai Prioritas Daerah Keempat (PDK-4) memantapkan tatakelola pemerintahan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah, kerjasama daerah, inovasi daerah, Investasi dan pelayanan publik yang berkualitas melalui :

1) Integrasi Data, Kolaborasi dan Sinergitas Pembangunan
2) Akselerasi Transformasi Digital
3) Kemandirian Fiskal Daerah
4) Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
5) Peningkatan Stabilitas Pertahanan Keamanan Wilayah
6) Kerukunan Hidup Beragama
7) Insentif Investasi
8) Kerjasama Regional dan Internasional
9) Koordinasi Pusat dan Daerah

P5 (PROSPERITY), sebagai Prioritas Daerah Kelima (PDK-5) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan Kebutuhan Pokok melalui :

1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Peluang Kesempatan Kerja
2) Pendapatan Perkapita Tinggi
3) Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4) Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat
5) Memperkuat Pencegahan Narkoba

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

1. PRODUCTIVITY - Prioritas Daerah Kedua Tahun 2025

Dalam kerangka membangun keselarasan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ini mengintegrasikan konsep 5P untuk menetapkan Prioritas Daerah. Productivity merupakan Prioritas Daerah Kesatu Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas daerah dalam mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya arah kebijakan untuk mendukung prioritas daerah pada penguatan industrialisasi ini, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan ekspor, industrialisasi dan peningkatan investasi, penguatan daya saing usaha;

2. Memperkuat integrasi perekonomian domestic dan regional;
3. Penguatan rantai produksi dan rantai nilai untuk meningkatkan keunggulan perekonomian daerah, penguatan riset terapan dalam rangka peningkatan inovasi daerah

Selanjutnya, target sasaran untuk Productivity sebagai Prioritas Daerah Kesatu tahun 2025 adalah:

Tabel Target Indikator Sasaran – Productivity Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKP 2025	Target RKPD 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,00 - 6,50	6,00 - 6,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,19 - 2,79	2,19 - 2,79

Sumber: Rancangan RKP 2025

Productivity sebagai Prioritas Daerah Kesatu mendukung capaian target Prioritas Pembangunan Nasional yang sejalan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting di daerah yaitu PN 2, PN 3, dan PN 6. PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Indikasi intervensi pada PN 2 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 2

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	▪ Perluasan penegakan regulasi, pertahanan keamanan, penguatan kolaborasi dan kerja sama antarpihak terutama dalam memberantas illegal, unreported and unregulated fishing pada perairan di Wilayah pengelolaan Perikanan 573; pengembangan pengelolaan lintas wilayah (transboundary management); serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah
	▪ Peningkatan sistem penyediaan air minum kabupaten/kota di Kabupaten Lombok Barat, Kota Bima, dan Kabupaten Bima
	▪ Peningkatan perlindungan sumber daya pesisir, laut,
	▪ dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

	▪ Fasilitasi business matchmaking startup digital
	▪ Fasilitasi digital technopreneur
	▪ Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian
	▪ Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak yang berkelanjutan

Sumber: Rancangan RKP 2025

Selanjutnya, PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Indikasi intervensi pada PN 3 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 3

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	▪ Pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat di perkotaan di Kabupaten Bima
	▪ Penataan bangunan kawasan destinasi wisata di kawasan Danau Lebo Taliwang
	▪ Penyelesaian destinasi pariwisata prioritas
	▪ Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Dompu
	▪ Pengembangan jaringan tersier irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun di Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa
	▪ Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi
	▪ Pembangunan Jembatan Lewamori di Kabupaten Bima

Sumber: Rancangan RKP 2025

PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Indikasi intervensi pada PN 6 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 dan indikasi intervensi daerah adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 6

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	▪ Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Mataram
	▪ Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pemerataan ekonomi

Sumber: Rancangan RKP 2025

2. PEOPLE - Prioritas Daerah Kedua Tahun 2025

People adalah Prioritas Daerah Kedua untuk tahun 20205 bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif, Unggul, Andal, dan Takwa (KUAT). Prioritas Daerah Kedua ini dilaksanakan dengan arah kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas fisik dan mental, kompetensi, penguasaan teknologi, literasi dan karakter;
3. Pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan, peningkatan investasi dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan, peningkatan kinerja UMKM;
4. Meningkatkan komunikasi, kemitraan dalam pembiayaan dan menyiapkan Kabupaten/kota dalam mengadopsi dan melaksanakan SDGs

Target indikator sasaran untuk People sebagai Prioritas Daerah Kedua adalah sebagai berikut:

Tabel Target Indikator Sasaran PEOPLE untuk RKPD 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54

Sumber: Rancangan RKP 2025

Implementasi People sebagai Prioritas Daerah Kedua mendukung Prioritas Nasional yaitu PN1 dan PN 4. PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan indikasi intervensi pusat pada PN 1 untuk RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 1

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	▪ Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat
	▪ Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik

Sumber: Rancangan RKP 2025

Pada PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahragat Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Indikasi intervensi pusat pada PN 4 untuk RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 4

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	▪ Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)
	▪ Percepatan peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara berkualitas
	▪ Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal)
	▪ Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
	▪ Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi *Science, Technology, Engineering, Art And Mathematics* (STEAM) unggulan pada Universitas Mataram
	▪ Fasilitasi literasi digital

Sumber: Rancangan RKP 2025

3. PLANET - Prioritas Daerah Ketiga Tahun 2025

Planet merupakan Prioritas Daerah Ketiga Tahun 2025 bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam menjamin pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, penanganan limbah, pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular, inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan;
2. Pengelolaan limbah, peningkatan kualitas ekosistem, sanitasi, kesuburan dan produktivitas tanah, pengamanan dan pemeliharaan sumber daya air, pengendalian tata ruang, pengamanan hutan, perhutanan sosial reboisasi dan rehabilitasi;
3. Mendorong pengembangan kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten/kota, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;

Target indikator sasaran untuk Planet sebagai Prioritas Daerah Ketiga Tahun 2025 adalah:

Tabel Target Indikator Sasaran PLANET untuk RKPD 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	25,99

Sumber: Rancangan RKP 2025

Keselarasan Planet sebagai Prioritas Daerah Ketiga dengan Prioritas Nasional digambarkan dalam PN 2, PN 3, PN 5, dan PN 6. PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Indikasi intervensi pada PN 2 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 2

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	▪ Perluasan penegakan regulasi, pertahanan keamanan, penguatan kolaborasi dan kerja sama antarpihak terutama dalam memberantas illegal, unreported and unregulated fishing pada perairan di Wilayah pengelolaan Perikanan 573; pengembangan pengelolaan lintas wilayah (transboundary management); serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah
	▪ Peningkatan sistem penyediaan air minum kabupaten/kota di Kabupaten Lombok Barat, Kota Bima, dan Kabupaten Bima
	▪ Peningkatan perlindungan sumber daya pesisir, laut,
	▪ dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
	▪ Fasilitasi business matchmaking startup digital
	▪ Fasilitasi digital technopreneur
	▪ Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian
	▪ Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak yang berkelanjutan

Sumber: Rancangan RKP 2025

PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif

Koperasi. Indikasi intervensi pada PN 3 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 3

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	▪ Pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat di perkotaan di Kabupaten Bima
	▪ Penataan bangunan kawasan destinasi wisata di kawasan Danau Lebo Taliwang
	▪ Penyelesaian destinasi pariwisata prioritas
	▪ Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Dompu
	▪ Pengembangan jaringan tersier irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun di Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa
	▪ Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi
	▪ Pembangunan Jembatan Lewamori di Kabupaten Bima

Sumber: Rancangan RKP 2025

PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Indikasi intervensi pada PN 5 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 5

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	▪ Percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri tembaga dan rumput laut
	▪ Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
	▪ Pengembangan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima

Sumber: Rancangan RKP 2025

PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Indikasi intervensi pada PN 6 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 6

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	▪ Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Mataram
	▪ Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pemerataan ekonomi

Sumber: Rancangan RKP 2025

4. POWER - Prioritas Daerah Keempat Tahun 2025

Power merupakan Prioritas Daerah Keempat Tahun 2025 dengan arah kebijakan reformasi birokrasi di Provinsi NTB untuk tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas data, kolaborasi dan gerakan multipihak, penyaluran tepat sasaran dan pemanfaatannya;
2. Pembinaan dan pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap perangkat daerah, penguatan perencanaan dan penganggaran reformasi birokrasi, digitalisasi serta pengembangan budaya organisasi;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, optimalisasi pemanfaatan asset dan peningkatan peran BUMD;

Selanjutnya, keselarasan Prioritas Daerah Ketiga dengan Prioritas Nasional digambarkan dalam PN 7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Indikasi intervensi pada PN 2 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 7

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	▪ Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga

Sumber: Rancangan RKP 2025

5. PROSPERITY - Prioritas Daerah Kelima Tahun 2025

Prosperity sebagai Prioritas Daerah Kelima Tahun 2025 bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB. Hal ini dilaksanakan dalam arah kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;

2. Peningkatan kualitas fisik dan mental, kompetensi, penguasaan teknologi, literasi dan karakter;
3. Pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan, peningkatan investasi dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan, peningkatan kinerja UMKM;
4. Meningkatkan komunikasi, kemitraan dalam pembiayaan dan menyiapkan Kabupaten/kota dalam mengadopsi dan melaksanakan SDGs

Target indikator sasaran untuk prosperity pada RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Target Indikator Sasaran PROSPERITY untuk RKPD 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Tingkat Kemiskinan	%	11,68 - 12,18
2	Rasio Gini	Indeks	0,369 – 0,373

Sumber: Rancangan RKP 2025

Selanjutnya, keselarasan Prioritas Daerah Kelima dengan Prioritas Nasional digambarkan dalam PN 6 dan PN 8. Pada PN 6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Indikasi intervensi pada PN 6 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 6

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	▪ Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Mataram
	▪ Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pemerataan ekonomi

Sumber: Rancangan RKP 2025

Selanjutnya, pada PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Anta rumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur. Indikasi intervensi pada PN 8 untuk Provinsi NTB pada Rancangan RKP 2025 adalah:

Tabel Indikasi Intervensi Pusat pada PN 8

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi Pusat
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam	▪ Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	▪ Pengamanan pantai di tiga Gili Kabupaten Lombok Utara

Sumber: Rancangan RKP 2025

2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Adapun rekapitulasi rencana program prioritas berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.233.383.475
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.808.680.673
	Balai Kemasan Produk Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	929.219.250
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.491.842.600
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.825.000.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	245.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.356.462.499
	Dinas Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	200.000.000
	Dinas Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.206.237.500
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.003.535.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.075.767.632
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	16.847.727.700
PD - 7 Peningkatan Dayasaing Daerah	UPTD Pengelola Rumah Susun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	350.000.000
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.103.935.026
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.036.168.058

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.800.000.000
	Biro Hukum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	395.400.855
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.570.370.371
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	642.592.593
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.642.592.593
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	145.646.086.778
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.000.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	50.000.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	834.474.272.210
	Dinas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	35.478.439.960
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.750.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.887.277.590
PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.325.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.655.000.000
PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Inseminasi Buatan (BIB)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	280.148.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	200.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.152.500.000
	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	261.600.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.950.000.000
	Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	239.500.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	800.000.000
	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.000.000.000

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
	Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	800.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210.000.000
	Biro Perekonomian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	615.447.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.050.703.000
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.320.000.000
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.236.260.995
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	430.000.000
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	891.325.418
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	288.130.023
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.390.571.136
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.612.080.774
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.615.702.807
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.265.029.488
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	50.010.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	83.177.358.196
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.625.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.528.933.371
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	725.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16.070.318.657
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.372.500.000
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	575.000.000
	Pusat Layanan Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	307.251.645

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	700.000.000
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.425.000.000
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	593.600.000
	Dinas Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.500.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	500.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.900.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	200.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	64.115.267.035
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	19.609.382.000
	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.662.832.412
	UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	170.000.000
PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.500.298.089
PD-2 Pembangunan Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.730.147.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.676.230.566
	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.469.515.985
	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	199.670.000
	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	398.237.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	285.372.400
	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	184.985.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	191.556.400

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	336.944.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	133.005.000
	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	335.282.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.955.800
	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	342.473.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	348.407.200
	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	167.300.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	269.002.500
	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	382.286.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	269.830.400
	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	168.630.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	194.930.000
	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.076.893.600
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	127.655.563.983
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.674.589.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.969.895.210
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	214.999.500
	Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	66.286.422.223
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	17.063.222.838
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.974.805.938
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	250.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	250.000.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36.297.395.249
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	692.623.170.801

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	790.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	250.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.199.302.873.028
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	500.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.250.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.565.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.406.627.368
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	10.000.000
	Museum Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.800.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.116.928.000
	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.236.597.195
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134.740.492.805
	Rumah Sakit Mandalika	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	43.278.800.809
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.542.074.189
	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.500.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.259.467.873
	SMKN 1 Dompu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.689.077.000
	SMKN 1 Donggo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	792.250.000
	SMKN 1 Lingsar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.025.000.000
	SMKN 1 Praya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.598.750.000
	SMKN 1 Selong	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.528.065.000
	SMKN 1 Taliwang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.225.970.000
	SMKN 2 Kota Bima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	638.400.000
	SMKN 2 Kuripan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.023.700.000
	SMKN 2 Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.570.000.000
	SMKN 3 Mataram	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.547.102.000

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
	SMKN 5 Mataram	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.610.697.500
	Taman Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.000.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.053.796.600
PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.593.483.740
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.690.832.350
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.591.609.720
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.300.000.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.700.000.000
	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	220.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.000.000
	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.480.000.000
	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.395.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.946.726.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.000.000.000
	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.299.320.000
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.483.148.161
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	315.500.000
PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	103.010.400
	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	356.500.000
	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.698.696.000
	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	75.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	120.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	250.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.230.000.000

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.612.000.000
	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.634.260.001
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.476.620.000
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	788.655.090
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.050.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.500.000.000
PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.964.500.000
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10.676.120.874
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	941.608.516.495
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.169.973.254
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.833.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.856.292.350
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.660.655.869
	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.272.797.908
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	588.790.360
	Biro Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	745.956.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	624.044.000
	Biro Administrasi Pimpinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.097.692.475
	Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6.275.584.567
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.740.784
	Biro Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	748.130.489
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	331.158.651
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	925.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	263.307.800
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.351.936.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.068.775.900

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	PAGU
	Biro Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	162.465.642.140
	Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.500.000
	Dinas Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.570.255.272
	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	500.000.000
	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.687.012.451
	Pelayanan Perbendaharaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.054.691.240
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	568.872.020
	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.401.083.400
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.327.757.030
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.540.679.575
	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	412.500.000
	UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.830.000.000
	UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.110.821.240

2.4. Target Pembangunan Daerah Tahun 2025

Target Kinerja Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berpedoman pada target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan memperhatikan hasil evaluasi target capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dan rencana capaian target pada tahun 2024 berjalan serta sasaran visi dan Indikator utama pembangunan RPJPD 2025-2045 untuk Tahun 2025 . Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Visi RPJPD NTB

Tabel Sasaran Visi RPJPD NTB Tahun 2025

No	Sasaran Visi RPJPD NTB Tahun 2025-2045	Target 2025
I.	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Tinggi	
	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	32,73-32,98
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54,53
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	7,66
II.	Kemiskinan Menuju Nol Persen dan ketimpangan Menurun	
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,68-12,18

No	Sasaran Visi RPJPD NTB Tahun 2025-2045	Target 2025
	Rasio Gini (Indeks)	0,369 – 0,373
	Kontribusi PDRB Provinsi NTB	0,82
	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,00 – 6,50
III.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, daan Pembangunan yang Berkelanjutan di Tingkat Nasional	
	Indeks Inovasi Daerah (IID)	76,50
	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,40
IV.	Daya Saing, Kehandalan dan Ketaqwaan SDM Meningkat	
	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54
V.	Resiliensi Terhadap Perubahan Iklim dan Ketangguhan Terhadap Bencana Meningkat Serta Menurunnya Intensitas GRK	
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	25,99
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	76,19

Sumber : Ranperda RPJPD NTB 2025-2045

Indikator Kinerja Utama

Tabel Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2025

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target dalam RPD	Target Penyesuaian Dalam RKPD
					2022	2023	2025	2025
I	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN		Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	48,24	49-50	53-55	53-55
			Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,8	>5	8	7,6
	1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	6,95	5.5-6.9	6-7.5	6,00 – 6,50
			Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	3,42	4.7-6.3	5.5-6.9	5.5-6.9
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,89	2.7-3.1	2,85	2,19 - 2,79

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target dalam RPD	Target Penyesuaian Dalam RKPD
					2022	2023	2025	2025
II	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	69,46	72,37-73,16	73,86-74,77	0,54 (IMM)
	2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,61	8,69	9,55	8,65 - 8,66
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,96	15,05	17	14,24 - 14,25
			Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	67,07	72,02-72,35	72,68-73,01	72,92
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	257	257	257-189	169,00
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24,64	24,64	24.64-16.85	24.64-16.85
	3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	17,74	50	69-70	69-70
			Persentase kota kreatif	%	0	0	40	40
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	54,73	54-60	54-60	57,05 - 57,1
			Persentase penanganan konflik SARA	%	4 kasus	6 kasus (50%)	100	100
III	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	70.56		77,5	76,19
	4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,58	19,64	19,76	25,99
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	119,83	115,83	110,08	119,83
			Bauran energi baru terbarukan	%	20,44	19,18	23	23
	5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	65,61	65,58	65,53	65,53
			Indeks Kualitas Air	point	43,39	44,3	46,8	46,8
			Indeks Kualitas Udara	point	89,3	75-89	50-75	50-75
IV	TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI		Angka kemiskinan	%	13,82	11,92	9,57	12,7-13,1
			Prevalensi Stunting	%	32,7	24,6	≤ 10	21,70
			Gini rasio	angka	0,374	0,37	0,362	0,369 – 0,373

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target dalam RPD	Target Penyesuaian Dalam RKPD
					2022	2023	2025	2025
	6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	63,81	66,27	71,19	71,19
			Indeks Ketahanan Pangan	point	75,74	76,67	78,67	78,67
			Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Kurang Baik	Kurang Baik	Baik	Baik
			Indeks Demokrasi	point	76,19	76,83	78,11	Sedang (75,37 - 78,63)
	7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	6.3	2-4	2-4	2,8 - 3,5
			Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	89,13	90	97	98,00
			Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	18,85	32	54	27,2
			Peningkatan Pendapatan per kapita	%	6,95	7	9	34,48 - 34,57 (Juta rupiah)
			Tingkat Literasi Keuangan	%	65,45	65-67	65-67	65-67
V	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi	point	67,02	BB	BB	BB
	8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	BB	BB	A	A
	9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	1,468	Rendah	Sedang	Sedang

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target dalam RPD	Target Penyesuaian Dalam RKPD
					2022	2023	2025	2025
VI	TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)		Persentase Capaian Indikator SDGs	%	50	56	67	67
	10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	56	60	70	70
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	50	55	65	65
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	46	52	69	69
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	50	55	65	65
VII	TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH		Indeks Daya Saing Daerah	point	3,22	3,32	3,38	3,4
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	-	76,61	80	80
	12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	92	93	95	95
	13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	76,56	77	79	76,5

Sumber: RPD Prov. NTB 2024-2026

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD). Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Daerah

Tabel Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1,01	Pendidikan					
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,38	7,61	9,55	8,65 - 8,66
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,9	13,96	17	14,24 - 14,25
3	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	80,99	76,32	100	100
4	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	80,99	76,32	100	100
5	Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan menengah/sederajat	%	N/A	35,53	36,28	36,28
6	Persentase siswa/pelajar yang mengikuti pendidikan karakter	%	N/A	193573 (jumlah siswa)	100	100
7	Persentase siswa yang memiliki sertifikasi kemampuan dan keterampilan bahasa inggris (TOEFL/IELTS)	%	N/A	N/A	21-25	10
8	Persentase sekolah yang melakukan pemilahan sampah sekolah	%	N/A	10888 (jlm sekolah N/S umum dan agama)	30% (3267 sekolah)	30% (3267 sekolah)
9	Persentase lulusan SMK yang mendapatkan sertifikasi LSP P1	%	N/A	1255 (jumlah lulusan tersertifikasi)	100	100
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Retribusi dan LLPAD)	%	N/A	229.400.000	10-15	10-15
1,02	Kesehatan					
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	66,69	67,07	72,68-73,01	72,92

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100,000 KH	257	257	257-189	169,00
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24,64	24,64	24,64-16,85	24.64-16.85
4	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	%	80,99	76,32	100	100
5	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi	%	80,99	76,32	100	100
6	Persentase keluarga sehat pada setiap posyandu keluarga	%	N/A	7,676 posga	76-80	76-80
7	Persentase Balita Stunting (e-PPBGM)	%	19,23	16,84	12	21,70 (SKI)
8	Persentase sanitasi layak	%	82,85	83,12	89,03	89,03
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi)	%	N/A	597.500.000	10-15	10-15
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (LLPAD)	%	N/A	9.497.043.900	10-15	10-15
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD)	%	N/A	22.706.400.000	10-15	10-15
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD)	%	N/A	242.361.909.385	10-15	10-15
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD)	%	N/A	20.012.000.000	10-15	10-15
14	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD)	%	N/A	8.692.388.500	10-15	10-15
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase sanitasi aman	%	4,4	5,53	14,14	14,14
2	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota	%	0	0	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
3	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota	%	0	0	100	100
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	76,38	78,87	86,84	86,84
5	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis	%	N/A	10 kab/kota	25%	25%
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi	%	8,9	-1,8	2,6-3,2	2,6-3,2
7	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,88	52,17	58,62	58,62
8	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	N/A	523.100.000	10-15	10-15
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Persentase pembangunan Rumah layak huni (RLH)	%	63,67	62,3	68,3	68,3
2	Persentase pemenuhan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi	%	99,80	100	100	100
3	Persentase pemenuhan SPM Fasilitasi Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	%	0,00	0,00	100	100
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate	%	1,4	4,1	1,7-2,1	1,7-2,1
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah	%	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	%	100	0,00	100	100
4	Persentase pemenuhan SPM Bencana Daerah	%	100	100	100	100
5	Indeks Kapasitas Daerah	poin	0,63	0,72	0,84	0,84
6	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	51,38	69,35	33 (242 destana)	33 (242 destana)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
7	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	122,33	119,83	110,08	119,83
1,06	Sosial					
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	N/A	Kurang Baik	Baik	Baik
2	Jumlah Kemiskinan ekstrem	%	4,8	3	0	0
3	Persentase pelayanan kepada kelompok rentan/disabilitas	%	27.705	1.615 (5,8%)	20	20
4	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%	100	94,67	100	100
5	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100	100
6	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti	%	100	100	100	100
7	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	%	100	95,38	100	100
8	Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	%	100	100	100	100
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Sosial (Retribusi)	%	N/A	6.000.000	10-15	10-15
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
2,01	Tenaga Kerja					
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	poin	57,66	63,81	71,19	71,19
2	Persentase peningkatan upah kerja (UMP)	%	4.901.798 (nasional)	2.713.672 (bali)	5	5
3	Persentase peningkatan remittance	%	995M	602M	20	20
4	Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair	%	N/A	116 (jumlah perusahaan)	40	40
5	Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian	%	16,77	17,49	22,50	22,50
6	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas	%	N/A	720.400.000	10-15	10-15

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
	Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Retribusi)					
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indeks pembangunan gender	poin	90,53	90,58	90,68	90,68
2	Indeks pemberdayaan gender	poin	52,54	53,54	54,81	54,81
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	tahun	20,39	20,46	20,56	20,56
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	27,13	29,31	35,07	35,07
5	Cakupan Kab/kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya	%	30	40	80	80
2,03	Pangan					
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	75,67	75,74	78,67	78,67
2	Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	75,19	74,55	74,32	74,32
3	Persentase konsumsi komoditi bukan makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	24,81	25,45	25,68	25,68
4	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	90,4	93,3	97,9	97,9
2,04	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Air	poin	45,1	43,39	46,8	46,8
2	Indeks Kualitas Udara	poin	88,52	89,3	87,65	87,65
3	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	%	N/A	12 sektor aksi mitigasi	30	30
4	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	%	N/A	5 sektor aksi adaptasi	30	30

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
5	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	%	69	77	92	92
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,49	3,33	5,3-6,4	5,3-6,4
7	Pemilahan sampah rumah tangga	%	1143 desa/kelurahan	118 desa	51-70	51-70
8	Pemilahan sampah perkantoran	%	48	50	80	80
9	Pemilahan sampah area publik	%	10 kab/kota	10	61-80	61-80
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	%	N/A	970.700.000	10-15	10-15
2,05	Pertanahan					
1	Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA)	%	100	100	100	100
2	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100	100
2,06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Persentase perekaman KTP	%	100	97,7	100	100
2	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	%	108	100	100	100
2,07	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1	Persentase desa mandiri dan maju	%	43,08	61,39	67	67
2,08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Pertumbuhan penduduk (%)	%	1,31	1,39	1,29	1,29
2	mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate) : PUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern	%	57,0	58,0	80,0	80,0
2,09	Perhubungan					
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Transportasi dan Pergudangan	%	2,1	16,8	8,2-10	8,2-10
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Darat	%	0,9	9,6	8,1-9,9	8,1-9,9

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Laut	%	-3,3	14,6	7,6-9,3	7,6-9,3
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	%	15,6	18,2	7,0-8,6	7,0-8,6
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Udara	%	-8,0	36,5	10-12,3	10-12,3
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	%	0,1	22,9	8,2-10	8,2-10
2,1	Komunikasi dan Informatika					
1	Tingkat literasi digital	%	1143 desa/kelurahan	200 (17,5%)	100	100
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi	%	4,9	3,1	7,6-9,3	7,6-9,3
3	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	kategori	Interaktif	Transaksi	Kolaborasi	Kolaborasi
4	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	50	65	80	80
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan	%	450 UMKM	10%	5-7	5-7
2	Pertumbuhan produktivitas Subsektor KUKM	%	4,75	4,75	4,9	4,9
3	Koperasi Modern	%	10	20	50	50
4	Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UMKM (Retribusi)	%	N/A	209.200.000	10-15	10-15
2,12	Penanaman Modal					
1	Persentase Realisasi investasi pada kawasan strategis	%	13,91T	21,6T (55,2%)	29,5 T(16%)	29,5 T(16%)
2,13	Kepemudaan dan Olah Raga					
1	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional	%	41 (medali)	87 (medali)	10	10

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	6	15	15	15
3	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dispora (Retribusi)	%	N/A	376.900.000	10-15	10-15
2,14	Statistik					
1	Persentase penyediaan data statistik sektoral provinsi dan kabupaten/kota	%	N/A	provinsi dan 10 kab/kota	27	27
2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	30	50	70	70
2,15	Persandian					
1	Persentase aplikasi SPBE yang aman	%	N/A	N/A	20	20
2	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	level	II+	III	III+	III+
2,16	Kebudayaan					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	54,73	54,73	54-60	57,05 - 57,1
2,17	Perpustakaan					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	17,66	64,55	69-70	69-70
2	Persentase jangkauan layanan perpustakaan mobile ke desa	%	1143 desa/kelurahan	10	25	25
2,18	Kearsipan					
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	66,67	83,33	100	100
3	URUSAN PILIHAN					
3,01	Kelautan dan Perikanan					
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perikanan	%	2,0	2,2	2,7-3,4	2,7-3,4
2	Produksi Perikanan	ton	1.436.947	1.468.104	1.565.751	1.565.751
3	Nilai Tukar Nelayan	poin	>110	>110	113	113
4	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	%	4,77	4,78	5,12	5,12
5	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Retribusi)	%	N/A	630.492.000	10-15	10-15

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
3,02	Pariwisata					
1	Persentase kota kreatif	%	N/A	10 kab/kota	40	40
2	Persentase SDM kepariwisataan dengan sertifikasi kompetensi dan bahasa asing	%	382 desa wisata	457 desa wisata	343 (25%)	343 (25%)
3	Persentase pengembangan geosite geopark sebagai lokasi pengembangan green economy dan destinasi eco tourism	%	73	22 (30%)	58 (80%)	58 (80%)
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,3	24,6	27,3-33,7	27,3-33,7
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Akomodasi	%	1,3	28,2	34-41,5	34-41,5
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Makan Minum	%	1,3	21,7	20,4-25	20,4-25
7	Pemilahan sampah perhotelan/destinasi pariwisata	%	N/A	86 hotel bintang	31-60	31-60
8	Pemilahan sampah rumah makan dan restoran	%	10 kab/kota	10	61-80	61-80
9	Persentase Desa Wisata yang berprestasi nasional dan internasional	%	60	80	100	100
10	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,1	3,25	3,5	3,5
11	Angka kunjungan wisatawan	orang	964.036	1.376.295	2.294.089	2.294.089
12	Angka Kunjungan Wisata Nusantara	%	952.146 (orang)	31%	20	20
13	Angka Kunjungan Wisata Mancanegara	%	11.890 (orang)	964%	125	125
14	Persentase peningkatan nilai investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	15	15
15	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pariwisata (Retribusi)	%	N/A	506.600.000	10-15	10-15
3,03	Pertanian					
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha pertanian	%	N/A	776.800	1.033.920 (10%)	1.033.920 (10%)
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,1	2,1	3,7-4,6	3,7-4,6

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	0,9	2,1	4,0-4,8	4,0-4,8
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Pangan	%	0,1	2,4	4,5-5,5	4,5-5,5
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Hortikultura	%	0,6	0,5	2,7-3,3	2,7-3,3
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perkebunan	%	2,4	0,5	1,8	1,8
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Pertanian dan Perburuan	%	0,1	1,0	4,0-4,8	4,0-4,8
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Peternakan	%	2,6	3,4	4,2-5,1	4,2-5,1
9	Nilai Tukar Petani	poin	>105	>105	>105	>105
10	Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	16,51	16,69	16,65	16,65
11	Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	3,90	3,66	3,80	3,80
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD)	%	N/A	807.800.000	10-15	10-15
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Retribusi)	%	N/A	782.300.000	10-15	10-15
3,04	Kehutanan					
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	65,59	65,61	65,53	65,53
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	2,4	1,4	3,5-4,2	3,5-4,2
3	Persentase penanganan lahan kritis	%	578.307.375 Ha	138.793.68 Ha	4-5	4-5
4	Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	%	873	300	21-25	21-25
5	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	%	11 (kasus)	4 (36,36%)	100	100
6	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong	%	487 desa lingkar hutan	200 desa miskin di lingkar hutan	30 % dari 200 desa miskin	30 % dari 200 desa miskin

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
	kemiskinan) di sekitar lingkar hutan					
3,05	Energi dan Sumberdaya Mineral					
1	Bauran energi baru terbarukan	%	13,04	20,44	23	23
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian	%	-0,1	22,6	7,9-9,6	7,9-9,6
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	%	3,3	-2,5	2,5-3,1	2,5-3,1
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	7,7	9,4	6,7-8,1	6,7-8,1
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Ketenagalistrikan	%	7,7	9,4	6,7-8,1	6,7-8,1
3,06	Perdagangan					
1	Persentase peningkatan ekspor	%	1.140.459.832 ($USD)	77%	96-100	96-100
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	1,7	4,9	7,0-8,6	7,0-8,6
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	%	2,1	6,0	5,7-7,0	5,7-7,0
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	%	1,6	4,7	7,2-8,9	7,2-8,9
5	Pemilahan sampah pasar	%	10 kab/kota	10	61-80	61-80
6	Pengeluaran Per Kapita	Rp, Ribu	10.377	10.681	11.651-12.132	11.651-12.132
3,07	Perindustrian					
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha industri	%	638.981.919	702M-638M	15	15
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan	%	2,0	1,9	3,9-4,8	3,9-4,8

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Makanan dan Minuman	%	1,2	2,8	2,7-3,3	2,7-3,3
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pengolahan Tembakau	%	3,2	-0,2	5,3-6,5	5,3-6,5
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	%	2,4	4,4	4,8-5,8	4,8-5,8
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	%	8,1	2,5	7,6-9,3	7,6-9,3
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	%	-1,8	4,2	3,6-4,5	3,6-4,5
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	%	-9,1	1,6	3,7-4,6	3,7-4,6
9	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	%	-0,8	1,6	3,3-4,0	3,3-4,0
10	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang Galian bukan Logam	%	1,1	0,1	2,4-3,0	2,4-3,0
11	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Logam Dasar	%	-1,4	0,4	4,5-5,5	4,5-5,5
12	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	%	2,2	1,3	4,3-5,2	4,3-5,2
13	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Alat Angkutan	%	2,1	1,3	4,5-5,5	4,5-5,5
14	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Furnitur	%	0,2	1,9	7,0-8,6	7,0-8,6
15	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	%	0,5	2,8	3,9-4,8	3,9-4,8
16	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	%	N/A	86.500.000	10-15	10-15

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
3,08	Transmigrasi					
1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	%	N/A	23,91	27	27
2	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri	%	45,66	48,6	50,47	50,47
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4,01	Administrasi Pemerintahan					
1	Capaian prestasi daerah	angka	9 (jumlah per tahun)	23	29	29
2	Persentase rumah ibadah yang telah dibantu/difasilitasi	%	5870	2811 (52%)	5106 (25%)	5106 (25%)
3	Persentase pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi	%	730	266	614 (25%)	614 (25%)
4	Persentase program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi	%	95	95-100	95-100	95-100
5	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,54	3,71	3,85	3,85
6	Persentase perjanjian kerjasama regional dan internasional yang telah diselesaikan dari MoU yang telah disepakati	%	N/A	80	20 (25%)	20 (25%)
7	Pemilahan sampah madrasah/pondok pesantren	%	N/A	N/A	30% (799 Ponpes)	30% (799 Ponpes)
8	Jumlah Lapangan usaha yang berkembang dari prospektif menjadi unggul	lapangan usaha	N/A	14	18	18
9	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari andal menjadi prospektif	lapangan usaha	N/A	12	19	19
10	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari tertinggal menjadi andal	lapangan usaha	N/A	21	14	14
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi)	%	N/A	22.900.000	10-15	10-15
12	Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	N/A	55,8 Mliar	10-15	10-15
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5,01	Perencanaan					

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	kategori	N/A	Kurang	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Perkembangan jumlah mitra pembangunan	angka	N/A	133 mitra	163	163
5,02	Keuangan					
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	%	4,3	0,3	5,7-6,9	5,7-6,9
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Perantara Keuangan	%	6,3	-1,3	5,4-6,7	5,4-6,7
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Asuransi dan Dana Pensiun	%	-5,6	3,3	6,3-7,7	6,3-7,7
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Keuangan Lainnya	%	-1,9	8,8	6,6-8,0	6,6-8,0
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Penunjang Keuangan	%	6,3	31,8	5,8-7,2	5,8-7,2
6	Persentase pertumbuhan PAD	%	4,01	21,14	4,92	4,92
7	Peningkatan Pendapatan transfer	%	3,13	-12,76	0,11	0,11
8	Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah	%	-49,68	32,71	0	0
9	Kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan	%	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan	%	0,1	0,1	0,1	0,1
11	Kepatuhan ketentuan alokasi infrastruktur	%	25% dari penerimaan dana transfer	25% dari penerimaan dana transfer	25% dari penerimaan dana transfer	25% dari penerimaan dana transfer
12	Kepatuhan ketentuan alokasi pengawasan	%	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)
13	Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan	%	1% dari APBD	1% dari APBD	1% dari APBD	1% dari APBD
14	Persentase peningkatan retribusi dan LLPAD pada BPKAD	%	N/A	1,7 Miliar	10-15	10-15
5,03	Kepegawaian					
1	Indeks Profesionalisme ASN	poin	0,68	0,64	0,74	0,74
2	Dimensi Kualifikasi	%	13	13,9	14	14
3	Dimensi Kinerja	%	25	21	25	25
4	Dimensi Disiplin	%	5	4	5	5

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	Target Penyesuaian Dalam RKPD 2025
			2021	2022	2025	
5,04	Pendidikan dan Pelatihan					
1	Dimensi kompetensi	%	25	25,1	30	30
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada BPSDM (Retribusi dan LLPAD)	%	N/A	892,300,000	10-15	10-15
5,05	Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB	%	2077	5595	15%	15%
2	Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri	unit	N/A	13	50-75	50-75
5,06	Penghubung					
1	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	%	N/A	85	96-97	96-97
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	%	N/A	589,800,000	10-15	10-15
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6,01	Pengawasan					
1	Penurunan temuan	%	<5	<5	<5	<5
2	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
7,01	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Persentase penanganan konflik SARA	%	4 kasus	4 kasus	100	100
2	Indeks Demokrasi	poin	72,69	76,19	78,11	78,11
3	Persentase kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan karakter bangsa	%	1143 desa/kelurahan	N/A	25%	25%
4	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,46	4,67	5,33	5,33

Sumber: RPD Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026

BAB III :
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN 2025

3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAERAH

Pencapaian indikator makro pembangunan daerah provinsi NTB pada tahun 2024 dan sampai triwulan II tahun 2025 dapat disajikan dalam table berikut ini:

Table: Capaian Indikator Makro Provinsi NTB disajikan dalam table berikut ini

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target RKPD	Realisasi Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi							
	▪ Dengan tambang Bijih Logam	%	5,8-7,1	5,30	91,38	6,00 – 6,50	-0,82	-13,67
	▪ Tanpa tambang Bijih Logam	%	5,2-6,5	3,87	74,42	5,5-6,9	6,08	100,00
2	Inflasi	%	2-4	1,28	156,25	2,8 - 3,5	3,05	100
3	Tingkat Kemiskinan	%	<10	11,91	80,90	12,7-13,1	11,78	107,24
4	Gini Ratio	Point	0,366	0,364	100,55	0,369 – 0,373	0,369	100,00
5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	73,10-73,96	73,10	100,00	73,86-74,77	NA	NA
5.2	Indeks Modal Manusia (IMM)					0,54	NA	NA
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,98	2,73	108,39	2,19 - 2,79	3,22	86,65

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

Dari 6 indikator makro provinsi NTB, tingkat capaian indikator makro NTB pada tahun 2024 mencapai 66,67%, dimana terdapat sebanyak 4 indikator sesuai bahkan melampui target sedangkan 2 indikator tidak memenuhi target. Sedangkan sampai triwulan II tahun 2025, dari 5 indikator yang telah dapat diukur capaiannya, terdapat 4 indikator yang telah memenuhi bahkan melampaui target atau 66,67%. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Inflasi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio. Pertumbuhan ekonomi NTB tanpa memperhitungkan pertambangan bijih logam mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 3,87% pada tahun 2024, sampai triwulan II 2025 telah mencapai 6,08%. Inflasi tetap stabil pada kisaran 2 $\pm$ 1 sebesar 2,51%, tingkat kemiskinan terus dapat ditekan dari 11,91% pada tahun 2024 menjadi 11,78% sampai triwulan II 2025, sedangkan gini ratio, meskipun ada kenaikan sebesar 0,005 tetapi masih sesuai dengan target tahun 2025.

Adapun IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka pencapaian tahun 2024 sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan tahun 2025 tingkat pengangguran NTB mengalami peningkatan menjadi 3,22% dari 2,73% pada tahun 2024, untuk IPM belum ada rilis angkanya. Indikator yang capaiannya belum sesuai target yaitu pertumbuhan ekonomi dengan tambang. Pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang sampai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,30% sedangkan sampai triwulan kedua tahun

2025 mengalami kontraksi sebesar 0,82%. Deskripsi pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025 dibanding Triwulan II-2024 (y-on-y) dengan memperthitungkan pertambangan bijih logam mengalami kontraksi sebesar 0,82 persen, sedangkan tanpa memperhitungkan pertambangan bijih logam mengalami pertumbuhan yang cukup siginifikan mencapai 6,08%. Kontraksi terjadi pada 2 (dua) lapangan usaha sedangkan 15 (lima belas) lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,93 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,04 persen. Sementara itu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diantaranya Industri Pengolahan sebesar 66,19 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,08 persen; Konstruksi sebesar 5,57 persen; Jasa lainnya sebesar 5,43 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 4,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 4,20 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,03 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,71 persen; Real Estate sebesar 3,53 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,25 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,91 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,46 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,37 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,89 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen. Namun jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 (q-to-q), pertumbuhan ekonomi NTB mengalami pertumbuhan sebesar 6,56 persen. Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha sedangkan 1 (satu) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah Industri Pengolahan sebesar 37,69 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,83 persen; dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 11,19 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa lainnya tumbuh sebesar 9,17 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 7,80 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 6,40 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,98 persen; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 3,48 persen; Real Estate tumbuh sebesar 2,25 persen; Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 1,63 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 1,44 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 1,34 persen; Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 1,28 persen; Konstruksi tumbuh sebesar 1,16 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 0,88 persen; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 0,42 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Jasa Kesehatan yang turun sedalam 0,23 persen.

Adanya kontraksi ekonomi pada triwulan ke-II tahun 2025 terutama disebabkan oleh anjloknya kinerja sektor pertambangan dan penggalian, serta melemahnya kinerja ekspor. Penurunan drastis sektor tambang dipicu oleh turunnya produksi konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Produksi merosot hingga 57 persen dibanding triwulan II-2024. Hal ini merupakan dampak langsung dari penghentian ekspor konsentrat tembaga. Penghentian itu sejalan dengan penerapan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang ekspor mineral mentah. Akibatnya, ekspor luar negeri NTB pada triwulan II-

2025 turun tajam hingga 77,73 persen secara tahunan. Ini menjadi salah satu faktor utama yang menyeret pertumbuhan ekonomi NTB ke zona negatif.

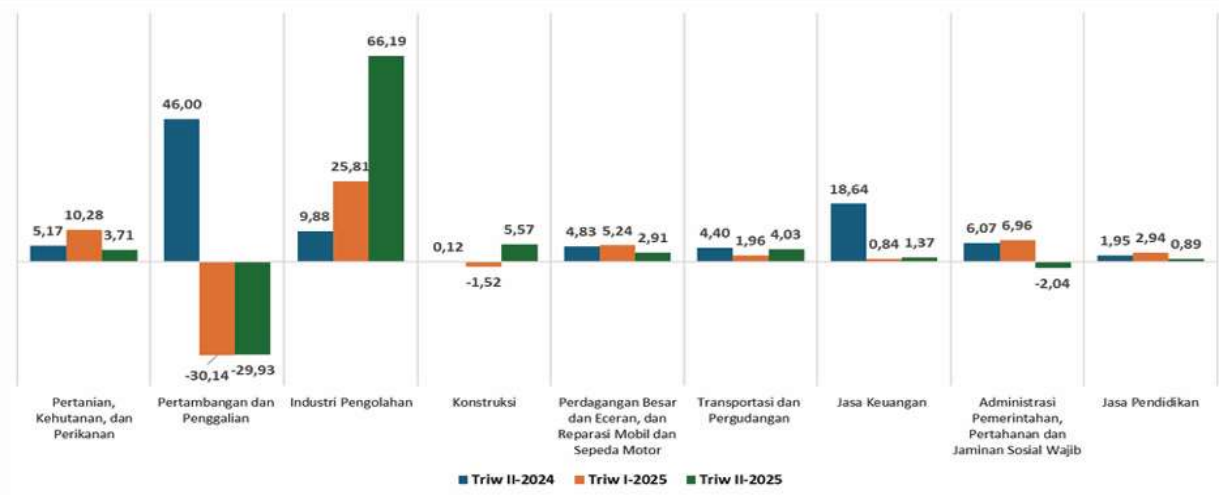

Perekonomian Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp. 182,26 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 109,41 triliun, sedangkan sampai Triwulan II-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 47,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 27,83 triliun. Adapun struktur PDRB Nusa Tenggara Barat secara umum tahun 2025 masih sama dengan periode sebelumnya. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,31 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,72 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,75 persen; dan Konstruksi sebesar 8,77 persen.

2. TINGKAT INFLASI

Tingkat Inflasi Provinsi NTB Tahun pada triwulan II tahun 2025 pada Juli 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,05 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,93, sedangkan tingkat inflasi *month to month* (*m-to-m*) Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Juli 2025 sebesar 0,17 persen. Meskipun secara y-on-y meningalami peningkatan, namun tingkat inflasi ini masih dalam rentang target inflasi yang ditetapkan yaitu antara 2-4 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan tingkat Inflasi berhasil.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,96 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,55 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,63 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,45 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,41 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,67 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok transportasi sebesar 0,07 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan

indeks, yaitu; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,61 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Juli 2025, antara lain: emas perhiasan, tomat, bawang merah, beras, ikan teri, akademi/perguruan tinggi, ikan layang/ikan benggol, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), udang basah, cumi-cumi, kelapa, nasi dengan lauk, sigaret kretek tangan (skt), daging ayam ras, sigaret putih mesin (SPM), ikan kembung/ikan gembung, kontrak rumah. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* pada Juli 2025, antara lain: cabai rawit, angkutan udara, ayam hidup, pisang, telepon seluler, kangkung, bensin, pepaya, wortel, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, bawang putih, susu bubuk untuk balita, daun bawang, parfum, kentang, sabun detergen bubuk, pengharum cucian/pelembut, makanan hewan peliharaan, popok bayi sekali pakai/diapers, anggur.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Juli 2025, antara lain: beras, bawang merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, cabai merah, tomat, angkutan udara, jeruk, ikan bandeng/ikan bolu, rekreasi, bensin, batu bata/batu tela, daging ayam ras, sigaret kretek mesin (SKM), buku pelajaran SD, apel, kangkung. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* pada Juli 2025, antara lain: cumi-cumi, kacang panjang, udang basah, ikan kembung/ikan gembung, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, ikan teri, ikan layang/ikan benggol, susu cair kemasan, bahan bakar rumah tangga, semangka, jagung manis, terong, makanan hewan peliharaan.

Pada Juli 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,8 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,71 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,14 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,1 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Grafik

Perkembangan Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi NTB bulan Januari-Desember (Persen), 2024-2025.

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan triwulan II 2025 dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan dan menekan laju inflasi adalah yaitu membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB dan melakukan rapat pengendalian inflasi secara berkala dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional dan Distributor dalam rangka mengecek harga-harga komoditas dan bekerja sama dengan OPD terkait seperti Dinas perdagangan. Melakukan Operasi Pasar bekerjasama dengan Bulog dan pihak -pihak terkait, melaksanakan OPM secara intensif, dan memperhatikan komoditas yang mengalami perubahan harga

Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai sektor (OPD Lain) dan stakeholders lainnya, yaitu Dinas Perdagangan, Bulog Divre NTB, Bank Indonesia (BI), Reskrim Polda NTB, Dainas Pertanian dan Perkebunan, Bapenda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfotik, TVRI, PT Perusahaan Dagang Indonesia, PT, Rajawali Nusindo Cabang Mataram, KAO Cabang Mataram, CV. Baling-baling Bambu, PPJI NTB, Alfamart, Indomaret, Niaga, MGM, CV. Tulus Jaya Sejahtera, PT. Deloto MED, PT. Sungai Budi, Indo Lautan Makmur, PT. Protein Go Tama Cipta Pangan, Bokah Falm, UMKM se Kota Mataram, CV. 88, dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Mitra dan Binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.Sampai dengan bulan Desember tahun 2024 telah dilaksanakan GPM sebanyak 49 Kali (15 Kali dari Sumber APBD dan 34 Kali dari APBN). Kegiatan GPM telah melibatkan 14 Stake Holdes/Pelaku Usaha Pangan dari Unsur BUMN dan UMKM. Jumlah Komoditi yang diperjualbelikan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) komoditi, meliputi: beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam, daging kerbau, ikan, daging olahan, ikan olahan, aneka buah dan sayur serta aneka pangan lokal; Jumlah Tonase Komoditi yang diperjualbelikan sebanyak 868 ton dan yang terjual sebanyak 620 ton; dengan total

nilai omzet mencapai Rp.6.880.000.000. Jumlah masyarakat yang telah menerima manfaat kegiatan GPM sekitar 2000 orang dari berbagai kalangan masyarakat.

3. TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat Kemiskinan pada triwulan II tahun 2025 pada Maret 2025 sebesar 11,78 persen, menurun 0,13 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 1,13 persen poin terhadap Maret 2024. Sedangkan dari sisi jumlah, penduduk miskin NTB pada Maret 2025 sebesar 654,57 ribu orang, menurun 4,03 ribu orang terhadap September 2024 dan menurun 54,44 ribu orang terhadap Maret 2024. Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2024-Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 14,94 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 18,97 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 11,64 persen menjadi 12,02 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,21 persen menjadi 11,51 persen.

Grafik: Tren Penurunan Kemiskinan di NTB periode 2020-2025

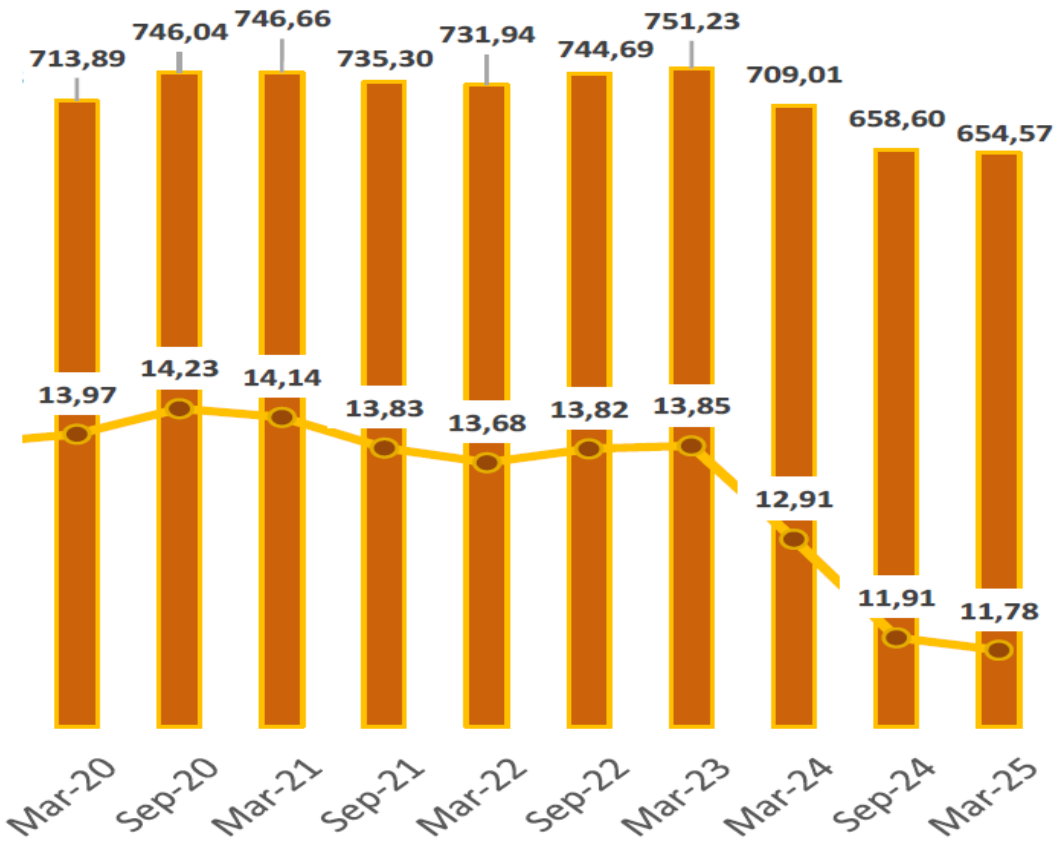

Dalam 3 tahun terakhir periode maret 2023-maret 2025, tngkat kemiskinan di NTB mengalami penurunan cukup signifikan yang mencapai 2,07 persen, jika dibandiangkan dengan periode maret 2020-maret 2023 yang hanya sebesar 0,12 persen. Keberhasilan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada sampai maret 2025 ini dikarenakan berbagai factor diantaranya inflasi yang relatif terkendali, perekonomian non tambang NTB tumbuh positif dan berbagai macam program intervensi kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Adapun Garis Kemiskinan pada Maret 2025 adalah sebesar Rp556.846 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,05 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2024, terjadi kenaikan sebesar 4,14 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2025 di perkotaan sebesar 75,97 persen dan di perdesaan sebesar 75,71 persen.

Pada Maret 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 26,72 persen di perkotaan dan 31,99 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (8,00 persen di perkotaan dan 5,50 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,39 persen di perkotaan dan 3,20 persen di perdesaan), daging ayam ras (3,73 persen di perkotaan dan 2,25 persen di perdesaan), cabe rawit (2,24 persen di perkotaan dan 2,98 persen di perdesaan), roti (2,10 persen di perkotaan dan 2,41 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (9,11 persen di perkotaan dan 11,72 persen di perdesaan), bensin (2,21 persen di perkotaan dan 2,39 persen di perdesaan), dan pendidikan (2,10 persen di perkotaan dan 1,26 persen di perdesaan). Urutan selanjutnya adalah perlengkapan mandi; listrik; perawatan kulit, muka, kuku, rambut; pakaian jadi perempuan dewasa; serta sabun cuci.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan yg cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan kemiskinan di NTB antara lain penguatan dari sisi perencanaan dengan melakukan penyelarasan dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renja) dengan Penganggaran (fokus pada intervensi sesuai dengan data P3KE), pemetaan program dan penganggaran focus penurunan kemiskinan pada OPD, mendorong program dan kegiatan diarahkan untuk pelaksanaan 3 (tiga) strategi sesuai amanat Inpres 4/2022, serta memaksimalkan program insidentil tepat sasaran. Disamping itu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan intervensi memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan ekstrim, pemetaan lokasi kantong kemiskinan dan Kawasan, melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Verifikasi Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSKPE), menetapkan desa-desa kantong kemiskinan sebagai desa prioritas intervensi, mengembangkan 10 desa model penanggulangan kemiskinan, serta memantau pelaksanaan intervensi pada lokasi yang menjadi pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Penanggulangan kemiskinan melibatkan gerakan multipihak, untuk itu dilakukan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa dengan kolaborasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat, melakukan koordinasi dengan K/L secara intensif serta koordinasi dengan Non Governmental Organization (NGO) dan Mitra Pembangunan lainnya.

4. GINI RATIO

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh *Gini Ratio*, *gini ratio* pada triwulan II atau pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,369. Angka ini naik 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,364 dan naik 0,008 poin dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,361. Meskipun sedikit mengalami peningkatan, namun masih dalam rentang RKPD tahun 2025 sebesar 0,369 – 0,373. Sementara itu, jika dilihat dari Gini Ratio berdasarkan wilayah, Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,397; naik dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,388 dan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,383. Gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,323; naik dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,320 dan menurun disbanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,326.

Grafik: Tren Ketimpangan Pengeluaran di NTB

Sementara itu, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,88 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,55 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 20,86 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

.

5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami kemajuan. Meskipun belum ada rilis progres IPM pada tahun 2025, namun selama 2020–2024, IPM Provinsi NTB rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 70,46 pada tahun 2020 menjadi 73,10 pada tahun 2024. Pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan

Tren Perkembangan IPM Provinsi NTB 2020-2024

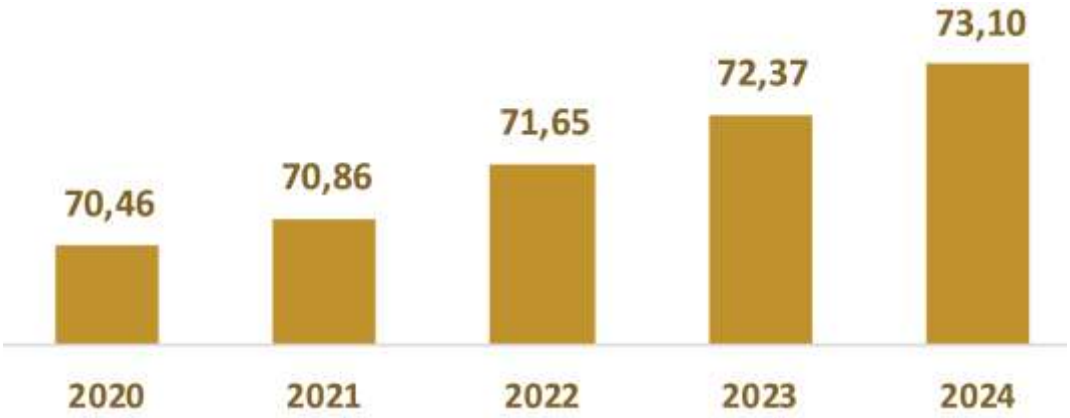

Peningkatan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,25 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,97 menjadi 13,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun, dari 7,74 tahun menjadi 7,87 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 511 ribu rupiah (4,61 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	71,17	71,33	71,66	72,02	72,25
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,70	13,90	13,96	13,97	13,98
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,31	7,38	7,61	7,74	7,87
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang dise-suaikan)	Rp 000	10.351	10.377	10.681	11.095	11.606
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,46	70,86	71,65	72,37	73,10

Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2024, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terendah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.

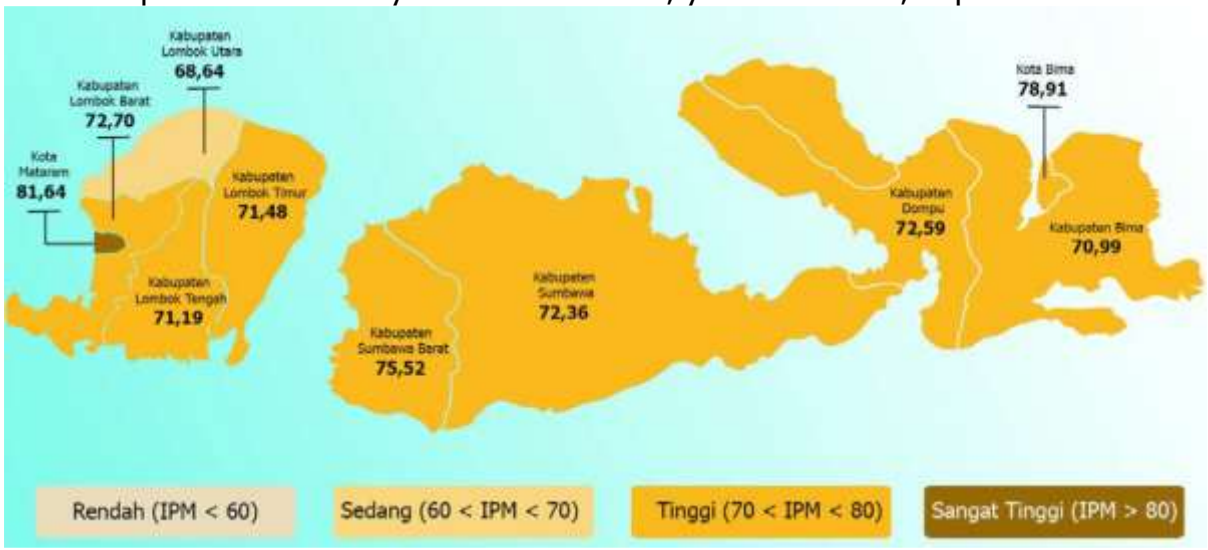

6. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi NTB pada Februari 2025 sebesar 3,22 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 0,49% jika dibandingkan dengan keadaan bulan agustus 2024 sebesar 2,73%. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,50 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,96 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 8,55 persen. Dibandingkan Februari 2024, tiga lapangan

usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (75,92 ribu orang); Pendidikan (46,14 ribu orang); dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (43,66 ribu orang).

Dengan adanya serapan tenaga kerja baru, mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami peningkatan. TPAK Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 5,34 persen poin sejak Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 76,50 persen, naik 2,53 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 86,41 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 66,63 persen. Dibandingkan pada Februari 2024, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,77 persen poin dan 3,25 persen poin.

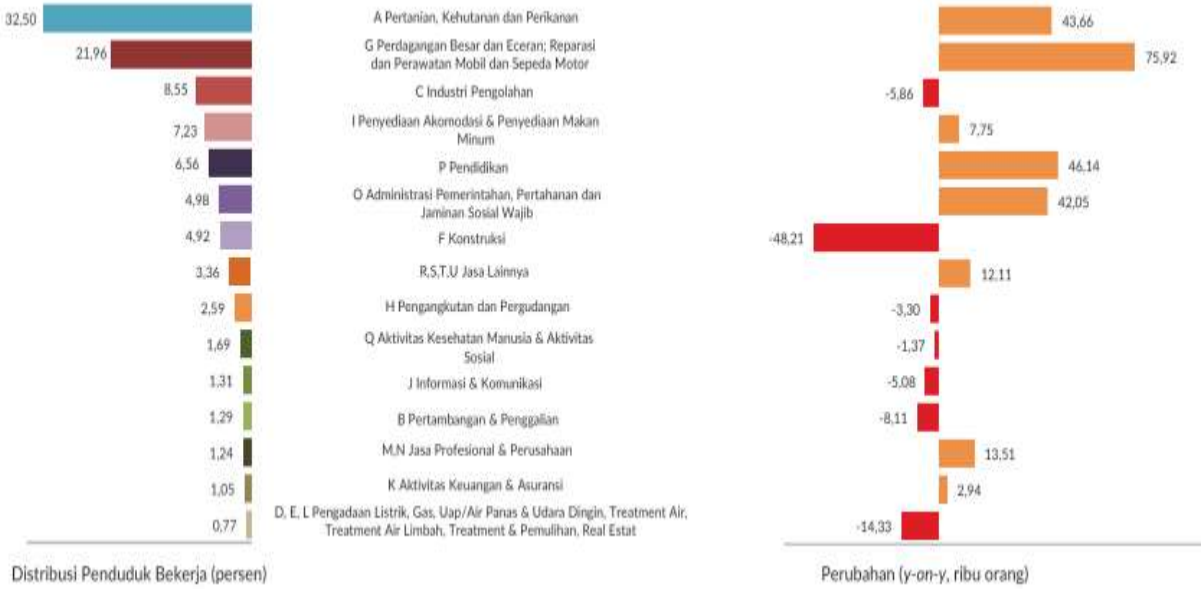

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,16 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,89 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 10,17 persen. Dibandingkan Agustus 2023, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (152,48 ribu orang); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (56,78 ribu orang); dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (17,90 ribu orang)

TPT hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 3,22 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

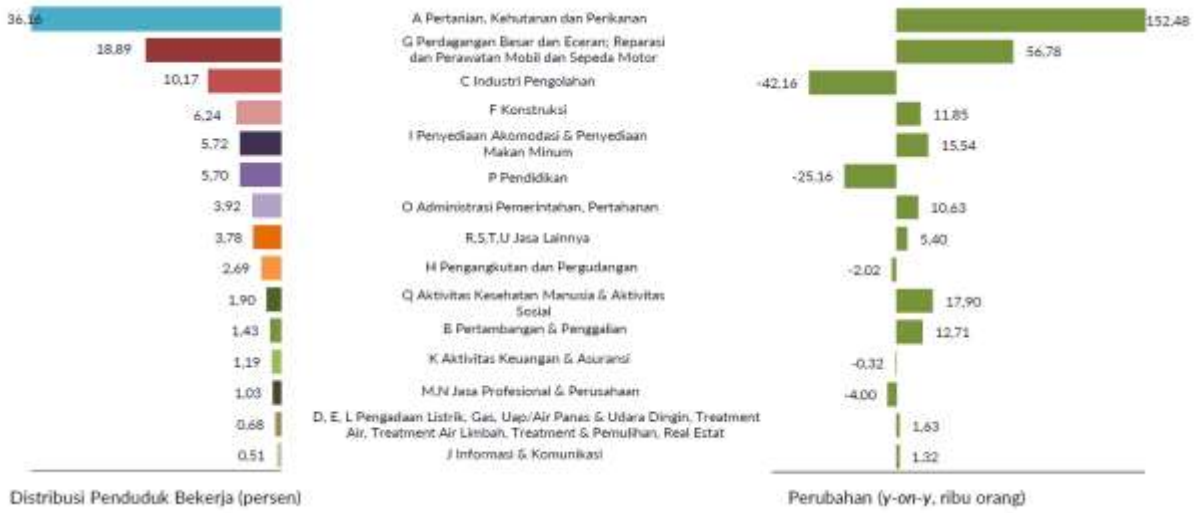

Penduduk bekerja di NTB masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 38,20 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 14,13 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Februari 2025 BRS No. 30/05/52/Th. XIX, 5 Mei 2025 5 pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Februari 2024 maupun Februari 2023. Dibandingkan dengan Februari 2024, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, turun sebesar 7,25 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Diploma I/II/III dan Universitas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,64 persen poin, 1,65 persen poin, 2,30 persen poin, dan 0,66 persen poin. Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan sebesar masing-masing 2,96 persen poin dan 0,09 persen poin

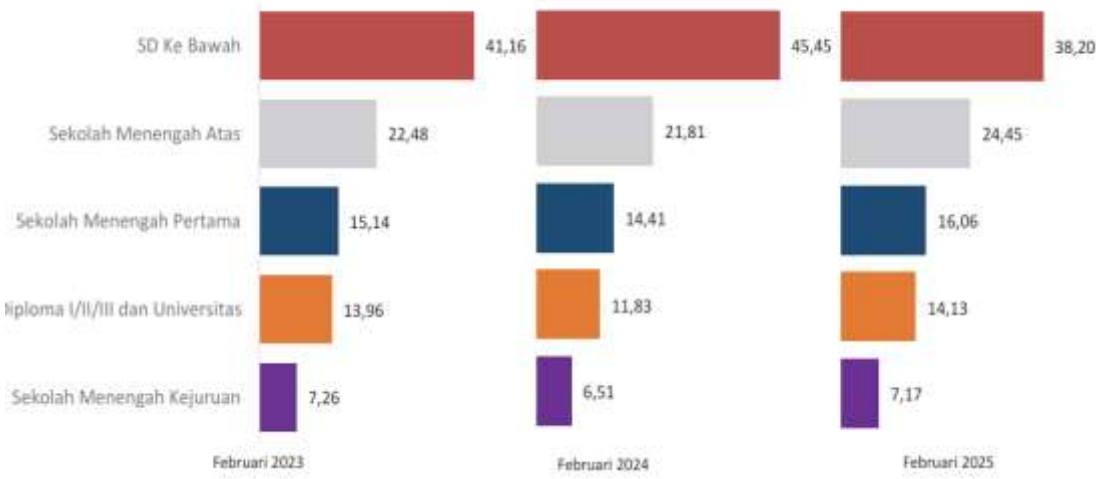

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Februari 2025, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,88 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,59 persen. Dibandingkan Februari 2024, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 2,63 persen poin dan 2,65 persen poin. Begitu juga jika dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami peningkatan TPT adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 2,95 persen poin

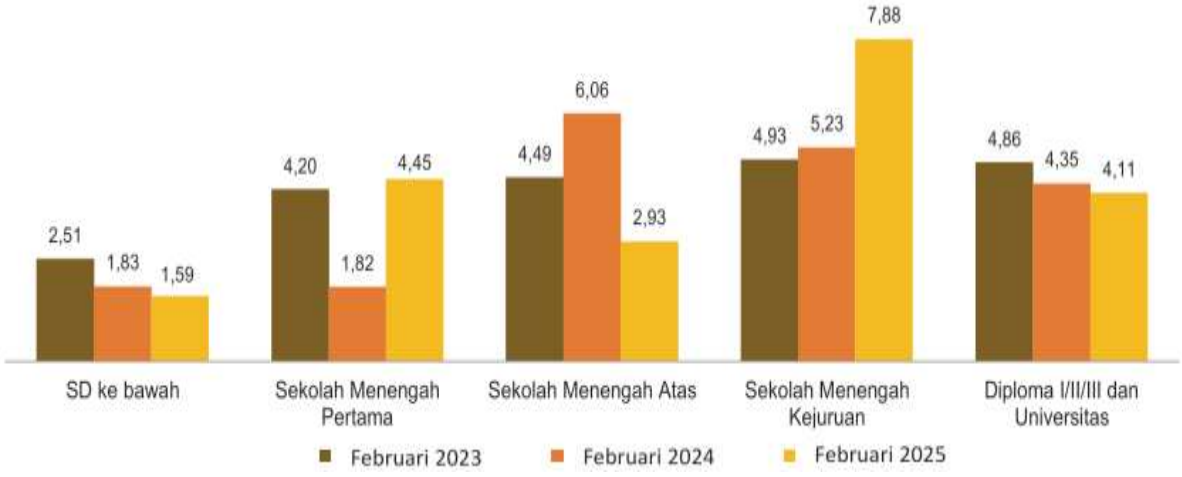

3.2. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah sebagai basis penetapan prioritas, program dan kegiatan prioritas tahun 2025. Berikut disajikan capaian kinerja utama daerah sampai pada triwulan II tahun 2025

Tabel: Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai Triwulan II

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	50-53	49,18	98,36	53-55	54,19	100,00
2	Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,5	4,19	64,46	7,6	66,19	870,92
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	73,10-73,96	73,10	100,00	73,86-74,77	NA	NA
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	75,34	73,18	97,13	76,19	NA	NA
5	Angka kemiskinan	%	<10	11,91	80,9	12,7-13,1	11,78	107,24
6	Prevalensi Stunting	%	14	12,17	113,07	12	13,38	88,50
7	Gini rasio	angka	0,366	0,364	100,55	0,369 – 0,373	0,369	100
8	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	BB	BB	100,00	BB	NA	NA
9	Persentase Capaian Indikator SDGs	%	63	56,99	90,46	67	NA	NA
10	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,35	3,68	109,70	3,4	NA	NA

Capaian IKU Pemerintah Daerah pada tahun 2024 mencapai 50%, sedangkan tahun 2025 pada triwulan II telah mencapai 40% dari 5 indikator yang sudah dapat diukur capaian, sedangkan 5 indikator blm dapat diukur sampai triwulan kedua 2025. Adapun beberapa capaian indikator yang sangat mengembirakan diantaranya capaian Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan ekspektasi yang telah 49,18% dan pada triwulan II tahun 2025 meningkat menjadi 54,19%, sehingga optimis bisa tercapai diatas 55% sesuai target akhir RPD Provinsi NTB pada tahun 2026. Pada indikator angka kemiskinan, sudah melampui target RPKD tahun 2025 sebesar 11,78% dari target 127 – 13,1%, dengan penurunan sampai bulan september 2024 cukup signifikan mencapai 1,94% tertinggi dalam 5 tahun terakhir bahkan terprogres kedua se-indonesia. Hal yang sama pada ketimpangan pengeluaran penduduk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 0,369 atau sesuai target sebesar 0,369-0,373. Sementara itu, pada indikator prevalensi stunting, mengalami sedikit peningkatan dari 12.17% menjadi 13,38% pada triwulan II tahun 2025.

Adapun capaian IPM, ILKH, Indeks Reformasi Birokrasi, Persentase capaian SD"s, dan Indeks Daya Saing Daerah, belum ada rilis datanya pada triwulan ke-II 2025, namun jika dilhat dari capaian tahun sebelumnya, ada peningkatan capaian yang signifikan antara lain IPM NTB telah masuk kategori tinggi dengan nilai mencapai 73,10, IKLH, Indeks Daya Saing Daerah telah mencapai 3,68. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan sangat signifikan dari 68,73 poin atau level B pada tahun 2023, meningkat menjadi 77,86 poin atau level BB pada tahun 2024, dan capaian ini sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini diindikasikan dalam keberhasilan dalam melakukan penyerdehaan birokrasi melalui 3 tahap yaitu penyederhanaan struktur oragnisasi, penyederhanaan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya profesionalisme ASN, serta didukung keberhasilan dalam reformasi birokrasi tematik yang diindikasikan dengan mampu menjaga stabilitas inflasi, dan mampu menurunkan stunting dan kemiskinan secara signifikan. Hal yang sama pencapaian indeks daya saing daerah yang diperkirakan naik menjadi 3,68 poin, hal ini diidnikasikan dengan keberhasilan meningkatkan kualitas layanan infrastuktur,

meningkatnya rasio elektrifikasi, rasio konektivitas, serta realisasi nilai investasi di daerah. Indiaktor-indikator tersebut belum ada rilis di triwulan II 2025.

Adapun capaian pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan daerah sesuai target pembangunan tahun 2024 mencapai 55,56%. Capaian sasaran pembangunan daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang sesuai bahkan melalui target ≥ 100% sebanyak 17 Indikator yaitu:

18. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
19. Tingkat Inflasi
20. Bauran Energi Baru Terbarukan
21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
22. Indeks Pembangunan Kebudayaan
23. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi
24. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan/*Universal Health Coverage* (UHC)
25. Indeks Kualitas Udara
26. Indeks Kualitas Air
27. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
28. Tingkat Literasi Keuangan
29. Indeks Ketahanan Pangan
30. Angka Kematian Ibu (AKI)
31. Angka Kematian Bayi (AKB)
32. Persentase Kota Kreatif
33. Persentase Penangnan Konflik SARA
34. Indeks Kesejahteraan Sosial

Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang belum sesuai target namun dengan tingkat capaian antara > 80 - > 100 sebanyak 16 Indikator yaitu:

17. Umur Harapan Hidup (UHH)

18. Indeks Resiko Bencana (IRB)
19. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
20. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
21. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
22. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang
23. Indeks Demokrasi
24. Nilai SAKIP
25. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial
26. Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM)
27. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
28. Harapan Lama Sekolah (RLS)
29. Rasio Konektivitas
30. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
31. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
32. Indeks Inovasi Daerah

Sedangkan Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang belum sesuai target namun dengan tingkat capaian antara < 80 sebanyak 3 Indikator yaitu:

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang
5. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan
6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Adapun progress capaian sasaran pembangunan daerah pada triwulan II tahun 2025, dari 36 indikator kinerja, baru 7 indikator yang sudah dapat diukur capaiannya, dengan 3 indikator telah memenuhi target RKPD Tahun 2025 yaitu Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat inflasi dan Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)

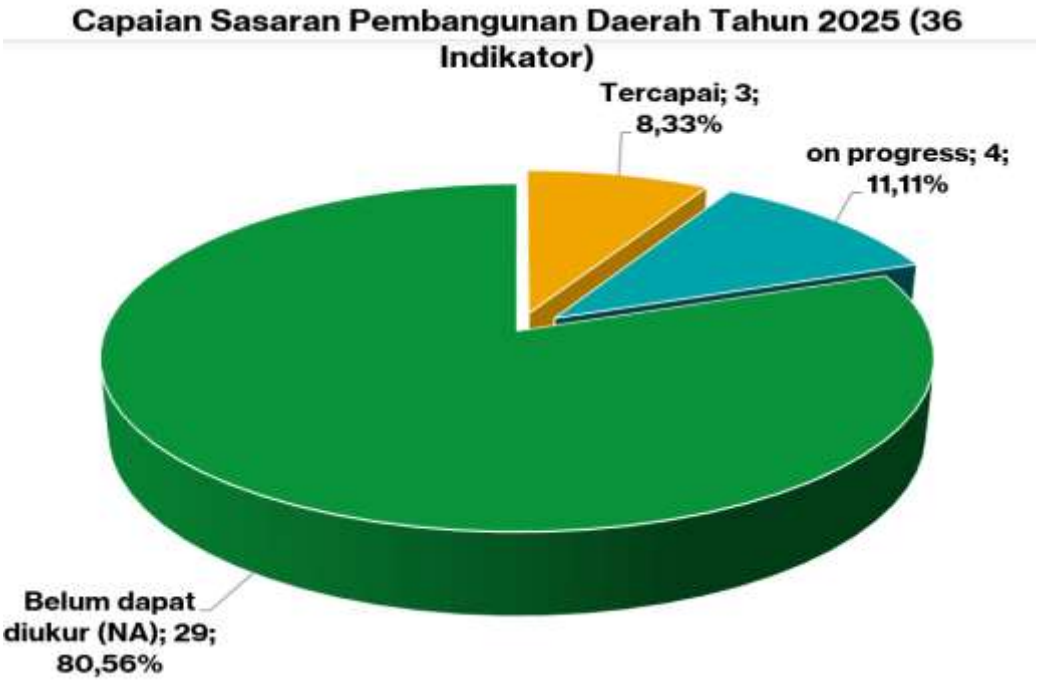

Progres Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel: Progres capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan II

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024			2025			
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	RKPD	Capaian Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
I	**TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**		Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	50-53	49,18	98,36	53-55	53-55	54,19	100,00
			Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,5	4,19	64,46	8,00	7,60	66,19	870,92
	1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5.8-7.1	5,30	91,38	6-7.5	6,00 – 6,50	-0,82	-13,67
			Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5.2-6.5	3,87	74,42	5.5-6.9	5,5-6,9	6,08	100,00
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,98	2,73	108,39	2,85	2,19 - 2,79	3,22	86,65
II	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)**		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	73,10-73,96	73,10	100,00	73,86-74,77	73,86-74,77	NA	NA
	2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,39	7,87	83,81	9,55	8,65 - 8,66	NA	NA
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16	13,98	87,38	17,00	14,24 - 14,25	NA	NA
			Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	72,35-72,68	72,25	99,86	72,68-73,01	72,92	NA	NA
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	257-189	251	100,00	257-189	169	36 Kasus	NA
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24.64-16.85	24,64	100,00	24.64-16.85	24,64-16,85	359 Kasus	NA
	3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	68,5	60,42	88,20	69-70	69-70	NA	NA
			Persentase kota kreatif	%	30	30,00	100,00	40,00	40	NA	NA
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	54-60	57,37	100,00	54-60	54-60	NA	NA

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024			2025			
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	RKPD	Capaian Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
			Persentase penanganan konflik SARA	%	100	100,00	100,00	100,00	100	NA	NA
III	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI**		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	75,34	73,18	97,13	77,50	76,19	NA	NA
	4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan mengahdapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,7	24,47	124,21	19,76	19,76	NA	NA
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	113,08	113,63	100,49	110,08	119,83	NA	NA
			Bauran energi baru terbarukan	%	20,99	23,25	110,77	23,00	23,5	NA	NA
	5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	65,56	66,49	101,42	65,53	65,53	NA	NA
			Indeks Kualitas Air	point	45,71	47	102,82	46,80	46,8	NA	NA
			Indeks Kualitas Udara	point	75-89	93,13	106,29	50-75	87,65	NA	NA
IV	**TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI**		Angka kemiskinan	%	<10	11,91	80,90	9,57	12,7-13,1	11,78	107,24
			Prevalensi Stunting	%	14	12,17	113,07	12,00	12	13,38	88,50
			Gini rasio	angka	0,366	0,364	100,55	0,36	0,369 – 0,373	0,369	100,00
	6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	68,73	60,50	88,03	71,19	71,19	NA	NA
			Indeks Ketahanan Pangan	point	77,67	78,44	100,99	78,67	78,67	NA	NA
			Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	NA	NA	Baik	Baik	NA	NA
			Indeks Demokrasi	point	77,47	NA	NA	78,11	78,11	NA	NA
	7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	2-4	1,28	156,25	2-4	2-4	2,51	100,00
			Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	95	99,60	104,84	97,00	97	98,35	101,39
			Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	43	40,59	94,40	54,00	54	NA	NA
			Peningkatan Pendapatan per kapita	%	8	4,61	57,63	9,00	9	NA	NA
			Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	65,77	100,00	65-67	65-67	NA	NA

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024			2025			
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	RKPD	Capaian Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
V	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH**		Indeks Reformasi Birokrasi	point	BB	BB	100,00	BB	BB	NA	NA
	8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	A	BB	91,19	A	A	B	86,56
	9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	1,504-1,838	1,241	82,51	1,504-1,838	1,504-1,838	NA	NA
VI	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)**		Persentase Capaian Indikator SDGs	%	63	56,99	90,46	67,00	67	NA	NA
	10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	65	57,62	88,65	70,00	70	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	60	63,38	105,63	65,00	65	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	67	49,20	73,43	69,00	69	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	60	57,77	96,28	65,00	65	NA	NA
VII	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH**		Indeks Daya Saing Daerah	point	3,35	3,68	109,70	3,38	3,4	NA	NA
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	77	75,83	98,48	80,00	80	NA	NA
	12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	94	82	87,23	95,00	95	90	94,74
	13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	78	63,40	81,28	79,00	76,5	NA	NA

Ket. NA = Not Available (Belum tersedia datanya)

3.3. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berdasarkan RPD Provinsi NTB 2024-2026, Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2024-2026, terdapat 241 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu:

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 8 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan tambang dan tanpa tambang, TPT, Inflasi, Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC), Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peningkatan Pendapatan per kapita, dan Tingkat Literasi Keuangan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5,8-7,1	5,30	91,38	6,00 – 6,50	-0,82	-13,67
2	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5,2-6,5	3,87	74,42	5,5-6,9	6,08	100,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,98	2,73	108,39	2,19 - 2,79	3,22	86,65
4	Tingkat inflasi	%	2-4	1,28	156,25	2-4	3,05	100,00
5	Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	95	99,60	104,84	97	98,35	101,39
6	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	43	40,59	94,40	54	NA	NA
7	Peningkatan Pendapatan per kapita	%	8	4,61	57,63	9	NA	NA
8	Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	65,77	100,00	65-67	NA	NA

Dari 8 indikator kinerja, pada tahun 2024 terdapat 4 indikator yang sesuai bahkan melampaui target yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat inflasi, Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC), dan Tingkat Literasi Keuangan, sedangkan yang belum memenuhi target yaitu Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang, Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Peningkatan Pendapatan per kapita. Adapun triwulan II Tahun 2025, baru 5 indikator yang sudah dapat diukur capaian, terdapat 3 indikator yang memenuhi target yaitu Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat inflasi, dan Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC), sedangkan indikator lainnya on progress terhadap target

yang ditetapkan yaitu Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

b. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 10 indikator kinerja meliputi indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Nilai SAKIP, Indeks Kapasitas Fiskal, Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial, Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi, Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan, Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rasio konektivitas, dan Indeks Inovasi Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,7	24,47	124,21	19,76	NA	NA
2	Nilai SAKIP	kategori	A	BB	91,19	A	B	86,56
3	Indeks Kapasitas Fiskal	poin	1,504-1,838	1,241	82,51	1,504-1,838	NA	NA
4	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	65	57,6	88,65	70	NA	NA
5	Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	60	63,4	105,63	65	NA	NA
6	Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	67	49,2	73,43	69	NA	NA
7	Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	60	57,8	96,28	65	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	poin	77	75,83	98,48	80	NA	NA
9	Rasio konektivitas	%	94	82	87,23	95	90	94,74
10	Indeks Inovasi Daerah	poin	78	63,4	81,28	76,5	NA	NA

Dari 10 indikator kinerja pada aspek daya saing daerah pada tahun 2024 terdapat 2 indikator yang memenuhi target yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi, sedangkan yang belum memenuhi target yaitu Nilai SAKIP, Indeks Kapasitas Fiskal, Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial, Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan, Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rasio konektivitas, dan Indeks Inovasi Daerah. Adapun triwulan II 2025 baru indikator yang dapat diukur capaiannya Nilai SAKIP dan Rasio konektivitas dengan tingat capaian on progress sesuai target, sedangkan 8 indikator belum ada rilisnya.

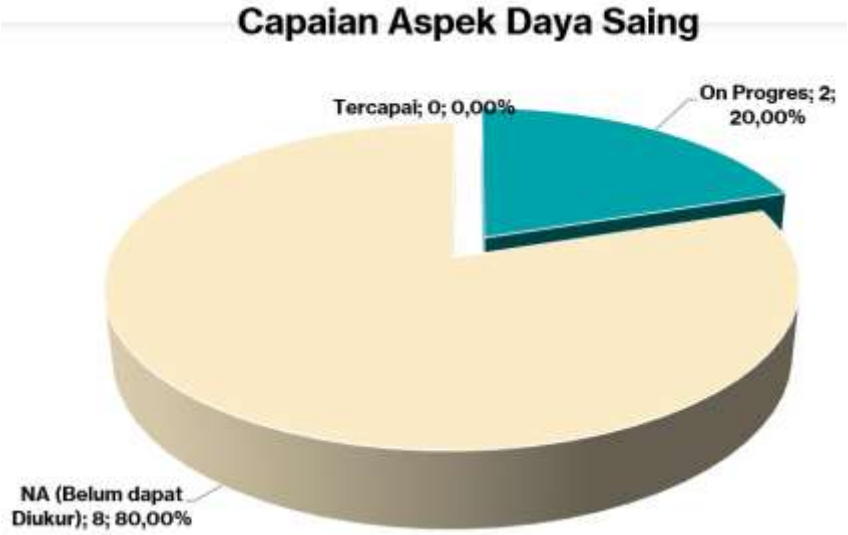

c. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 223 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 52 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 59 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 68 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 44 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Dari 223 indikator kinerja pada aspek pelayanan umum, sampai triwulan II 2025, sebagian besar belum dapat diukur capaiannya, dan dari 76 indiaktor yang sudah dapat diukur capaiannya, terdapat 40 indikator yang telah memenuhi target, sedangkan 36 indikator on progres. Adapun capaian aspek pelayanan umum sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel: Capaian Aspek Pelayanan Umum Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
C	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**							
1,01	**Pendidikan**							
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,39	7,87	83,81	8,65 - 8,66	NA	NA
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16	13,98	87,38	14,24 - 14,25	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100	89,29	89,29	100	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100	84,62	84,62	100	NA	NA
5	Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan menengah/sederajat	%	36,03	35,76	99,25	36,28	NA	NA
6	Persentase siswa/pelajar yang mengikuti pendidikan karakter	%	100	100	100,00	100	NA	NA
7	Persentase siswa yang memiliki sertifikasi kemampuan dan keterampilan bahasa inggris (TOEFL/IELTS)	%	16-20	3,33	20,81	21-25	NA	NA
8	Persentase sekolah yang melakukan pemilahan sampah sekolah	%	25% (2722 sekolah)	100	400	30% (3267 sekolah)	NA	NA
9	Persentase lulusan SMK yang mendapatkan sertifikasi LSP P1	%	100	25,23	25,23	100	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Retribusi dan LLPAD)	%	7-10	-12,09	-172,65	10-15	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
1,02	**Kesehatan**							
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	72,35-72,68	72,25	99,86	72,92	NA	NA
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100,000 KH	257-189	251	100,00	169	36 Kasus	NA
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24,64-16,85	24,64	100,00	24,64-16,85	359 Kasus	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	%	100	100	100,00	100	100	100,00
5	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi	%	100	100	100,00	100	100	100,00
6	Persentase keluarga sehat pada setiap posyandu keluarga	%	71-75	23,8	33,52	25	NA	NA
7	Persentase Balita Stunting (e-PPBGM)	%	14	12,19	112,93	12	13,38	88,50
8	Persentase sanitasi layak	%	87,05	85,45	98,16	89,03	88,27	99,15
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi)	%	7-10	300,81	3008,14	10-15	436,02	2906,80
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (LLPAD)	%	7-10	-23,28	-332,59	10-15	NA	NA
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD)	%	7-10	-16,61	-237,23	10-15	74,78	498,53
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit	%	7-10	12,64	126,37	10-15	16,74	167,40

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Umum Provinsi (LLPAD)							
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD)	%	7-10	2,16	30,90	10-15	20,1	134,00
14	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD)	%	7-10	27,78	277,82	10-15	21,78	145,20
1,03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1	Persentase sanitasi aman	%	11,27	6,84	60,69	14,14	NA	NA
2	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota	%	100	84,41	84,41	100	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota	%	100	85,11	85,11	100	NA	NA
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	84,10	76,38	90,82	86,84	NA	NA
5	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis	%	25	35,8	143,2	25%	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi	%	2,6-3,1	2,93	100,00	2,6-3,2	5,57	174,06
7	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	57,76	62,93	108,95	58,62	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
8	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	7-10	-57,73	-824,65	10-15	19,35	129,00
1,04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**							
1	Persentase pembangunan Rumah layak huni (RLH)	%	66,3	67,74	102,17	68,3	NA	NA
2	Persentase pemenuhan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi	%	100	100	100,00	100	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Fasilitasi Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100	100,00	100	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate	%	1,7-2,1	4,02	191,43	1,7-2,1	3,53	168,10
1,05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**							
	SATPOL PP							
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100,00	100	100	100,00
2	Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah	%	100	100	100,00	100	100	100,00
3	Persentase pemenuhan SPM ketentraman dan	%	100	100	100,00	100	85,71	22,67

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	ketertiban umum Provinsi							
	BPBD							
4	Persentase pemenuhan SPM Bencana Daerah	%	100	93,019	93,02	100	NA	NA
5	Indeks Kapasitas Daerah	poin	0,8	0,56	70,00	0,84	NA	NA
				0,56			NA	NA
6	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	33 (242 destana)	181	74,79	33 (242 destana)	NA	NA
7	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	113,08	113,64	99,50	119,83	NA	NA
1,06	**Sosial**							
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	NA	NA	Baik	NA	NA
2	Jumlah Kemiskinan ekstrem	%	0	1,81	35,45	0	NA	NA
3	Persentase pelayanan kepada kelompok rentan/disabilitas	%	15	100	666,67	20	18	90,00
4	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	100	100,00
5	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	100	100,00
6	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	100	100,00
7	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	100	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
8	Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	%	100	100	100,00	100	100	100,00
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Sosial (Retribusi)	%	7-10	NA	NA	10-15	NA	NA
2,01	**Tenaga Kerja**							
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	poin	68,73	60,5	88,03	71,19	NA	NA
2	Persentase peningkatan upah kerja (UMP)	%	5	6,5	130,00	5	NA	NA
3	Persentase peningkatan remittance	%	17	-44,3	-260,59	20	-2,22	-11,10
4	Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair	%	30	31,34	104,47	40	NA	NA
5	Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian	%	20,00	20,03	100,15	22,50	12,39	55,07
6	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Retribusi)	%	7-10	-10,37	-148,10	10-15	161,93	1079,53
2,02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1	Indeks pembangunan gender	poin	90,65	NA	NA	90,68	NA	NA
2	Indeks pemberdayaan gender	poin	54,39	NA	NA	54,81	NA	NA
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	tahun	20,53	20,35	99,12	20,56	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	33,15	NA	NA	35,07	NA	NA
5	Cakupan Kab/kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya	%	60	90	150,00	80	NA	NA
2,03	**Pangan**							
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	77,67	78,44	100,99	78,67	NA	NA
2	Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	74,4	75,68	101,71	74,32	75,86	102,07
3	Persentase konsumsi komoditi bukan makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	25,6	24,32	95,02	25,68	24,14	94,00
4	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	96,8	93,27	96,35	97,9	NA	NA
2,04	**Lingkungan Hidup**							
1	Indeks Kualitas Air	poin	45,71	47	102,82	46,8	NA	NA
2	Indeks Kualitas Udara	poin	87,62	93,13	106,29	87,65	NA	NA
3	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	%	30	100	333,33	30	NA	NA
4	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi	%	30	100	333,33	30	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem							
5	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	%	90	74,15	82,39	92	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5,3-6,3	0,77	14,53	5,3-6,4	3,25	61,32
7	Pemilahan sampah rumah tangga	%	31-50	41,08	100	51-70	NA	NA
8	Pemilahan sampah perkantoran	%	70	42,55	NA	80	NA	NA
9	Pemilahan sampah area publik	%	31-60	100	NA	61-80	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	%	7-10	-26,21	-374,42	10-15	-72,26	-722,59
2,05	**Pertanahan**							
1	Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA)	%	100	100	100,00	100	100	100
2	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100,00	100	100	100
2,06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
1	Persentase perekaman KTP	%	100	99,61	99,61	100	99,13	99,13
2	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	%	100	99	99,00	100	99,32	99,32
2,07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**							
1	Persentase desa mandiri dan maju	%	65	80,02	123,11	67	80,02	119,43

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
2,08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
1	Pertumbuhan penduduk (%)	%	1,46	1,58	91,78	1,29	NA	NA
2	mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate) : PUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern	%	75,0	61,7	82,27	80,0	NA	NA
2,09	**Perhubungan**							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Transportasi dan Pergudangan	%	8,2-9,8	4,21	51,34	8,2-10	4,03	49,15
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Darat	%	8,1-9,7	4,73	58,40	8,1-9,9	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Laut	%	7,6-9,1	-0,12	-1,58	7,6-9,3	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	%	7,0-8,4	5,21	74,43	7,0-8,6	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Udara	%	10-12	3,41	34,10	10-12,3	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	%	8,2-9,8	1,30	15,85	8,2-10	NA	NA
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dishub (Retribusi dan LLPAD)		7 - 10	253,48	2534,83	10-15	NA	NA
2,1	**Komunikasi dan Informatika**							

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Tingkat literasi digital	%	61	NA	NA	100	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi	%	7,6-9,1	4,34	57,11	7,6-9,3	4,22	55,53
3	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	kategori	Kolaborasi	Kolaborasi	100,00	Kolaborasi	NA	NA
4	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	75	75,56	100,75	80	NA	NA
2,11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
1	Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan	%	4-5	4,45	100,00	5-7	NA	NA
2	Pertumbuhan produktivitas Subsektor KUKM	%	4,8	NA	NA	4,9	NA	NA
3	Koperasi Modern	%	40	40	100,00	50	NA	NA
4	Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UMKM (Retribusi)	%	7-10	123,03	1230,30	10-15	3,57	35,7
2,12	**Penanaman Modal**							
1	Persentase Realisasi investasi pada kawasan strategis	%	25,4 T(11%)	54,5 T	214,57	29,5 T(16%)	NA	NA
2,13	**Kepemudaan dan Olah Raga**							
1	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional	%	7	52,9	756,14	10	NA	NA
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	100,00	15	2	NA
3	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dispora (Retribusi)	%	7-10	6,28	89,65	10-15	-8,11	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
2,14	**Statistik**							
1	Persentase penyediaan data statistik sektoral provinsi dan kabupaten/kota	%	27	91,32	338,22	100	18,57	18,57
2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	65	100	153,85	100	30,61	30,61
2,15	**Persandian**							
1	Persentase aplikasi SPBE yang aman	%	20	3,68	15,40	4,62	4,62	100,10
2	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	level	III+	II+	87,40	III+	NA	NA
2,16	**Kebudayaan**							
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	54-60	57,37	100	54-60	NA	NA
2,17	**Perpustakaan**							
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	68,5	60,42	88,20	69-70	NA	NA
2	Persentase jangkauan layanan perpustakaan mobile ke desa	%	20	5	25,00	25	NA	NA
2,18	**Kearsipan**							
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	100	100	100,00	100	NA	NA
3,01	**Kelautan dan Perikanan**							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perikanan	%	2,7-3,3	4,38	100,00	2,7-3,4	NA	NA
2	Produksi Perikanan	ton	1.532.501	1.237.891,29	80,78	1.565.751	612.589,66	39,12
3	Nilai Tukar Nelayan	poin	112	105,59	94,28	113	106,33	94,10
4	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	%	5,07	4,30	84,81	5,12	4,30	83,98
5	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Retribusi)	%	7-10	-39,07	-558,13	10-15	-0,59	-5,88

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
3,02	**Pariwisata**							
1	Persentase kota kreatif	%	30	30	100,00	40	NA	NA
2	Persentase SDM kepariwisataan dengan sertifikasi kompetensi dan bahasa asing	%	343 (25%)	20	80,00	343 (25%)	NA	NA
3	Persentase pengembangan geosite geopark sebagai lokasi pengembangan green economy dan destinasi eco tourism	%	44 (60%)	30	50,00	58 (80%)	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	20,7-32,6	8,37	41,70	27,3-33,7	8,08	29,60
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Akomodasi	%	26-40,7	9,98	38,38	34-41,5	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Makan Minum	%	15,6-24,5	6,93	44,42	20,4-25	NA	NA
7	Pemilahan sampah perhotelan/destinasi pariwisata	%	16-30	100	333,33	31-60	NA	NA
8	Pemilahan sampah rumah makan dan restoran	%	31-60	100	166,67	61-80	NA	NA
9	Persentase Desa Wisata yang berprestasi nasional dan internasional	%	100	50	50,00	100	5,55	NA
10	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,45	1,72	49,86	3,5	1,79	50,57
11	Angka kunjungan wisatawan	orang	1.690.297	2.234.592	132,20	2.294.089	582.358	25,39
12	Angka Kunjungan Wisata Nusantara	%	15	1.441.247,00	9608313,33	20	NA	NA
13	Angka Kunjungan Wisata Mancanegara	%	100	883.345,00	883345,00	125	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
14	Persentase peningkatan nilai investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	%	10	-14,01	-140,10	15	NA	NA
15	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pariwisata (Retribusi)	%	7-10	-34,34	-490,64	10-15	NA	NA
3,03	**Pertanian**							
	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan							
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha pertanian	%	939.928 (10%)	8,98	89,80	1.033.920 (10%)	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,7-4,5	1,54	41,62	3,7-4,6	3,71	100,00
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	4,0-4,7	0,87	21,75	4,0-4,8	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Pangan	%	4,5-5,4	-0,11	-2,44	4,5-5,5	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Hortikultura	%	2,7-3,3	-0,12	-4,44	2,7-3,3	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perkebunan	%	1,8	3,88	215,56	1,8	NA	NA
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Pertanian dan Perburuan	%	4,0-4,7	0,20	5,00	4,0-4,8	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan							
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Peternakan	%	4,2-5,0	2,97	59,40	4,2-5,1	NA	NA
9	Nilai Tukar Petani	poin	>105	123,31	117,44	>105	124,13	118,22
10	Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	16,52	17,29	104,66	16,65	NA	NA
11	Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	3,75	3,78	100,80	3,80	NA	NA
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD)	%	7-10	-23,95	-342,13	10-15	117,31	782,07
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Retribusi)	%	7-10	17,92	179,16	10-15	NA	NA
3,04	**Kehutanan**							
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	65,56	66,49	101,42	65,53	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	3,5-4,2	1,11	31,71	3,5-4,2	NA	NA
3	Persentase penanganan lahan kritis	%	3-4	10,13	253,25	4-5	NA	NA
4	Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	%	16-20	NA	NA	21-25	NA	NA
5	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	%	100	100	100,00	100	100	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
6	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkar hutan	%	30 % dari 200 desa miskin	38,93	129,77	30 % dari 200 desa miskin	38,93	129,77
3,05	**Energi dan Sumberdaya Mineral**							
1	Bauran energi baru terbarukan	%	20,99	23,25	110,77	23,5	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian	%	7,8-9,4	11,66	124,04	7,9-9,6	-29,93	-378,86
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	%	2,5-3,0	1,80	60,00	2,5-3,1	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	6,7-8,0	9,08	113,50	6,7-8,1	0,05	0,75
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Ketenagalistrikan	%	6,7-8,0	9,09	113,63	6,7-8,1	NA	NA
3,06	**Perdagangan**							
1	Persentase peningkatan ekspor	%	91-95	44,86	49,30	96-100	-92,14	-95,98
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,7-8,4	5,87	87,61	7,0-8,6	2,91	41,57
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	%	5,7-6,9	8,14	117,97	5,7-7,0	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan	%	6,9-8,7	5,47	79,28	7,2-8,9	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Mobil dan Sepeda Motor							
5	Pemilahan sampah pasar	%	31-60	NA	NA	61-80	NA	NA
6	Pengeluaran Per Kapita	Rp, Ribu	11364	11.606	102,13	11.651	NA	NA
3,07	**Perindustrian**							
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha industri	%	10	-1,4	-14,00	15	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan	%	3,9-4,7	4,19	107,44	3,9-4,8	66,19	1.378,96
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Makanan dan Minuman	%	2,7-3,3	5,04	152,73	2,7-3,3	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pengolahan Tembakau	%	5,3-6,4	3,92	73,96	5,3-6,5	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	%	4,8-5,7	3,33	69,38	4,8-5,8	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	%	7,6-9,2	2,12	27,89	7,6-9,3	NA	NA
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	%	3,4-4,4	4,59	104,32	3,6-4,5	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	%	3,7-4,5	2,08	56,22	3,7-4,6	NA	NA
9	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	%	3,3-3,9	3,21	82,31	3,3-4,0	NA	NA
10	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang Galian bukan Logam	%	2,4-2,9	1,72	59,31	2,4-3,0	NA	NA
11	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Logam Dasar	%	4,4-5,3	2,65	60,23	4,5-5,5	NA	NA
12	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	%	4,0-5,1	1,79	44,75	4,3-5,2	NA	NA
13	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Alat Angkutan	%	4,4-5,4	1,17	26,59	4,5-5,5	NA	NA
14	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Furnitur	%	7,0-8,4	5,11	73,00	7,0-8,6	NA	NA
15	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	%	3,9-4,7	4,40	100,00	3,9-4,8	NA	NA
16	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	%	7-10	10,96	109,57	10-15	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	* Angka Sementara							
3,08	**Transmigrasi**							
1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	%	25	25,00	100,00	27	26	96,30
2	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri	%	49,53	24,44	49,34	50,47	NA	NA
4,01	**Administrasi Pemerintahan**							
	Sekretariat Daerah							
	Sekretariat DPRD							
1	Capaian prestasi daerah	angka	27	18	66,67	29	NA	NA
2	Persentase rumah ibadah yang telah dibantu/difasilitasi	%	4341 (25%)	78,86	315,44	5106 (25%)	NA	NA
3	Persentase pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi	%	498 (25%)	89,75	359,00	614 (25%)	NA	NA
4	Persentase program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi	%	95-100	96	100,00	95-100	NA	NA
5	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,8	4,42	116,32	3,85	NA	NA
6	Persentase perjanjian kerjasama regional dan internasional yang telah diselesaikan dari MoU yang telah disepakati	%	20 (25%)	25	100,00	15 kerjasama	6	40,00
7	Pemilahan sampah madrasah/pondok pesantren	%	30% (799 Ponpes)	100	333,33	30% (799 Ponpes)	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
8	Jumlah Lapangan usaha yang berkembang dari prospektif menjadi unggul	lapangan usaha	17	NA	NA	18	NA	NA
9	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari andal menjadi prospektif	lapangan usaha	17	NA	NA	19	NA	NA
10	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari tertinggal menjadi andal	lapangan usaha	15	NA	NA	14	NA	NA
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi)	%	7-10	174,45	1744,55	10-15	NA	NA
12	Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	7-10	17,18	171,80	10-15	NA	NA
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
5,01	**Perencanaan**							
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	kategori	Baik	Sangat Baik	102,78	Sangat Baik	NA	0
2	Perkembangan jumlah mitra pembangunan	angka	153	153	100	163	183	112,27
5,02	**Keuangan**							
	BPKAD							
	BAPPENDA							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	%	5,7-6,8	5,72	100,00	5,7-6,9	1,37	24,04
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Perantara Keuangan	%	5,4-6,5	6,38	100,00	5,4-6,7	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Asuransi dan Dana Pensiun	%	6,3-7,6	2,21	35,08	6,3-7,7	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Keuangan Lainnya	%	6,6-7,9	3,76	47,59	6,6-8,0	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Penunjang Keuangan	%	5,8-7,0	4,10	100,00	5,8-7,2	NA	NA
6	Persentase pertumbuhan PAD	%	2,95	18,07	612,54	4,92	NA	NA
7	Peningkatan Pendapatan transfer	%	-4,5	11,88	264,00	0,11	NA	NA
8	Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah	%	-100	0	0,00	0	NA	NA
9	Kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan	%	20	23,85	119,25	20	30,64	153,2
10	Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan	%	10	23,21	232,10	10	22,30	223
11	Kepatuhan ketentuan alokasi infrastruktur	%	25% dari penerimaan dana transfer	21,7	86,80	40	32,66	81,65
12	Kepatuhan ketentuan alokasi pengawasan	%	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	0,29	48,33	0,6	0,10	16,67
13	Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan	%	1% dari APBD	3,56	356,00	1,00	3,16	316
14	Persentase peningkatan retribusi dan LLPAD pada BPKAD	%	7-10	-25,13	-359,00	10-15	64,2	428
5,03	**Kepegawaian**							
1	Indeks Profesionalisme ASN	poin	0,73	0,7843	107,44	0,74	0,8117	109,69
2	Dimensi Kualifikasi	%	14	21,2	151,43	13,6	21,25	156,25
3	Dimensi Kinerja	%	25	24,85	99,40	24,4	25,28	103,61
4	Dimensi Disiplin	%	5	5	100,00	5	5	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
5,04	**Pendidikan dan Pelatihan**							
1	Dimensi kompetensi	%	29	26,99	93,07	30	29	96,67
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada BPSDM (Retribusi dan LLPAD)	%	7-10	2,99	42,76	10-15	NA	NA
5,05	**Penelitian dan Pengembangan**							
1	Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB	%	15	-57%	-3,80	15%	NA	NA
2	Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri	unit	25-50	85	170,00	50-75	NA	NA
5,06	**Penghubung**							
1	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	%	91-95	95,23	100,24	96-97	96,19	100
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	%	7-10	6,56	93,71	10-15	-0,68	-0.09
6,01	**Pengawasan**							
1	Penurunan temuan	%	<5	6,59	100,00	<5	NA	NA
2	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
7,01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							
1	Persentase penanganan konflik SARA	%	100	100	100,00	100	NA	NA
2	Indeks Demokrasi	poin	77,47	NA	NA	78,11	NA	NA
3	Persentase kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan karakter bangsa	%	25	1,96	7,84	25%	0,00 (211 orang)	0,00
4	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	5,11	5,1	NA	5,33	NA	NA

Dari 223 indikator aspek pelayanan umum, 109 indikator atau 48,88% sesuai bahkan melampui target tahun 2024, sebanyak 15,27% atau 35 indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% sampai 80%, sedangkan dengan tingkat capaian dibawah 80% mencapi 64 indikator atau 28,70%. Disamping itu, masih terdapat 15 indikator masih belum tersedia data capaianya sampai laporan ini disusun.

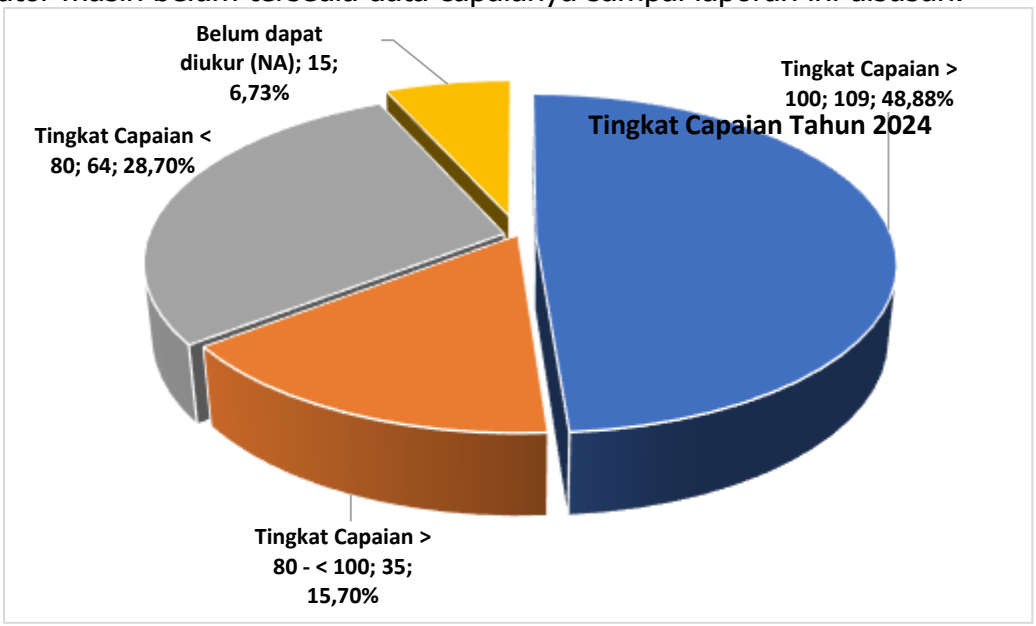

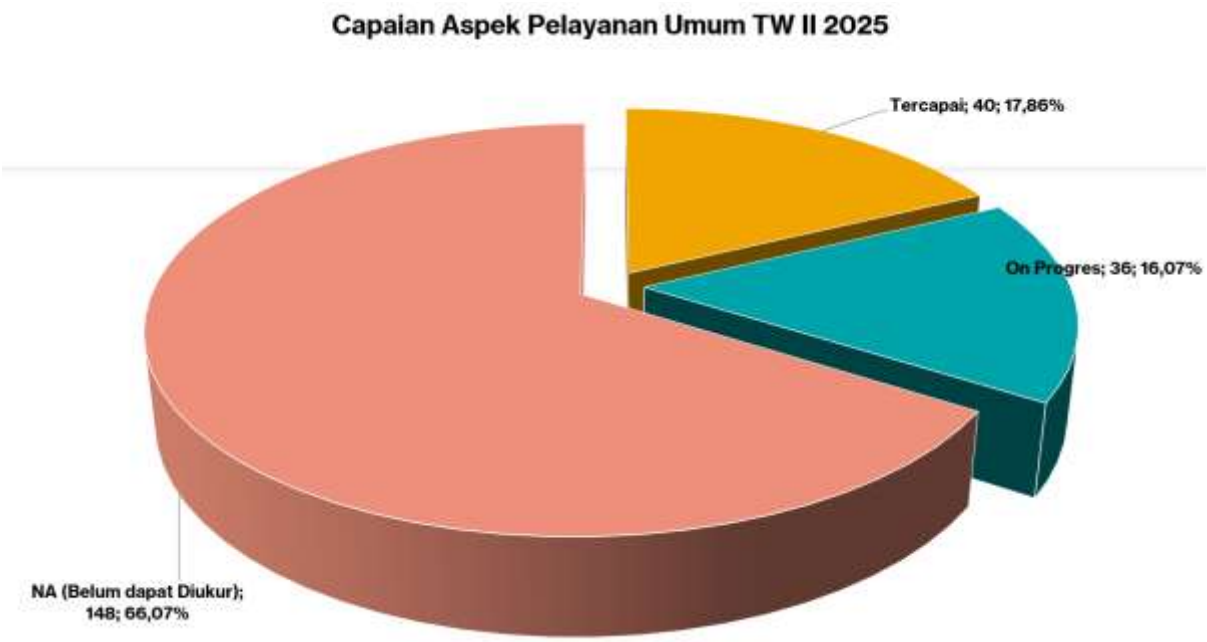

Adapun indikator yang sesuai bahkan melampui target tahun 2024 yaitu Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi), Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dishub (Retribusi dan LLPAD), Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi), Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UMKM (Retribusi), Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional, Persentase pelayanan kepada kelompok rentan/disabilitas, Persentase pertumbuhan PAD, Persentase sekolah yang melakukan pemilahan sampah

sekolah, Persentase pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi, Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan, Persentase penyediaan data statistik sektoral provinsi dan kabupaten/kota, Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon, Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem, Pemilahan sampah perhotelan/destinasi pariwisata, Pemilahan sampah madrasah/pondok pesantren, Persentase rumah ibadah yang telah dibantu/difasilitasi, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD), Peningkatan Pendapatan transfer, Persentase penanganan lahan kritis, Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perkebunan, Persentase Realisasi investasi pada kawasan strategis, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Retribusi), Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri, Pemilahan sampah rumah makan dan restoran, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Makanan dan Minuman, Dimensi Kualifikasi, Cakupan Kab/kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya, Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kunjungan wisatawan, Angka Kunjungan Wisata Nusantara, Angka Kunjungan Wisata Mancanegara, Persentase peningkatan upah kerja (UMP), Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkar hutan, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD), Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian, Persentase desa mandiri dan maju, Kepatuhan ketentuan alokasi Pendidikan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya, Nilai Tukar Petani, Indeks Pelayanan Publik, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Ketenagalistrikan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Persentase Balita Stunting (e-PPBGM), Bauran energi baru terbarukan, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi), Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan, Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Kualitas Udara, Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Indeks Kualitas Air, Indeks perencanaan pembangunan daerah, Persentase pembangunan Rumah layak huni (RLH), Pengeluaran Per Kapita, Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Ketahanan Pangan, Dimensi Kinerja, Kontribusi PDRB Sektor Peternakan, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Tingkat kepuasan pelayanan penghubung, Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perikanan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Perantara Keuangan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Penunjang Keuangan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan

peralatan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, Persentase siswa/pelajar yang mengikuti pendidikan karakter, Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan, Persentase program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi, Persentase perjanjian kerjasama regional dan internasional yang telah diselesaikan dari MoU yang telah disepakati, Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah, Persentase penanganan konflik SARA, Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi, Persentase pemenuhan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi, Persentase pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban umum Provinsi, Persentase pemenuhan SPM Fasilitasi Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi, Persentase kota kreatif, Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan, Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Perkembangan jumlah mitra pembangunan, Penurunan temuan, Opini BPK, Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah, Koperasi Modern, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Kesejahteraan Sosial, Indeks Kematangan Keamanan Informasi, Dimensi Disiplin, dan Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi.

Adapun indikator yang telah memenuhi target pada triwulan II Tahun 2025 yaitu Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah, Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi, Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA), Opini BPK, Dimensi Disiplin, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Persentase aplikasi SPBE yang aman, Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin, Dimensi Kinerja, Indeks Profesionalisme ASN, Perkembangan jumlah mitra pembangunan, Nilai

Tukar Petani, Persentase desa mandiri dan maju, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi), Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkar hutan, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD), Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD), Kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan, Dimensi Kualifikasi, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD), Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi, Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan, Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan, Persentase peningkatan retribusi dan LLPAD pada BPKAD, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD), Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD), Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Retribusi), Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi), dan Tingkat kepuasan pelayanan penghubung.

3.4. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Program prioritas pada tahun 2025 dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Program-program tersebut mengacu pada program perangkat daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam setiap prioritas pembangunan daerah. Dari 10 prioritas pembangunan daerah, terdapat 89 program prioritas dengan alokasi pendanaan mencapai Rp. 5.720.091.270.775 atau 73,41% dari total pagu RKPD sebesar Rp. 7.792.130.872.770. berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh rata-rata capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas mencapai 26,22% dengan tingkat realisasi keuangan mencapai 26,97% dari total pagu RKPD 2025. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja program baru mencapai 1,17 persen dengan realisasi keuangan mencapai 5,86%. Adapun capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas berdasarkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana dalam lampiran dokumen ini.

3.5. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan program-program sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025. Dan Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, jumlah program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mencapai 216 program yang terdiri atas 1 program penunjang urusan, 153 program prioritas pembangunan daerah, dan 63 program penyelenggaraan urusan. Sedangkan jumlah kegiatan mencapai 710 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 3.056 sub kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar

Rp.7.792.130.872.770,-, sedangkan yang teralokasi dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp.6.218.298.929.286,-. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTB

Adapun realisasi dan capaian kinerja pada masing-masing perangkat daerah dapat disajikan sebagai berikut: pelaksanaan program prioritas bersasarkan prioritas daerah tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTB SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.) Per 31 Juni 2025	% REALISASI THD PAGU RENJA				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.963.038.041.878	1.825.342.649.981	676.801.571.599	34,48	NA	semakin meningkatnya angka melanjutkan sekolah yang ditandai dengan semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah dan menurunnya angka drop out	1. Masalah Bea Siswa (ongkos jahit) tidak ada di DPA Murni dan berbeda rekening/salah kode rekening, 2. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan di perencanaan tapi ada di pagu APBD nya ada, dan ada dianggarkan di perencanaan tapi di pengalokasian APBD tidak dianggarkan 3. Kegiatan fisik DAK masih proses penyelesaian kontrak akibat keterlambatan Juknis DAK yg baru ditetapkan pada bulan Juni 2025	1. disesuaikan semuanya di perubahan; 2. Disempurnakan kegiatan yang belum ada target, satuan dan indicator
2	Dinas Kesehatan	204.365.425.033	177.248.723.839	47.353.972.031	23,17	48,45		1. Penginputan laporan belum maksimal karena kendala aplikasi mengalami gangguan, 2. terkendala efisiensi anggaran yang menyebabkan tertundanya kegiatan	1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pusat dan Kabupaten/Kota, 2. kegiatan akan dilaksanakan sekitar bulan agustus sesuai angkas pergeseran
3	RSUP NTB	782.948.895.381	811.028.855.559	324.984.927.104	41,51	45,53	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan	1. Ada kegiatan yang dipending karena DBHCHT, (40 alokasi, 40M); 2. Pengadaan obat masih kosong , diperubahan disesuaikan target indikatornya;	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
4	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	209.977.090.000	211.487.698.880	71.532.608.906	34,07	95,05	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan		Diperubahan disesuaikan semua target indikatornya
5	RSJ Mutiara Sukma	86.810.000.000	87.586.068.413	25.670.490.741	29,57	44,76	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan		Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
6	RS Mata	40.759.467.873	41.338.494.376	16.374.785.158	40,17	78,70	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan		Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
7	RSUD Mandalika	76.820.874.998	57.975.143.943	10.145.066.136	13,21	100	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan		Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.247.596.509.357	386.350.194.027	62.044.807.340	4,97	37,88		1. Kesulitan di aplikasi PL (penunjukan Langsung) 2. terkait Penunjukan Langsung (PL) itu belum menerima by name by addres.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.) Per 31 Juni 2025	% REALISASI THD PAGU RENJA				
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	356.656.332.825	248.397.945.337	6.519.226.728	1,83	NA		1. adanya efisiensi anggaran. 2. Kegiatan bersumber dari Pokir belum dapat dilaksanakan karena belum dilengkapi dengan RC	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.604.828.626	12.155.242.689	4.925.248.453	17,22	NA		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
11	Satuan Polisi Pamong Praja	29.859.207.138	22.535.071.603	9.469.598.626	31,71	74,22		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
12	Dinas Sosial	92.024.784.175	62.424.568.826	21.952.294.498	23,85	65,56		Pokir (administrasi seperti proposal belum ada) yang by name by adres.	Dilengkapi untuk pengajuan proposal pokir
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.533.007.870	27.188.253.057	12.322.815.771	31,17	8,79		1. Persentase peningkatan remittance; terjadinya penutupan dan penertiban PMI di negara ke malaysia bulan januari sampai dengan oktober karena adanya kebijakan negara penempatan, 2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan mencapai 4 ribu orang, 3.Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair, belum ada realisasi	1. Penempatan ke timur tengah hanya bisa melalui PK (peraturan kepemerintahan atau penerapan keterampilan) dan ini masih tahap uji coba, 2. Koordinasi dengan BI, tranfer dr Luar negri dan BPS, 3. karena masih di hold
14	Dinas Ketahanan Pangan	13.232.726.000	11.530.477.977	3.807.982.785	28,78	82,71		1. Kesulitan menghitung Persentase Daerah yang Terkategori Rentan Rawan Pangan, karena masih menggunakan indikator yang lama; 2. Angka Ketersediaan Energi perlu perhitungan lagi	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	162.532.262.419	110.970.324.471	41.127.807.539	25,30	0,17		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.912.668.329	15.943.103.430	6.540.975.973	19,87	105,96	Dukungan Kabupaten/Kota untuk mempercepat program perekaman dokumen kependudukan	adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.342.487.881	13.341.444.550	4.305.367.368	30,02	NA		Kegiatan DAK belum dapat dilaksanakan karena terkendala dengan adanya rencana penyesuaian SOTK baru	

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.) Per 31 Juni 2025	% REALISASI THD PAGU RENJA				
18	Dinas Perhubungan	67.420.027.475	22.239.770.967	5.643.728.458	8,37	83,27		1. Adanya efisiensi anggaran. 2. belum ada realese BPS karena sub sektor yang menjadi indikatornya, dikoreksi lagi untuk PAD nya karena targetnya belum ada peningkatan (yang seharusnya diharapkan naik 10% tiap tahunnya);	1. Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan. 2. tunggu relis dari BPS
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	22.606.129.360	18.617.762.468	6.932.934.771	30,67	40		1. Adanya efisiensi anggaran. 2. Anggaran diblokir sampai dengan pergeseran II, dikurangi dengan efisiensi, kegiatan dihotel (ditiadakan)/dikurangi atau dipotong, tapi honor nara sumber masih ada.	1. Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan. 2. honor nara sumber diganti makan minum untuk di sesuaikan di perubahan
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	27.896.700.997	15.891.773.402	5.609.508.758	20,11	NA		start up dan pertumbuhan sektor produktifitas,/KONTIBUSI blm bs dibandingkan, hrs ada kerjasam dgn BPS bgm bentuk krjasama, krn indikator ini sdh msk dlm RPJPD	tunggu realis dari BPS
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.062.839.646	9.037.782.372	3.477.473.270	20,38	67,3		Pengawasan lebih ke pelaku usaha (bimtek), kunjungan ke lapangan kegiatan yang menghasilkan nilai investasi;	Rencana perubahan nomenklatur indicator dan . Target dan indicator disesuaiakan di perubahan
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	95.954.450.999	84.222.155.351	36.481.820.880	38,02	6,67		Even olahraga dan kepemudaan di laksanakan di triwulan ketiga dan keempat	Menunggu jadwal even olah raga dan kepemudaan yang ditetapkan dari pusat
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.731.627.368	14.673.254.397	6.216.339.476	26,19	NA		Pengadaan koleksi buku dan perpustakaan di Kabupaten/kota, terbentur anggaran kapasitas di kabupaten/kota , sudah melakukan bimtek dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk akreditasi tapi banyak sekolah-sekolah yang menolak dengan alasan.	
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	63.890.387.510	36.450.561.920	14.142.384.683	22,14	42,27		1. Adanya efisiensi anggaran. 2. menunggu realis dari BPS	dikoreksi sesuai dgn kesepakatan rakortekbang
25	Dinas Pariwisata	33.031.076.512	19.593.718.181	7.578.477.518	22,94	12,63		Di bidang teknis masih ada pembahasan tentang target indiktor yang digunakan untuk ta. 2025	Untuk Indikator, target dan pendanaan hrs sama yg tertuang di RPJMD, Renstra dan renja
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	226.258.345.578	133.597.610.461	28.718.231.335	12,69	40,54		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	69.790.500.028	34.683.186.871	13.221.948.753	18,95	51,23		1. Untuk Produksi Telur, ayam ras yang dihitung, (untuk kabupaten/kota) akhir tahun baru bisa dihitung dan menunggu data dari bps; 2. masalah alat vcr melalui dak sdh di refocusing, di APBD perubahan dialokasikan kembali (butuh 600 jt utk alat);	dikoreksi sesuai dgn kesepakatan rakortekbang
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21.816.541.144	11.773.597.068	4.920.139.866	22,55	-75,62		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.) Per 31 Juni 2025	% REALISASI THD PAGU RENJA				
29	Dinas Perdagangan	26.308.135.851	15.173.763.937	5.992.743.556	22,78	-9,07		Perlu tambahan anggaran, karena terbatas tidak bisa dilaksanakan (op. pasar murah)	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
30	Dinas Perindustrian	37.554.329.882	14.376.678.809	7.155.417.053	19,05	86,18	adanya peningkatan yang sangat signifikan terkait pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan II 2025	adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
31	Sekretariat Daerah	219.830.532.360	166.999.202.019	58.075.796.496	26,42				
32	Biro Administrasi Pembangunan	1.370.000.000				NA		Sampai dengan triwulan II belum ada capaian;	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
33	Biro Administrasi Pimpinan	9.097.692.475				NA			
34	Biro Hukum	7.461.249.885				50		1. kesulitan menentukan Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas, karena harus ada indikator berbasis elektronik; 2. kesulitan pemetaan perda/pergub Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas, (kurangnya data)	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
35	Biro Kesejahteraan Rakyat	27.081.488.420				NA			
36	Biro Organisasi	1.079.289.140				40,83		1. Pembayaran Publik (honor yang ditahan, yaitu SK), bulan juli untuk diproses semuanya; 2. Fasilitasi Biro Organisasi dengan Perangkat Daerah, buat Roadmap, trus untu Rencana Aksi (hitung capaian triwulannya	1. Disesuaikan target indicator di perubahan, sesuaikan dengan program/kegiatan yang ada di DPA;
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.188.307.800				94,05		1. Dana Dekonsentrasi (GWPP) untuk - SPM, Kerjasama (kabupaten/Kota belum ada); 2. Rekomendasi KDH untuk pelantikan Bupati/Walikota belum ada; 3. Evaluasi Kerjasama (fasilitasi Kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta apa tindak lanjut dari evaluasi tersebut; 4. Kurang pagu anggaran (evaluasi/monitoring ke Kabupaten/Kota)	1. Pelaksanaan GWPP yang urgen masukkan di usulan perubahan; 2. Harus dihitung kegiatan-kegiatan pelantikan; 3. Sesuaikan target indicator di perubahan
38	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6.420.712.500				NA		1. Tahun ini katalog dengan pembayaran CSE bank NTB belum bisa terbayar itu jadi kendala maintenance bank NTB,; 2. Pekerjaan belanja katalog belum bisa, belanja realisasi rendah karena kendala portek, syrup sudah 100%, belanja NTB Mall juga kendala maintenance;	Sesuaikan target indicator di perubahan
39	Biro Perekonomian	3.666.150.000				25			
40	Biro Umum	162.465.642.140				92,25		1. Berkaitan dengan adanya Pencatatan barang/Asset, 2. Berkaitan dengan tim percepatan/transisisi, untuk pengalokasian anggarannya masuk	Sesuaikan target indicator di perubahan

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.) Per 31 Juni 2025	% REALISASI THD PAGU RENJA				
								dimana apakah di biro Umum (slot anggaran dimana);	
41	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	118.868.436.605	140.066.379.011	66.806.909.927	56,20	34,29		1. Fasilitas Sumber Daya Manusia, (kuantitas yang terbatas), untuk fasilitasi; 2. Bamus	Sesuaikan target indicator di perubahan
42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.349.948.219	39.114.742.867	13.541.575.618	29,22	50	1. kualitas perencanaan pembangunan semakin meningkat yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) provinsi NTB dengan kategori sangat baik 2. Dukungan program kemitraan dalam pembangunan di NTB semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya Jumlah mitra pembangunan yang ada di NTB	1. adanya kebijakan efisisensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak adanya penundaan pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang bersumber dari dana DAK 2. Adanya keterlambatan penetapan dokumen perencanaan daerah	1. perlu refocusing kegiatan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang terkena dampak efisinesi dapat dimaksimalkan 2. Perlu percepatan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.027.666.964.243	1.042.462.814.633	366.450.823.184	35,66	40	ada kaitan dengan keputusan kepala daerah mengenai revisi/pergeseran dua;	Yang tidak terpenuhi : - Infrastruktur (ketentuan fiscal dengan regulasi baru dan kebijakan);	Yang sudah melampaui perlu penyesuaian (dengan catatan dengan renstra yang baru 2025-2029
44	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	110.988.403.440	129.817.556.328	56.971.262.173	51,33	69,61			
45	Badan Kepegawaian Daerah	20.252.799.999	17.899.486.235	8.020.150.613	39,60	96,87	Progres peningkatan kinerja Displin ASN dapat dimaksimal sesuai bobot Indeks Prosefionalisme ASN (IPA)	Sistem meritrokrasi 2024 belum rilis	Pada perubahan Renja untuk melakukan penyesuaian antara target dan anggaran yang ada.
46	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.406.377.566	31.560.141.575	9.913.710.348	37,54	99,13	Peningkatan kompentensi ASN dapat dipacu tidak hanya melalui pelatihan formal oleh BPSDM, tetapi dapat dilakukan juga dengan informal dan inisiatif masing-masing ASN	1. Pembagian peran DIPA antara BPSDM dengan BKD, dimana Beasiswa pendidikan berkelanjutan untuk beasiswa ASN, masih belum jelas, karena nomenklatur yang berbeda di Badan Koordinasi Pendidikan Dan Pelatihan (Bakom)	Rencana perubahan nomenklatur indicator dan . Target dan indicator disesuaiakan di perubahan
47	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	25.316.580.133	12.812.949.279	3.608.068.085	14,25	NA		1. pokir belum bisa realisasi, kode masih keliru, 2. tema penelitian sedang dikonsutasikan dengan pendamping, 3. Dukungan anggaran untuk beasiswa semakin berkurang	Sesuaikan target indicator di perubahan
48	Badan Penghubung Daerah	18.972.586.837	18.047.106.603	6.464.904.841	34,07	100,2	adanya peningkatan kualitas pelayanan di Badan Penghubung	pergeseran anggaran pengadaan dipotong, sebesar 50% dan bahwa banyak perjalanan dinas tidak di dukung dengan regulasi	usulan ke Gubernur intul merubah pergub perjalanan dinas dari kata " **dapat menginap di wisma**" menjadi "**wajib menginap di wisma**"

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.) Per 31 Juni 2025	% REALISASI THD PAGU RENJA				
49	Inspektorat	49.970.581.558	31.528.629.372	14.642.562.194	29,30	32,58		1. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan di perencanaan tapi ada di pagu APBD nya ada, dan ada dianggarkan di perencanaan tapi di pengalokasian APBD tidak dianggarkan	Target perlu disesuaikan di perubahan
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12.171.959.677	34.814.044.202	4.817.648.518	39,58	NA			

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025, rata-rata capaian kinerja program baru mencapai 1,17 persen dengan realisasi keuangan mencapai 5,86%. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan rata-cata capaian kinerja baru mencapai 9,87% dengan realisasi keuangan 6,43%. Adapun pada triwulan II, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,96% dengan realiasasi keuangan mencapai 26,97% terhadap pagu RKPD Tahun 2025 atau 33,79% terhadap total APBD. Rendahnya capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2025 disebabkan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah. Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan meningkatkan efisiensi belanja, serta adanya penundaan pelaksanaan kegiatan supaya dapat diintegrasikan dengan program dan kegiatan kepala daerah terpilih akan akan dimasukkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2025. Disamping itu, untuk kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang tidak berdampak dari kebijakan efisiensi akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.

Sementara itu, berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025, terdapat beberapa catatan hasil evaluasi masing-masing sebagai berikut:

1. Rancangan RPJMD/RENSTRA PD tahun 2025-2029 Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan RKPD/Renja 2025 dan penyusunan RKPD/Renja tahun 2026, Sesuai dengan SE Permendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Dan Perubahan Anggaran Pendpatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, oleh karena itu Pemerintah daerah segera melakukan Langkah- langkah meliputi:
   a. Gubernur terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerag (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Provinsi tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri pada minggu pertama bulan Mei tahun 2025;
   b. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu Ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk Provinsi;
2. Penyesuaian dan penajaman program, kegiatan serta target kinerja pada perubahan RKPD/Renja tahun 2025 dapat mengacu pada rancangan akhir RPJMD/Renstra 2025- 2029
3. Untuk mendorong pencapaian target pembangunan tahun 2025, maka perlu optimalisasi belanja-belanja kegiatan di masing-masing OPD dengan memprioritaskan pada kegiatan yang dapat menukik langsung terhadap pencapaian sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Jika terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung langsung terhadap pencapaian target-target maka perlu dilakukan refocusing pada kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran

4. Dari hasil telaahan terhadap Dokumen RKPD/Renja Tahun 2025,Terdapat 1 program baru yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan yaitu PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA, dan terdapat 1 Program yang direncanakan tetapi tidak mendapat alokasi pendanaan baik di perencanaan maupun penganggaraannya yaitu PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM, serta terdapat 12 Program yang direncanakan tetapi tidak dianggarkan yaitu
   a. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
   b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   c. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
   d. Program Perencanaan Tenaga Kerja
   e. Program Perizinan Usaha Pertanian
   f. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   g. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
   h. Program Pengembangan Umkm
   i. Program Promosi Penanaman Modal
   j. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
   k. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
   l. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Terdapat 216 program yang direncanakan dan dianggarkan tahun 2025, hanya 2 program yang secara konsisten sama alokasi pendanaannya dari yang direncanakan dengan yang dianggarkan, 165 program mengalami pengurangan anggaran, dan 36 program mengalami penambahan alokasi dari yang direncanakan, terdapat 36 program tidak memiliki ukuran dan target kinerja.
6. Terdapat 710 kegiatan, terdapat 13 kegiatan yang tidak mendapat alokasi pagu pada perencanaannya, 10 kegiatan yang tidak mendapat alokasi pagu pada perencanaannya dan penganggaraannya, sedangkan 3 kegiatan yang tidak mendapat alokasi pagu pada perencanaannya, mendapat alokasi pagu pada penganggaraannya. Hanya 29 kegiatan yg konsisten antara perencanaan dan penganggarannya, 108 kegiatan bertambah alokasi anggarannya, 573 kegiatan berkurang alokasi anggarannya, serta 134 kegiatan tidak memiliki indikator dan target kinerja
7. Terdapat 3.056 sub kegiatan, dimana 331 Sub kegiatan diantaranya tidak mendapat alokasi pagu pada perencanaannya, 581 Sub Kegiatan mendapat alokasi pagu pada perencanaannya tetapi tidak mendapat alokasi pagu pada penganggaraannya, 26 sub kegiatan yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan. Hanya 174 Sub kegiatan yang konsisten antara perencanaan dan penganggarannya, bertambah alokasi pagu pada penganggaraannya sebanyak 447 sub kegiatan, 2.104 berkurang alokasi pagu pada penganggaraannya. Dan terdapat 236 sub kegiatan tidak memiliki target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja sampai triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD/Renja 2025, terdapat 216 program, 710 kegiatan dan 3.056 sub kegiatan yang direncanakan, namun hanya 2 program, 29 kegiatan, dan 174 Sub kegiatan yang konsisten antara perencanaan dan penganggarannya
2. Alokasi pendanaan indikatif untuk mendanai sebanyak 216 program, 710 kegiatan dan 3.056 sub kegiatan mencapai Rp. 7,79 triliun, namun yang teranggarkan dalam APBD sebesar Rp. 6,22 Triliun atau berkurang sebesar Rp. 1,57 triliun. Sampai dengan triwulan kedua 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 2,10 triliun atau 26,97% terhadap pagu RKPD/Renja dan atau 33,79 terhadap total APBD.
3. Capaian kinerja berdasarkan indikator makro daerah sampai triwulan II tahun 2025 mencapai 66,67%. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Inflasi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio, sedangkan capaian Indikator kinerja utama mencapai 4 indikator atau 40% sesuai bahkan melampui target kinerja tahun 2025 yaitu Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB, Angka kemiskinan, dan Gini rasio, sedangkan 6 indikator lainnya on progress. Adapun capaian kinerja perangkat daerah secara rata- rata mencapai 39,96%, faktor pendorong capaian kinerja sampai triwulan II yaitu tingginya capaian kinerja OPD didukung oleh adanya beberapa indikator yang capaian ratusan persen antara lain capaian peningkatan PAD pada beberapa OPD seperti Rumah Sakit (pendapatan BLUD), tingginya peningkatan ekspor non tambang mencapai 649,33 persen dari target 7%, sedangkan faktor penghambat terutama pada pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari DAK baru mencapai 5% yang disebabkan lambatnya penetapan juknis DAK 2025 yang baru ditetapkan pada bulan Juni 2025, serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi DPRD sebagian besar belum dapat dilakukan karena kendala kelengkapan administrasi dan kesiapan kelompok penerima.

Rekomendasi

Untuk itu, berdasarkan kesimpulan dari hasil evaluasi maka upaya yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dalam perubahan rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terhadap indikator kinerja pemerintah daerah yang masih jauh dari ekspektasi pencapaiannya, maka perlu dilakukan pemetaan kembali program dan kegiatan dengan melakukan refocusing untuk optimalisasi pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Terhadap indikator dengan tingkat capaian pada tahun 2024 telah melampaui target tahun 2025, maka pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan exersice kembali untuk memproyeksikan targetnya, dengan memperhatikan target-target yang akan ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD 2025-2029.
3. Perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap semua program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk memastikan sudah dilengkapi dengan indikator, target, dan pagu indikatifnya, dan jika program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah direncanakan di RKPD murni 2025 tetapi tidak mendapat alokasi anggaran pada

APBD 2025 dan sebaliknya maka perlu dilakukan penyesuaian kembali pada perubahan RKPD Tahun 2025 atau menghapus dalam perubahan RKPD tahun 2025 apabila tidak masuk dalam program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

4. Dengan adanya penambahan dan pengurangan pada beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD dan APBD Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2025.
5. Berdasarkan ketentuan Permendagri 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 pasal 2 mengamanatkan bahwa hasil rakortekbangnas tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sehingga dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu mengakomodir hasil kesepakatan Rakortekbangnas sebagaimana telah ditetapkan Permendagri 12 Tahun 2025.

CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
		Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan					**145.075.000,00**		**8.092.400,00**		5,57
		pengelolaan data kelitbangan dan peraturan					145.075.000,00		8.092.400,00		5,57
		Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan					**2.812.499.640,00**		**42.922.440,00**		1,52
		penelitian dan pengembangan bidang aspek- aspek sosial					1.084.623.640,00		25.027.440,00		2,30
		penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan					1.673.875.000,00		17.895.000,00		1,06
		penelitian dan pengembangan pariwisata					54.001.000,00		0,00		0,00
		Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan					**1.067.878.590,00**		**24.763.860,00**		2,31
		penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah					45.062.590,00		16.060.860,00		35,64
		penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan					1.022.816.000,00		8.703.000,00		0,85
		Pengembangan inovasi dan teknologi					**410.278.500,00**		**4.739.500,00**		1,15
		uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi					180.093.500,00		4.739.500,00		2,63
		sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan					230.185.000,00		0,00		0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase Perencanaan pem**	**persen**	**100**	**2.850.773.171**	**2.850.773.171**	**-**	**1.792.780.165**	-	62,89
		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	**Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi**	**dokumen**	**10**	**2.850.773.171**	**2.850.773.171**	**-**	**1.792.780.165**	-	62,89

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Balai Kemasan Produk Daerah	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	6.140.000	6.140.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	20.120.000	20.120.000	-	6.360.000	-	31,61
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	387.174.500	387.174.500	-	59.441.100	-	15,35
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	500.000.000	500.000.000	-	128.243.114	-	25,65
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1.914.838.671	1.914.838.671	-	1.598.735.951	-	83,49
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	2	22.500.000	22.500.000	-	0	-	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						-			
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan**	**%**	**6,23**	**3.840.880.570**	**661.102.000,00**	-	**5.520.000,00**	-	0,14
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	**Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola**	**Ha**	**181.660,82**	**2.914.880.570**	**409.910.000,00**	-	**5.520.000,00**	-	0,19
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	25.000.000	0	-		-	0,00
		Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan Dari Pemerintah Pusat (DAK) (Pajak Rokok)	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	147.544,74	2.689.880.570	11.240.000,00	-	5.520.000,00	-	0,21
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	10	100.000.000		-		-	0,00
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	100	100.000.000	0	-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertimbangan teknis izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi	13	130.000.000	0	-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendsi	15	50.000.000	0	-		-	0,00
		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendsi	9	30.000.000	0	-		-	0,00
		Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendsi	3	30.000.000	0	-		-	0,00
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dokumen	1	20.000.000	0	-		-	0,00
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengelolaan Ekosistem Blue Carbon (DBH)	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	-	0	0	398.500.000,00	-	0,00	-	-
		Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Segar) Berdasarkan Penetapan Pusat (Pajak Rokok)	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	-	0	0	170.000,00	-	0,00	-	-
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan**	**Kelompok**	**6**	**796.000.000**	**251.192.000,00**	-	**0,00**	-	0,00
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	696.000.000	41.192.000,00	-	0,00	-	0,00
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	2	50.000.000	0	-		-	0,00
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	2	50.000.000	0	-		-	0,00
		Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman (DAK)	Jumlh Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan	-	0	0	0	-		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman (DAK) (DBH Cukai)	Jumlh Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan	-	0	0	210.000.000,00	-	0,00	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						-		-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**272.276**	**20.490.083.857**	**2.310.610.600**	**-**	**348.000**	-	0,00
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	**Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan**	**Ton**	**242.276**	**3.685.000.000**	**1.607.143.800**	**-**	**48.000**	-	0,00
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	65.000.000	2.143.800	-	48.000	-	0,07
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2	520.000.000	1.605.000.000	-	0	-	0,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	55	3.100.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (DBH Cukai) (Pajak Rokok)	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	-	-	0		-		-	-
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap**	**Unit**	**170**	**175.000.000**	0	-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	55.000.000	0	-		-	0,00
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendsi	300	110.000.000	0	-		-	0,00
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Dokumen	1	10.000.000	0	-		-	0,00
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berizin**	**Unit**	**60**	**40.000.000**	0	-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000	0	-		-	0,00
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendsi	1	20.000.000	0	-		-	0,00
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterdaftar**	**Unit**	**550**	**50.000.000**	0	-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000	0	-		-	0,00
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	500	30.000.000	0	-		-	0,00
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	**Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM**	**Uunit**	**1 Unit**	**16.380.083.857**	**701.888.000**	-	**120.000**	-	0,00
		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	1	160.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	4	16.020.083.857		-		-	0,00
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	20	200.000.000	701.888.000	-	120.000	-	0,06
		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	**Persetujuan penerbitan izin Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)**	**Izin/ Persetujuan**	**60**	**40.000.000**		-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	60	20.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Izin/ Persetujuan**	**60**	**40.000.000**		**-**		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000		**-**		-	0,00
		Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendsi	60	20.000.000		**-**		-	0,00
		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	**Jumlah kapal perikanan di atas 10GT sampai dengan 30 GT**	**Unit**	**60**	**40.000.000**		**-**		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000		**-**		-	0,00
		Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendsi	60	20.000.000		**-**		-	0,00
		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar**	**Unit**	**60**	**40.000.000**	**1.578.800**	**-**	**180.000**	-	0,45
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000	1.578.800	**-**	180.000	-	0,90

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendsi	60	20.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Produksi olahan hasil perikanan**	**Ton**	**181.366**	**310.000.000**	**1.468.564.765,00**	**-**	**30.308.300,00**	-	9,78
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	**Jumlah izin usaha pemasaaran dan pengolahan hasil perikanan yg terbit**	**izin**	**3**	**30.000.000**	**1.400.000,00**	**-**	**550.000,00**	-	1,83
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendsi	3	5.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	2	25.000.000		-		-	0,00
		Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	-	-	0	1.400.000,00	-	550.000,00	-	-
	Dinas Kelautan dan Perikanan	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Jumlah Rekomendasi Sertifikat Keamanan Pangan (Sertifikat GMP (Good Manufacturing Procedure)**	**Dokumen**	**44**	**195.000.000**	**1.464.225.765,00**	**-**	**28.188.500,00**	-	14,46
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	3	25.000.000	384.000,00	-	160.000,00	-	0,64

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	5	170.000.000	1.463.841.765,00	-	28.028.500,00	-	16,49
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah ketersediaan stok**	**Ton**	**434.390**	**85.000.000**	**2.939.000,00**	**-**	**1.569.800,00**	-	1,85
		Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	35.000.000	2.114.000,00	-	1.239.800,00	-	3,54
		Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	1	25.000.000	0	-		-	0,00
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi	1 Sisem Infi	25.000.000	825.000,00	-	330.000,00	-	1,32
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**A**	**30.850.000.000**	**31.013.165.575,00**	**-**	**###########**	-	45,43
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun**	**Dokumen**	**43**	**537.500.000**	**71.013.600,00**	**-**	**3.950.000,00**	-	0,73
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	30.000.000	2.518.000,00	-	1.456.000,00	-	4,85
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	9	160.000.000	3.129.600,00	-	0,00	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	9	50.000.000	3.140.000,00	-	0,00	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1.079.000,00	-	569.000,00	-	1,14

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1.756.000,00	-	500.000,00	-	1,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	60.000.000	4.366.000,00	-	1.425.000,00	-	2,38
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	137.500.000	1.605.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0	50.160.000,00	-	0,00	-	-
		Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	0	0	3.260.000,00	-	0,00	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun**	**Dokumen**	**1**	**22.290.000.000**	**24.125.814.810**	-	##########	-	52,99
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	22.000.000.000	23.968.273.510,00	-	11.767.905.427,00	-	53,49
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	110.000.000	146.800.000,00	-	40.530.000,00	-	36,85
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	30.000.000	3.973.100,00	-	2.187.000,00	-	7,29
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	30.000.000	2.279.500,00	-	904.000,00	-	3,01
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	30.000.000	1.574.000,00	-	195.000,00	-	0,65
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	30.000.000	642.700,00	-	234.500,00	-	0,78
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	30.000.000	2.272.000,00	-	354.500,00	-	1,18

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	30.000.000		-		-	0,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan BMD yang tersusun**	**Dokumen**	**1**	**85.000.000**	**103.688.500,00**	**-**	**6.278.000,00**	-	7,39
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1.535.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000	93.820.000,00	-	3.300.000,00	-	13,20
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	10.000.000	647.000,00	-	314.000,00	-	3,14
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.000.000	501.000,00	-	150.000,00	-	1,50
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.000.000		-		-	0,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10.000.000	7.185.500,00	-	2.514.000,00	-	25,14
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.000.000		-		-	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun**	**Dokumen**	**1**	**60.000.000**	**5.754.200,00**	**-**	**0,00**	-	0,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	818.200,00	-	0,00	-	0,00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	1.404.000,00	-	0,00	-	0,00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	10.000.000	1.362.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	10.000.000	2.170.000,00	-	0,00	-	0,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	10.000.000	0	-		-	0,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	10.000.000	0	-		-	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan jasa administrasi**	**Jenis**	**10**	**300.000.000**	**669.263.320,00**	**-**	**198.056.339,00**	-	66,02
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	30.000.000	6.784.500,00	-	1.100.000,00	-	3,67

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	30.000.000	147.100.000,00	-	50.460.000,00	-	168,20
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	30.000.000	4.216.140,00	-	851.300,00	-	2,84
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	30.000.000	34.703.715,00	-	19.447.795,00	-	64,83
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40	30.000.000	4.332.000,00	-	244.000,00	-	0,81
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	30.000.000	5.400.000,00	-	1.050.000,00	-	3,50
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	0	-	0	-		-	0,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	30.000.000	35.719.900,00	-	13.412.700,00	-	44,71
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	30.000.000	221.427.140,00	-	95.740.544,00	-	319,14
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	30.000.000	2.388.425,00	-	0,00	-	0,00
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30.000.000	207.191.500,00	-	15.750.000,00	-	52,50
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah BMD yang diadakan**	**Unit**	**4**	**1.420.000.000**	0	-		-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	275.000.000	0	-		-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	275.000.000	0	-		-	0,00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	0	-		-	0,00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	275.000.000	0	-		-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	275.000.000	0	-		-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	275.000.000	0	-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia**	**Jenis**	**6**	**4.602.500.000**	**4.171.203.520,00**	-	**1.915.088.958,00**	-	41,61

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	27.500.000	536.700,00	-	250.000,00	-	0,91
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	525.000.000	773.535.000,00	-	292.936.958,00	-	55,80
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	4.050.000.000	3.397.131.820,00	-	1.621.902.000,00	-	40,05
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit BMD yang dipelihara**	**Unit**	**80**	**555.000.000**	**664.300.000,00**	-	**69.650.344,00**	-	12,55
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	150.000.000	25.000.000,00	-	16.318.439,00	-	10,88
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50.000.000	219.000.000,00	-	53.331.905,00	-	106,66
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	10.000.000	0	-		-	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	35.000.000	0	-		-	0,00
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	0	-		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	100.000.000	420.300.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	100.000.000	0	-		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	0	-		-	0,00
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	**Unit**	**5**	**1.000.000.000**	**1.202.127.625,00**	-	**8.295.000,00**	-	0,83
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3	1.000.000.000	1.202.127.625,00	-	8.295.000,00	-	0,83
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**-**	**-**	**-**	**2.520.000.000**	**2.103.396.600**	-	**82.705.500**	-	3,28
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Pelaku Pariwisata**	**Tahun**	**1**	**200.000.000**	42.800.000	-	23.260.000	-	11,63

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	100	200.000.000	42.800.000	6	23.260.000	6,00	11,63
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Lokasi**	**1**	**70.000.000**	7.500.000	**-**	0	-	0,00
		Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	5	70.000.000	7.500.000	**-**	0	-	0,00
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	**Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**lokasi**	**4**	**2.000.000.000**	1.859.896.600	**-**	48.095.500	-	2,40
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	4	200.000.000	0	**-**		-	0,00
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	10	300.000.000	193.610.000	1	37.825.000	10,00	12,61
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	20	1.500.000.000	1.066.286.600	1	10.270.500	5,00	0,68
		Perencanaan destinasi pariwisata provinsi					600.000.000	**-**	0	-	0,00
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	**-**	**-**	**-**	**250.000.000**	193.200.000	**-**	11.350.000	-	4,54
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	8	250.000.000	193.200.000	**-**	11.350.000	-	4,54
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						-			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS**	**persen**	**1**	**362.260.000**	362.260.000	**-**	134.933.300	-	37,25
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	**Jumlah Dokumen informasi industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**Dokumen**	**1**	**362.260.000**	362.260.000	**-**	134.933.300	-	37,25

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	323.500.000	323.500.000	-	118.053.300	-	36,49
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	18.110.000	18.110.000	-	8.900.000	-	49,14
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	20.650.000	20.650.000	-	7.980.000	-	38,64
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						-			
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase pengendalian izin usaha industri**	**persen**	**1**	87.820.000	87.820.000	-	0	-	0,00
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	**Jumlah izin usaha yang terfasilitasi**	**IKM**	**190**	**87.820.000**	87.820.000	-	0	-	0,00
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA	Dokumen	1	68.820.000	68.820.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	19.000.000	19.000.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						-			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai sakip**	**A Point**	**A**	**11.075.825.638**	**11.075.825.638**	**-**	**5.227.703.588**	-	47,20
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen barang miliki daerah**	**Dokumen**	**1**	**10.040.000**	**10.040.000**	**-**	0	-	0,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.163.000	5.163.000	**-**	0	-	0,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.877.000	4.877.000	**-**	0	-	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**orang**	**3**	**0**	0	**-**		-	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	0	0	**-**		-	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersdianya dokumen laporan keuangan perangkat daerah**	**Dokumen**	**1**	**7.907.008.568**	**7.907.008.568**	**-**	**3.913.138.920**	-	49,49
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	6.251.800	6.251.800	**-**	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	18.015.000	18.015.000	**-**	7.997.750	-	44,39
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	6.780.000	6.780.000	**-**	0	-	0,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	57.660.000	57.660.000	**-**	19.220.000	-	33,33
	Dinas Perindustrian	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	57	7.818.301.768	7.818.301.768	**-**	3.885.921.170	-	49,70
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya jasa pelayanan umum perangkat daerah**	**persen**	**100**	**475.593.080**	**475.593.080**	**-**	**149.317.820**	-	31,40
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	128.900.000	128.900.000	**-**	13.531.000	-	10,50
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	96.999.900	96.999.900	**-**	30.270.000	-	31,21
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	16.398.460	16.398.460	**-**	330.000	-	2,01

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	27.440.000	27.440.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	10.415.000	10.415.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	35.882.920	35.882.920	-	664.000	-	1,85
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	159.556.800	159.556.800	-	104.522.820	-	65,51
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**terpeliharanya barang milik daerah**	**unit**	**30**	**470.828.800**	**470.828.800**	-	**149.110.819**	-	31,67
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	21.020.000	21.020.000	-	450.000	-	2,14
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	213.130.000	213.130.000	-	99.977.000	-	46,91
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	236.678.800	236.678.800	-	48.683.819	-	20,57
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang industri**	**orang**	**29**	**2.134.296.960**	**2.134.296.960**	-	**1.004.736.029**	-	47,08
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	604.064.560	604.064.560	-	289.412.529	-	47,91
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.521.664.000	1.521.664.000	-	715.198.500	-	47,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	8.568.400	8.568.400	-	125.000	-	1,46
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi**	**Dokumen**	**1**	**78.058.230**	**78.058.230**	-	**11.400.000**	-	14,60
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	11.735.530	11.735.530	-	450.000	-	3,83
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.989.900	8.989.900	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.780.000	7.780.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.163.000	5.163.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	13.180.000	13.180.000	-	450.000	-	3,41
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.899.800	3.899.800	-	0	-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	27.310.000	27.310.000	-	10.500.000	-	38,45
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan pembang	persen	100	2.850.773.171	2.850.773.171	-	1.792.780.165	-	62,89
		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	**Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi**	**dokumen**	**10**	2.850.773.171	2.850.773.171	-	1.792.780.165	-	62,89
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	6.140.000	6.140.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	20.120.000	20.120.000	-	6.360.000	-	31,61
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	387.174.500	387.174.500	-	59.441.100	-	15,35
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	500.000.000	500.000.000	-	128.243.114	-	25,65
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1.914.838.671	1.914.838.671	-	1.598.735.951	-	83,49
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	2	22.500.000	22.500.000	-	0	-	0,00
	UPTD Pengelola Rumah Susun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						-		-	
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jalan Mantap**	**%**	**80.4**	**856.115.041.872**	**119.062.794.800,00**	-	**3.197.351.888,00**	-	0,37

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**-**	**-**	**-**	**856.115.041.872**	**119.062.794.800,00**	-	**3.197.351.888,00**	-	0,37
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	50	305.000.000	30.000.000,00	-	19.884.000,00	-	6,52
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	50	316.791.569.910		-		-	0,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	1493.12	50.205.000.000	4.272.000.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	79.46	21.140.769.662	13.276.978.800,00	-	3.130.272.502,00	-	14,81
		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	3	68.027.920.000	11.434.000.000,00	-	0,00	-	0,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	2	4.996.862.300	7.338.200.000,00	-	47.195.386,00	-	0,94
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	50	394.137.920.000	82.253.771.000,00	-	0,00	-	0,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1493.12	510.000.000	457.845.000,00	-	0,00	-	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						-		-	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Kapasitas Daya Tampung**	**m**	**8.110.000**	**166.304.162.334**	**138.944.666.140,00**	-	22.199.922.098	-	13,35
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Banguan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola**	**Unit**	**1.269**	**64.757.824.167**	**71.901.578.460,00**	-	12.080.672.398	-	18,66
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	400	-		-		-	#DIV/0!
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	400	5.173.886.811	51.528.621.720,00	-	11.763.584.160	-	227,36
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	307	3.437.850.578	1.227.971.740,00	-	95.258.700	-	2,77
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	5,3	9.500.000.000	588.855.000,00	-	0	-	0,00
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	197	37.300.000.000	8.219.050.000,00	-	0	-	0,00
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	4	946.086.778	8.222.800.000,00	-	190.850.000	-	20,17
		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	100	900.000.000	2.062.280.000,00	-	3.440.000	-	0,38
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	70	500.000.000	52.000.000,00	-	27.539.538	-	5,51

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	20	2.000.000.000	-	-	-	-	0,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	20	2.000.000.000	-	-	-	-	0,00
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	1	1.000.000.000	-	-	-	-	0,00
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	2	2.000.000.000	-	-	-	-	0,00
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola**	**Hektare**	**15.935**	**101.546.338.167**	-	-	-	-	0,00
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung	7900	982.344.000	965.095.000	-	0	-	0,00
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	17	910.000.000	28.704.510.000	-	8.756.606.800	-	962,26
		Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	2	8.500.000.000		-		-	0,00
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	5	3.000.000.000		-		-	0,00
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	35	500.000.000	222.000.000	-	0	-	0,00
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	17	24.900.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	21	5.000.000.000	724.431.000	-	0	-	0,00
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	8900	3.720.072.800	1.968.311.500	-	606.374.900	-	16,30
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	35	54.033.921.367	34.458.740.180	-	756.268.000	-	1,40
	Biro Hukum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	**2.570.370.371**	**2.093.396.400,00**	-	**1.365.144.400,00**	-	53,11
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	**2.570.370.371**	**2.093.396.400,00**	-	**1.365.144.400,00**	-	53,11
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	35	2.570.370.371	2.093.396.400,00	-	1.365.144.400,00	-	53,11
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	2	-	0	-		-	-
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	-	0	-		-	-
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						-			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	**642.592.593**	**28.433.164.140,00**	-	**1.101.334.200,00**	-	171,39
		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	-	**642.592.593**	**28.433.164.140,00**	-	**1.101.334.200,00**	-	171,39
		Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara	90	-		-		-	-
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	3	642.592.593	28.433.164.140,00	-	1.101.334.200,00	-	171,39
		Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kabupaten/Kota	10	-	0	-		-	-
		Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	100	-	0	-		-	-
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	57	-	0	-		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
PD - 7 Peningkatan Dayasaing Daerah		Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	15	-	0	-		-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						-		-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi**	**Persentase**	**50**	**3.642.592.593**	**14.912.416.450,00**	-	**3.704.386.450,00**	-	101,70
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	**Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi**	**Persentase**	**50**	**3.642.592.593**	**14.912.416.450,00**	-	**3.704.386.450,00**	-	101,70
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	3	642.592.593	14.912.416.450,00	-	3.704.386.450,00	-	576,48
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	15	3.000.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	7	-		-		-	-
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	12	-		-		-	-
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	10	-		-		-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						-		-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Kapasitas Daya Tampung**	**m**	**8.110.000**	**166.304.162.334**	**138.944.666.140,00**	-	**########**	-	13,35
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Banguan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola**	**Unit**	**1.269**	**64.757.824.167**	**71.901.578.460,00**	-	**########**	-	18,66
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	400	-		-		-	-
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	400	5.173.886.811	51.528.621.720,00	-	11.763.584.160,00	-	227,36
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	307	3.437.850.578	1.227.971.740,00	-	95.258.700,00	-	2,77
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	5,3	9.500.000.000	588.855.000,00	-	0,00	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	197	37.300.000.000	8.219.050.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	4	946.086.778	8.222.800.000,00	-	190.850.000,00	-	20,17
		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	100	900.000.000	2.062.280.000,00	-	3.440.000,00	-	0,38
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	70	500.000.000	52.000.000,00	-	27.539.538,00	-	5,51
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	20	2.000.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	20	2.000.000.000		-		-	0,00
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	1	1.000.000.000		-		-	0,00
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	2	2.000.000.000		-		-	0,00
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola**	**Hektare**	**15.935**	**101.546.338.167**		-		-	0,00
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung	7900	982.344.000	965.095.000,00	-	0,00	-	0,00
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	17	910.000.000	28.704.510.000,00	-	8.756.606.800,00	-	962,26
		Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	2	8.500.000.000		-		-	0,00
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	5	3.000.000.000		-		-	0,00
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	35	500.000.000	222.000.000,00	-	0,00	-	0,00
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	17	24.900.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	21	5.000.000.000	724.431.000,00	-	0,00	-	0,00
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	8900	3.720.072.800	1.968.311.500,00	-	606.374.900,00	-	16,30

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	35	54.033.921.367	34.458.740.180,00	-	756.268.000,00	-	1,40
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase produktivitas SDM sektor konstruksi**	**%**	**6**	**2.000.000.000**	**232.098.100,00**	-	**56.708.800,00**	-	2,84
		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	**-**	**-**	**-**	**315.778.200**		-		-	0,00
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	10	315.778.200		-		-	0,00
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	**-**	**-**	**-**	**1.216.385.400**	**215.048.100,00**	-	**41.554.000,00**	-	3,42
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi	Orang	180	581.568.100	76.500.000,00	-	4.000.000,00	-	0,69
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	180	420.454.200		-		-	0,00
		Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang	100	214.363.100	45.650.000,00	-	24.874.000,00	-	11,60
		Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				-	92.898.100,00	-	12.680.000,00	-	-
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	**-**	**-**	**-**	**467.836.400**	**17.050.000,00**	-	**15.154.800,00**	-	3,24
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	1	218.918.200		-		-	0,00
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	1	248.918.200	17.050.000,00	-	15.154.800,00	-	6,09
								-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi**	**Persentase**	**50**	**50.000.000.000**	**4.142.000.000,00**	-	**1.052.730.000,00**	-	2,11
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	**Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi**	**Persentase**	**50**	**50.000.000.000**	**4.142.000.000,00**	-	**1.052.730.000,00**	-	2,11
		Optimalisasi TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	Unit	1	50.000.000.000	4.142.000.000,00	-	1.052.730.000,00	-	2,11
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	2	-		-		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						-		-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jalan Mantap**	**%**	**80.4**	**856.115.041.872**	**119.062.794.800,00**	-	**3.197.351.888,00**	-	0,37
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	**-**	**-**	**-**	**856.115.041.872**	**119.062.794.800,00**	-	**3.197.351.888,00**	-	0,37
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	50	305.000.000	30.000.000,00	-	19.884.000,00	-	6,52
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	50	316.791.569.910		-		-	0,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	1493.12	50.205.000.000	4.272.000.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	79.46	21.140.769.662	13.276.978.800,00	-	3.130.272.502,00	-	14,81
		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	3	68.027.920.000	11.434.000.000,00	-	0,00	-	0,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	2	4.996.862.300	7.338.200.000,00	-	47.195.386,00	-	0,94
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	50	394.137.920.000	82.253.771.000,00	-	0,00	-	0,00
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1493.12	510.000.000	457.845.000,00	-	0,00	-	0,00
	Dinas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL									
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan**	**%**	**6,23**	**3.840.880.570**	**661.102.000,00**	-	**5.520.000,00**	-	0,14
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	**Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola**	**Ha**	**181.660,82**	**2.914.880.570**	**409.910.000,00**	-	**5.520.000,00**	-	0,19
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	25.000.000		-		-	0,00
		Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan Dari Pemerintah Pusat (DAK) (Pajak Rokok)	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	147.544,74	2.689.880.570	11.240.000,00	-	5.520.000,00	-	0,21

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	10	100.000.000		-		-	0,00
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	100	100.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertimbangan teknis izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi	13	130.000.000		-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendsi	15	50.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendsi	9	30.000.000		-		-	0,00
		Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendsi	3	30.000.000		-		-	0,00
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dokumen	1	20.000.000		-		-	0,00
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pengelolaan Ekosistem Blue Carbon (DBH)	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	-	0	0	398.500.000,00	-	0,00	-	-
		Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Segar) Berdasarkan Penetapan Pusat (Pajak Rokok)	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	-	0	0	170.000,00	-	0,00	-	-
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan**	**Kelompok**	**6**	**796.000.000**	**251.192.000,00**	-	**0,00**	-	0,00
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	696.000.000	41.192.000,00	-	0,00	-	0,00
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	2	50.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	2	50.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman (DAK)	Jumlh Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan	-	0	0		-		-	-
		Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman (DAK) (DBH Cukai)	Jumlh Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan	-	0	0	210.000.000,00	-	0,00	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						-			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**983.360**	**3.330.238.603**	**737.003.980,00**	-	**63.824.000,00**	-	1,92
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah izin usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah/Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Ton**	**983.360**	**61.320.000**	**1.110.000,00**	-	**138.000,00**	-	0,23
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendsi	1	10.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendsi	5	10.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1	41.320.000	1.110.000,00	-	138.000,00	-	0,33
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	**Produksi budidaya ikan di laut**	**Ton**	**694.086**	**2.120.546.390**	**32.687.000,00**	-	**0,00**	-	0,00
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	6 Unit	1.144.729.800		-		-	0,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	6 Unit	887.300.000	32.687.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	20 Dokumen	61.311.520		-		-	0,00
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	90 Orang	27.205.070		-		-	0,00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	**Produksi benih ikan**	**Ekor**	**12.241.200**	**1.148.372.213**	**703.206.980,00**	-	**63.686.000,00**	-	5,55

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	13	1.543.801.698	650.706.980,00	-	62.886.000,00	-	4,07
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	13	1.148.372.213	52.500.000,00	-	800.000,00	-	0,07
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**1. Meningkatnya Populasi Ternak 2. Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)**	**Ekor %**	**1. 62.344.636 2. 75**	**925.000.000**	-			-	0,00
		Penataan Prasarana Pertanian	**1. Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian (%) 2. Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian**	**% %**	**1. 75 2. 75**	**925.000.000**	-			-	0,00
		Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)	Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	Unit	1	200.000.000	0	-	0	-	0,00
		Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Unit	1	725.000.000	0	-	0	-	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas**	**ekor**	**62.344.636**	**20.972.818.657**	**6.121.013.682**	**50.705.312**	**295.196.775**	81,33	1,41
		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	**Terlaksananya pengawasan Distributor Obat Hewan**	**Laporan**	**1**	**230.000.000**	**35.622.652**		**2.536.000**	-	1,10
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	172.500.000	35.622.652	0,25	2.536.000	25,00	1,47
		Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	1	57.500.000	-			-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Balai Inseminasi Buatan (BIB)	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan dan Hijauan Pakan Ternak**	**Laporan**	**1**	**1.000.000.000**	130.400.000	**0**	19.895.200	-	1,99
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	1.000.000.000	130.400.000	0	19.895.200	-	1,99
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Laporan**	**1**	**2.402.500.000**	**1.065.021.280**	**0**	**171.003.875**	-	7,12
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	1	172.500.000	123.080.000	0	9.820.875	-	5,69
		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	1	2.000.000.000	797.310.800	0	155.785.000	-	7,79
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	1	230.000.000	144.630.480	0	5.398.000	-	2,35
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**887.500.000**	**408.754.950**	**-**	**38.357.200**	-	4,32
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	300.000.000	269.992.500	-	12.080.000	-	4,03
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	1	300.000.000	138.762.450	-	26.277.200	-	8,76
		Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	10	287.500.000	-			-	0,00
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	**Tersedian bibit dan benih ternak yang unggul**	**ekor**	**5010**	**16.452.818.657**	**4.481.214.800**		**63.404.500**	-	0,39
		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis	100000	900.000.000	67.665.000		0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	5000	14.802.818.657	4.314.954.600	-	62.474.500	-	0,42
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	2	750.000.000	98.595.200	-	930.000	-	0,12
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas**	**ekor**	**62.344.636**	**20.972.818.657**	6.121.013.682	**50.705.312**	**295.196.775**	81,33	1,41
		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	**Terlaksananya pengawasan Distributor Obat Hewan**	**Laporan**	**1**	**230.000.000**	35.622.652		**2.536.000**	-	1,10
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	172.500.000	35.622.652	0,25	2.536.000	25,00	1,47
		Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	1	57.500.000	-			-	0,00
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan dan Hijauan Pakan Ternak**	**Laporan**	**1**	**1.000.000.000**	130.400.000	**-**	19.895.200	-	1,99
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	1.000.000.000	130.400.000	-	19.895.200	-	1,99
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Laporan**	**1**	**2.402.500.000**	1.065.021.280	**0**	**171.003.875**	-	7,12
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	1	172.500.000	123.080.000	-	9.820.875	-	5,69
	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	1	2.000.000.000	797.310.800	-	155.785.000	-	7,79
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	1	230.000.000	144.630.480	-	5.398.000	-	2,35

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**887.500.000**	408.754.950	**-**	**38.357.200**	-	4,32
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	300.000.000	269.992.500	-	12.080.000	-	4,03
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	1	300.000.000	138.762.450	-	26.277.200	-	8,76
		Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	10	287.500.000	-			-	0,00
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	**Tersedian bibit dan benih ternak yang unggul**	**ekor**	**5010**	**16.452.818.657**	4.481.214.800		**63.404.500**	-	0,39
		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis	100000	900.000.000	67.665.000		0	-	0,00
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	5000	14.802.818.657	4.314.954.600	-	62.474.500	-	0,42
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	2	750.000.000	98.595.200	-	930.000	-	0,12
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas**	**ekor**	**62.344.636**	**20.972.818.657**	6.121.013.682	**50.705.312**	**295.196.775**	81,33	1,41
		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	**Terlaksananya pengawasan Distributor Obat Hewan**	**Laporan**	**1**	**230.000.000**	35.622.652		**2.536.000**	-	1,10
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	172.500.000	35.622.652	0,25	2.536.000	25,00	1,47
		Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	1	57.500.000	-			-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan dan Hijauan Pakan Ternak**	**Laporan**	**1**	**1.000.000.000**	130.400.000	**-**	19.895.200	-	1,99
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	1.000.000.000	130.400.000	-	19.895.200	-	1,99
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Laporan**	**1**	**2.402.500.000**	1.065.021.280	**0**	**171.003.875**	-	7,12
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	1	172.500.000	123.080.000	-	9.820.875	-	5,69
		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	1	2.000.000.000	797.310.800	-	155.785.000	-	7,79
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	1	230.000.000	144.630.480	-	5.398.000	-	2,35
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**887.500.000**	408.754.950	**-**	**38.357.200**	-	4,32
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	300.000.000	269.992.500	-	12.080.000	-	4,03
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	1	300.000.000	138.762.450	-	26.277.200	-	8,76
		Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	10	287.500.000	-			-	0,00
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	**Tersedian bibit dan benih ternak yang unggul**	**ekor**	**5010**	**16.452.818.657**	4.481.214.800		**63.404.500**	-	0,39
		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis	100000	900.000.000	67.665.000		0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	5000	14.802.818.657	4.314.954.600	-	62.474.500	-	0,42
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	2	750.000.000	98.595.200	-	930.000	-	0,12
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	**61.812.083.040**	**70.032.364.000**	-	2.489.875.000	-	4,03
		Penataan Prasarana Pertanian	**1. Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun 2. Jumlah UPTD yang direhabilitasi/dilengkapi sarana dan prasarananya**	**Paket UPTD**	**1. 221 2. 1**	**61.812.083.040**	**70.032.364.000**	-	2.489.875.000	-	4,03
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	15.400.000.000	55.029.635.000	-	1.011.912.000	-	6,57
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	1	30.100.000.000	11.862.629.000	-	1.461.579.000	-	4,86
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1.410.000.000	-	-	-	-	0,00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	11.802.083.040	-	-	-	-	0,00
	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	500.000.000	-	-	-	-	0,00
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	Dokumen	1	500.000.000	900.100.000	-	0	-	0,00
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3	-		-		-	0,00
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	7	1.400.000.000	2.240.000.000	-	16.384.000	-	1,17
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	100.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	-		-		-	0,00
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	100.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	1	500.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)**	**%**	**2**	**5.425.000.000**	**1.110.903.602**	**-**	**71.688.900**	-	1,32
		Kesejahteraan Hewan	**Terkendalinya Pemotongan Betina Produktif di RPH/TPH**	**Kasus**	**1**	**300.000.000**	56.285.000	0,04	16.482.500	4,00	5,49
		Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	1	300.000.000	56.285.000	-	16.482.500	-	5,49
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	**Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan yang Tersertifikasi**	**Unit Usaha**	**10**	**500.000.000**	370.643.750	-	24.079.450	-	4,82
		Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	10	300.000.000	73.211.050	5	19.039.450	50,00	6,35
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	200.000.000	297.432.700	5	5.040.000	500,00	2,52
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	**Jumlah Unit usaha produk peternakan/RPH/RPU/TPH diawasi**	**Laporan**	**1**	**100.000.000**	51.108.000	0	471.000	-	0,47
		Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	100.000.000	51108000	0	471.000	-	0,47
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah PHMS yang dikendalikan**	**Jenis**	**6**	**4.525.000.000**	632866852	0	30.655.950	-	0,68

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	10	1.150.000.000	69306000	0	3.043.000	-	0,26
		Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	1	250.000.000	35187300	9	0	900,00	0,00
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	1.150.000.000	85633300	0	5.336.700	-	0,46
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	1	1.400.000.000	404260252	0	15.698.250	-	1,12
		Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	100	575.000.000	38480000	0	6.578.000	-	1,14
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Katagori	A	39.520.181.371	27.083.448.587	25	12.808.244.978	-	32,41
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Dokumen	4	320.125.000	54.932.000	2	8.950.000	50,00	2,80
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	28.750.000	11.483.000	2	0	200,00	0,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	57.500.000	36.135.000	2	6.750.000	200,00	11,74
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	181.125.000	7.314.000	0	2.200.000	-	1,21
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	52.750.000				-	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Laporan	1	735.250.000	41.190.000	1	4.817.000	100,00	0,66
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	172.500.000				-	0,00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	86.250.000	34.266.200	0	2.406.000	-	2,79
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	91.250.000	5.183.800	0	2.171.000	-	2,38
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	171	57.500.000				-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	171	172.500.000				-	0,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	143.750.000				-	0,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	171	11.500.000	1.740.000	0	240.000	-	2,09
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	%	98	22.336.128.378	21.510.908.787	38,12	10.348.866.957	38,90	46,33
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	48.875.000				-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	364.316.993				-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	191.125.000	27.973.400	0	9.288.500	-	4,86
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	57.500.000				-	0,00
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	86.250.000	22.660.800	0	4.395.000	-	5,10
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	527.500.000	212.451.800	0	49.870.000	-	9,45
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	171	21.060.561.385	21.247.822.787	176	10.285.313.457	102,92	48,84
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	Dokumen	2	57.500.000	13.791.000	1	3.795.000	50,00	6,60
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	28.750.000	13.791.000	0	3.795.000	-	13,20
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	28.750.000				-	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	%	100	885.750.000	202.853.180	56,67381699	114.964.640	56,67	12,98
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelak	Dokumen	1	57.500.000				-	0,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung	Laporan	1	130.000.000	12.384.000	0	6.925.000	-	5,33
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan d	Dokumen	528	17.250.000	1.396.000	100	0	18,94	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kanto	Paket	50	38.750.000	3.726.430	25	1.594.000	50,00	4,11
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	10000	48.750.000	14.010.000	2010	1.392.000	20,10	2,86
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	20	53.500.000	13.702.700	30	4.815.000	150,00	9,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perler	Paket	10	207.500.000	3.047.050	3	250.000	30,00	0,12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	1	332.500.000	154.587.000	1	99.988.640	100,00	30,07
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Unit	21	1.323.373.000	343.364.000	6	55.954.672	28,57	4,23
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	575.000.000				-	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30.000.000	6.364.000		0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	205.873.000	127.446.000	3	37.971.552	300,00	18,44
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	512.500.000	209.554.000	2	17.983.120	10,00	3,51
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	1	6.957.066.993	209.000	0	187.000	-	0,00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.230.000.000				-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	287.500.000				-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	864.566.993	187.000		187.000	-	0,02
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	57.500.000	22.000		0	-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	57.500.000				-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	230.000.000				-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	230.000.000				-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	%	100	5.086.738.000	4.635.975.060	50	2.188.475.659	50,00	43,02
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	550.000.000	560.756.000	2	159.347.159	200,00	28,97
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4.150.238.000	4.066.907.560	0	2.028.234.500	-	48,87
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	287.500.000				-	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	99.000.000	8.311.500	1	894.000	100,00	0,90
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	7	1.818.250.000	280.225.560	15	82.234.050	214,29	4,52
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1.200.000.000		3		300,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	28.750.000	12.211.000	2	0	200,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	28.750.000	14.661.000	0	500.000	-	1,74
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan L	Dokumen	1	28.750.000	6.657.800	2	5.257.800	200,00	18,29
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja d	Laporan	1	195.750.000	61.040.800	0	61.040.800	-	31,18
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	Dokumen	1	28.750.000	5.365.200	6	0	600,00	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pe	Dokumen	1	307.500.000	87.216.960	2	13.998.250	200,00	4,55
	Biro Perekonomian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						-			
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan**	**%**	**81-100**	**1.591.704.345**	**260.115.000,00**	-	**28.755.315,00**	-	1,81
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	**Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa**	**Pelaku Usaha**	**27**	**1.591.704.345**	**260.115.000,00**	-	**28.755.315,00**	-	1,81

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	585.069.345		-		-	0,00
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	20	322.000.000		-		-	0,00
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	65.000.000		-		-	0,00
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	15	619.635.000		-		-	0,00
		Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan Perikanan (TPKP) Di Wilayah Kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang Keluaran ditangani	-	0	0		-		-	-
		Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	-	0	0	175.160.000,00	-	0,00	-	-
		Pengadaan Kapal Pengawasan Kelautan Perikanan (DAK)	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	-	0	0		-		-	-
		Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan Dan/Atau Usaha Penangkapan Ikan S.D 12 Mil Sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	-	0	0	170.000	-	0	-	-
		Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	-	0	0	84.615.000	-	28.755.315	-	-
		Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan Perikanan (TPKP) Tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	-	0	0	170.000	-	0	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**% Terintegrasi Kualifikasi**	**80**	**2.543.512.640**	1.799.195.616	-	103.836.000	-	4,08
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**% Terintegrasi Kualifikasi**	**80**	**2.543.512.640**	1.799.195.616	-	103.836.000	-	4,08
		Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	1	-		-		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	131.429.996	81.538.300,00	-	1.950.000,00	-	1,48
		Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kota	3	-		-		-	-
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	unit	55	78.251.645		-		-	0,00
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	27.051.000	23.000.000,00	-	0,00	-	0,00
		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	200	101.800.000	519.000.000,00	150	0,00	75,00	0,00
		Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	1	31.250.000	28.600.000,00	-	0,00	-	0,00
		Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	1	17.729.999	4.000.000,00	-	0,00	-	0,00
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	2	175.000.000	275.550.000,00	1	9.600.000,00	50,00	5,49
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	18	1.000.000.000		-		-	0,00
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1	662.000.000	514.250.000,00	6	87.120.000,00	600,00	13,16
		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	30	28.000.000	274.500.000,00	12	1.500.000,00	40,00	5,36
		KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERINTEGRASI					22.399.816,00	0	0,00	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE					37.830.000,00	4	3.666.000,00	-	-
		KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBE DAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE					18.527.500,00	4	0,00	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat Maturitas Keamanan Siber**	**III+ Level**	**III+**	**430.000.000**	126.605.000,00	-	24.979.000,00	-	-
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	**Tingkat Maturitas Keamanan Siber**	**III+ Level**	**III+**	**430.000.000**	126.605.000,00	-	24.979.000,00	-	-
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1	75.030.000	32.880.000,00	-	804.000,00	-	1,07
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	129.150.000	47.700.000,00	-	2.000.000,00	-	1,55
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	1	30.650.000	22.550.000,00	-	8.670.000,00	-	28,29
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	30	195.170.000	23.475.000,00	17	13.505.000,00	56,67	6,92
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Permohonan Izin yang Terlayani Sesuai Persyaratan**	**%**	95	**891.325.420,40**	38.813.000	-	13.398.000	-	1,50
		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penanaman Modal yang ruang Lingkupnya Lintas Kab/Kota**	**Izin**	14	**152.063.883,79**		-		-	0,00
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	4	152.063.883,79		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	4	-		-		-	-
		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**Terlaksananya Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Izin**	20	**739.261.536,61**	38.813.000	-	13.398.000	-	1,81
PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	10	100.898.385,17	38.813.000	130	13.398.000	1.300,00	13,28
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	500	443.018.498,54		1252		250,40	0,00
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha dari pelaku usaha	-	1	195.344.652,90		-		-	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi**	**%**	100	**288.130.023,40**	57.151.200	-	10.206.000	-	3,54
		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	**Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi**	**Dokumen**	2	**288.130.023,40**	57.151.200	2	10.206.000	100,00	3,54
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	288.130.023,40	57.151.200	2	10.206.000	100,00	3,54
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Investor**	**%**	10	**466.658.360,62**	844.194.012		30.816.400	-	6,60

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**Tersedianya dokumen Penetapan Pemberian Fasiltas/insentif di Bidang Penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Dokumen**	1	**466.658.360,62**	321.797.900	-	10.608.800	-	2,27
		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	271.643.190,14	259.600.000	-	6.400.300	-	2,36
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen		-	62.197.900	-	4.208.500	-	0,00
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	-		195.015.170,48		-		-	0,00
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	**Terbentuknya Peta Potensi Investasi Provinsi dan dokumen RUPM**	**Dokumen**	14	**923.912.759,42**	522.396.112	-	20.207.600	-	2,19
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	1	222.455.486,90		-		-	0,00
		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Dokumen	10	-	22.396.112	1	20.207.600	10,00	0,00
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	-		-		-	0,00
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1	701.457.272,52	500.000.000	-	0	-	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								-	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Perusahaan yang Taat LKPM**	**%**	65	**1.612.080.775,78**	305.046.000		79.209.100	-	4,91
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**%**	65	**1.612.080.775,78**	305.046.000		79.209.100	-	4,91
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	Kegiatan Usaha	4	503.099.391,62	87.471.000	4	17.831.000	100,00	3,54
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah dokumen realisasi investasi	Kegiatan Usaha	20	413.583.544,58	37.175.000	1	3.763.100	5,00	0,91
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah perusahaan yang dibina	Pelaku Usaha	500	695.397.839,58	180.400.000	100	57.615.000	20,00	8,29
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**	**A (86-88)**	**A**	**11.615.702.816,59**	7.792.578.160		3.343.843.770	-	28,79
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		**Dokumen**	5	**400.835.366,31**	41.509.080		23.314.400	-	5,82
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dok	2	250.642.132,50	9.977.700	1	7.137.000	50,00	2,85
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	136.967.225,57	16.152.600	1	9.376.000	100,00	6,85
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	1	-				-	0,00
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	1	13.226.008,24	15.378.780	1	6.801.400	100,00	51,42
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**%**	100	**8.010.713.649,66**	6.232.229.030		2.704.860.030	-	33,77
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org	65	7.936.242.270,85	6.215.544.030	65	2.699.078.030	100,00	34,01
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok	1	26.812.849,91	10.320.000		3.440.000	-	12,83
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Lap	1	47.658.528,90	6.365.000		2.342.000	-	4,91
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		**%**	100	**25.174.613,02**	12.884.900		4.750.000	-	18,87
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	2	25.174.613,02	12.884.900	-	4.750.000	-	18,87
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				**29.386.520**				-	0,00
		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jenis	2	29.386.520,23				-	0,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			-				-	0,00
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**%**	100	**1.595.463.271,71**	183.934.950		60.841.598	-	3,81
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	-				-	0,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	939.799.839,37	46.821.400		8.858.550	-	0,94
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			97.948.726,23				-	0,00
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	-	6.888.000		6.372.600	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	69.530.349,23	3.393.750		2.593.500	-	3,73
		Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dok	1	32.528.538,70	27.400.000		4.540.000	-	13,96
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	1	130.770.049,99	18.900.000		15.327.500	-	11,72
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	20	324.885.768,19	80.531.800		23.149.448	-	7,13
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				-		-		-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-		-		-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-		-		-	0,00
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			-		-		-	0,00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-	0,00
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**%**	100	**1.214.809.067,64**	942.547.200	-	453.675.718	-	37,35
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	2	15.778.807,70	1.450.000	-	500.000	-	3,17
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	4	315.440.055,07	158.629.200	-	75.160.507	-	23,83
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	2	59.663.095,09	29.780.000	-	17.760.000	-	29,77
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	1	823.927.109,78	752.688.000	-	360.255.211	-	43,72
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**%**	100	**339.320.328,02**	379.473.000	-	96.402.024	-	28,41
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	45.388.583,82	25.000.000	-	10.775.000	-	23,74

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	25	276.806.984,66	154.473.000	-	85.627.024	-	30,93
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			-		-		-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		-		-	-
		Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi			17.124.759,54	200.000.000	-	0	-	0,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Calon Investyor yang Berinvestasi**	**%**	**85**	**1.265.029.489**		-		-	0,00
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**Dokumen**	**3**	**1.265.029.489**		-		-	0,00
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	2	697.023.561,26		-		-	0,00
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	568.005.927,53		-		-	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	**61.812.083.040**	**70.032.364.000**	-	**2.489.875.000**	-	4,03
		Penataan Prasarana Pertanian	**1. Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun 2. Jumlah UPTD yang direhabilitasi/dilengkapi sarana dan prasarananya**	**Paket UPTD**	**1. 221 2. 1**	**61.812.083.040**	70.032.364.000	-	2.489.875.000	-	4,03
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	15.400.000.000	55.029.635.000	-	1.011.912.000	-	6,57
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	1	30.100.000.000	11.862.629.000	-	1.461.579.000	-	4,86
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1.410.000.000		-		-	0,00
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	11.802.083.040		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	500.000.000		-		-	0,00
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	Dokumen	1	500.000.000	900.100.000	-	0	-	0,00
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3	-		-		-	0,00
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	7	1.400.000.000	2.240.000.000	-	16.384.000	-	1,17
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	100.000.000		-		-	0,00
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	-		-		-	#DIV/0!
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	100.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	1	500.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						-		-	0,00
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-	**91.577.922.196**	10.592.545.780	-	558.481.474	-	0,61
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	-	**47.221.347.196**	1.592.048.280	-	508.557.474	-	1,08
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan	1	45.123.411.196	774.093.450	-	97.684.000	-	0,22
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	2241	305.000.000	53.038.230	-	16.162.474	-	5,30

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	10000	150.000.000		-		-	0,00
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton	10	400.000.000		-		-	0,00
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	7200	380.000.000		-		-	0,00
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram	1	35.000.000		-		-	0,00
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	10000	35.000.000		-		-	0,00
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	96	792.936.000	764.916.600	-	394.711.000	-	49,78
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	**Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**Laporan**	**1**	**44.356.575.000**	9.000.497.500	-	49.924.000	-	0,11
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	310.000.000		-		-	0,00
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	24.307.075.000	7.455.000.000	-	1.290.000	-	0,01
		Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan	1	100.000.000		-		-	0,00
		Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan	1	4.409.500.000	1.545.497.500	-	48.634.000	-	1,10
		Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	1	15.100.000.000		-		-	0,00
		Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan	1	100.000.000		-		-	0,00
		Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	laporan	1	-		-		-	0,00
		Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	1	30.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								-	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)**	**%**	**2**	**5.425.000.000**	**1.110.903.602**	-	**71.688.900**	-	1,32

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Kesejahteraan Hewan	**Terkendalinya Pemotongan Betina Produktif di RPH/TPH**	**Kasus**	**1**	**300.000.000**	56.285.000	0,04	16.482.500	4,00	5,49
		Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	1	300.000.000	56.285.000	-	16.482.500	-	5,49
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	**Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan yang Tersertifikasi**	**Unit Usaha**	**10**	**500.000.000**	370.643.750	-	24.079.450	-	4,82
		Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	10	300.000.000	73.211.050	**5,00**	19.039.450	50,00	6,35
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	200.000.000	297.432.700	5,00	5.040.000	500,00	2,52
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	**Jumlah Unit usaha produk peternakan/RPH/RPU/TPH diawasi**	**Laporan**	**1**	**100.000.000**	**51.108.000**	-	**471.000**	-	0,47
		Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	100.000.000	51.108.000	**-**	471.000	-	0,47
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah PHMS yang dikendalikan**	**Jenis**	**6**	**4.525.000.000**	**632.866.852**	-	**30.655.950**	-	0,68
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	10	1.150.000.000	69.306.000	**-**	3.043.000	-	0,26
		Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	1	250.000.000	35.187.300	9,00	0	900,00	0,00
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	1.150.000.000	85.633.300	-	5.336.700	-	0,46
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	1	1.400.000.000	404.260.252	-	15.698.250	-	1,12
		Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	100	575.000.000	38.480.000	-	6.578.000	-	1,14
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						-			

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP**	**A Katagori**	**A**	**39.520.181.371**	**27.083.448.587**	25	**12.808.244.978**	-	32,41
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**320.125.000**	**54.932.000**	**2,00**	**8.950.000**	50,00	2,80
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	28.750.000	11.483.000	2,00	0	200,00	0,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	57.500.000	36.135.000	2,00	6.750.000	200,00	11,74
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	181.125.000	7.314.000	-	2.200.000	-	1,21
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	52.750.000				-	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**Laporan**	**1**	**735.250.000**	**41.190.000**	**1,00**	**4.817.000**	100,00	0,66
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	172.500.000				-	0,00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	86.250.000	34.266.200	-	2.406.000	-	2,79
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	91.250.000	5.183.800	-	2.171.000	-	2,38
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	171	57.500.000				-	0,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	171	172.500.000				-	0,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	143.750.000				-	0,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	171	11.500.000	1.740.000	-	240.000	-	2,09
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**%**	**98**	**22.336.128.378**	**21.510.908.787**	**38,12**	**10.348.866.957**	38,90	46,33
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	48.875.000				-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	364.316.993				-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	191.125.000	27.973.400	-	9.288.500	-	4,86
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	57.500.000				-	0,00
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	86.250.000	22.660.800	-	4.395.000	-	5,10
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	527.500.000	212.451.800	-	49.870.000	-	9,45
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	171	21.060.561.385	21.247.822.787	176,00	10.285.313.457	102,92	48,84
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun**	**Dokumen**	**2**	**57.500.000**	13.791.000	**1,00**	3.795.000	50,00	6,60
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	28.750.000	13.791.000	-	3.795.000	-	13,20
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	28.750.000				-	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**%**	**100**	**885.750.000**	**202.853.180**	**56,67**	**114.964.640**	56,67	12,98
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	57.500.000				-	0,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	130.000.000	12.384.000	-	6.925.000	-	5,33
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	528	17.250.000	1.396.000	100,00	0	18,94	0,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	38.750.000	3.726.430	25,00	1.594.000	50,00	4,11
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10000	48.750.000	14.010.000	2.010,00	1.392.000	20,10	2,86
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	53.500.000	13.702.700	30,00	4.815.000	150,00	9,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	207.500.000	3.047.050	3,00	250.000	30,00	0,12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	332.500.000	154.587.000	1,00	99.988.640	100,00	30,07

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Unit**	**21**	**1.323.373.000**	**343.364.000**	**6,00**	**55.954.672**	28,57	4,23
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	575.000.000				-	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30.000.000	6.364.000		0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	205.873.000	127.446.000	3,00	37.971.552	300,00	18,44
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	512.500.000	209.554.000	2,00	17.983.120	10,00	3,51
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah BMD yang diadakan**	**Unit**	**1**	**6.957.066.993**	**209.000**	**-**	**187.000**	-	0,00
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.230.000.000				-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	287.500.000				-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	864.566.993	187.000		187.000	-	0,02
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	57.500.000	22.000		0	-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	57.500.000				-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	230.000.000				-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	230.000.000				-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)**	**%**	**100**	**5.086.738.000**	**4.635.975.060**	**50,00**	**2.188.475.659**	50,00	43,02
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	550.000.000	560.756.000	2,00	159.347.159	200,00	28,97
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4.150.238.000	4.066.907.560	-	2.028.234.500	-	48,87
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	287.500.000				-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	99.000.000	8.311.500	1,00	894.000	100,00	0,90
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan yang dihasilkan**	**Dokumen**	**7**	**1.818.250.000**	280.225.560	**15,00**	82.234.050	214,29	4,52
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1.200.000.000		3,00		300,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	28.750.000	12.211.000	2,00	0	200,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	28.750.000	14.661.000	-	500.000	-	1,74
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	28.750.000	6.657.800	2,00	5.257.800	200,00	18,29
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	195.750.000	61.040.800	-	61.040.800	-	31,18
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	28.750.000	5.365.200	6,00	0	600,00	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	307.500.000	87.216.960	2,00	13.998.250	200,00	4,55
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**1. Meningkatnya Populasi Ternak** **2. Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)**	**Ekor** **%**	**1. 62.344.636** **2. 75**	**925.000.000**		-		-	0,00
		Penataan Prasarana Pertanian	**1. Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian (%)** **2. Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian**	**%** **%**	**1. 75** **2. 75**	**925.000.000**		-		-	0,00
		Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)	Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	Unit	1	200.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Unit	1	725.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						-			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas**	**ekor**	**62.344.636**	**20.972.818.657**	**6.121.013.682**	**50.705.312**	**295.196.775**	81,33	1,41
		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	**Terlaksananya pengawasan Distributor Obat Hewan**	**Laporan**	**1**	**230.000.000**	**35.622.652**		**2.536.000**	-	1,10
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	172.500.000	35.622.652	0,25	2.536.000	25,00	1,47
		Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	1	57.500.000				-	0,00
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan dan Hijauan Pakan Ternak**	**Laporan**	**1**	**1.000.000.000**	**130.400.000**	**-**	**19.895.200**	-	1,99
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	1.000.000.000	130.400.000	-	19.895.200	-	1,99
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Laporan**	**1**	**2.402.500.000**	**1.065.021.280**	**0**	**171.003.875**	-	7,12
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	1	172.500.000	123.080.000	-	9.820.875	-	5,69
		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	1	2.000.000.000	797.310.800	-	155.785.000	-	7,79
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	1	230.000.000	144.630.480	-	5.398.000	-	2,35
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	**Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Dokumen**	**1**	**887.500.000**	408.754.950	**-**	38.357.200	-	4,32

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	300.000.000	269.992.500	-	12.080.000	-	4,03
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	1	300.000.000	138.762.450	-	26.277.200	-	8,76
		Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	10	287.500.000				-	0,00
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	**Tersedian bibit dan benih ternak yang unggul**	**ekor**	**5010**	**16.452.818.657**	**4.481.214.800**		**63.404.500**	-	0,39
		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis	100000	900.000.000	98.595.200		930.000	-	0,10
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	5000	14.802.818.657	67.665.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	2	750.000.000	4.314.954.600	-	62.474.500	-	8,33
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)**	**%**	**80**	**2.372.500.000**	**367.821.000**	42,77	**46.818.100**	53,46	1,97
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	**Jumlah Kelompok berbasis Korporasi dikembangkan**	**Koorporasi**	**3**	**647.500.000**	**156.155.300**	2,00	**14.558.600**	66,67	2,25
		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	2	302.500.000	58.063.500	1,00	8.950.600	50,00	2,96
		Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	3	345.000.000	98.091.800	2,00	5.608.000	66,67	1,63
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	**Produk hasil peternakan yang dipamerkan**	**Laporan**	**1**	**1.725.000.000**	**211.665.700**	1,00	**32.259.500**	100,00	1,87
		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	1.725.000.000	211.665.700	**1,00**	32.259.500	100,00	1,87
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**Dokumen**	**4**	**575.000.000**	-			-	0,00
		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	**-**	**-**	**-**	**230.000.000**	-			-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	1	230.000.000	-			-	0,00
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**4**	**345.000.000**	-			-	0,00
		Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit	3	345.000.000	-			-	0,00
	Pusat Layanan Digital	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**									
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**% Terintegrasi Kualifikasi**	**80**	**2.543.512.640**	**1.799.195.616**	-	**103.836.000**	-	4,08
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**%Terintegra**	**80**	**2.543.512.640**	**1.799.195.616**	-	**103.836.000**	-	4,08
		Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	1	0		-		-	-
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	131.429.996	81.538.300	-	1.950.000	-	1,48
		Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/ko	3	0		-		-	#DIV/0!
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	unit	55	78.251.645		-		-	0,00
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	27.051.000	23.000.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	200	101.800.000	519.000.000	150	0	75,00	0,00
		Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	1	31.250.000	28.600.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	1	17.729.999	4.000.000	-	0	-	0,00
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	2	175.000.000	275.550.000	1	9.600.000	50,00	5,49
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Dae	18	1.000.000.000		-		-	0,00
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1	662.000.000	514.250.000	6	87.120.000	600,00	13,16
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	30	28.000.000	274.500.000	12	1.500.000	40,00	5,36
	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**272.276**	**20.490.083.857**	2.310.610.600	-	348.000	-	0,00
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	**Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan**	**Ton**	**242.276**	**3.685.000.000**	1.607.143.800	-	48.000	-	0,00
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	65.000.000	2.143.800	-	48.000	-	0,07
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2	520.000.000	1.605.000.000	-	0	-	0,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	55	3.100.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (DBH Cukai) (Pajak Rokok)	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	-	-	0		-		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap**	**Unit**	**170**	**175.000.000**		-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	55.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendsi	300	110.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Dokumen	1	10.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berizin**	**Unit**	**60**	**40.000.000**		-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendsi	1	20.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterdaftar**	**Unit**	**550**	**50.000.000**		-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	500	30.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Kelautan dan Perikanan	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM**	**Uunit**	**1 Unit**	**16.380.083.857**	**701.888.000**	-	**120.000**	-	0,00
		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	1	160.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	4	16.020.083.857		-		-	0,00
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	20	200.000.000	701.888.000	-	120.000	-	0,06
		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	**Persetujuan penerbitan izin Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)**	**Izin/ Persetujuan**	**60**	**40.000.000**		-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	60	20.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Izin/ Persetujuan**	**60**	**40.000.000**		-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendsi	60	20.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	**Jumlah kapal perikanan di atas 10GT sampai dengan 30 GT**	**Unit**	**60**	**40.000.000**		-		-	0,00
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000		-		-	0,00
		Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendsi	60	20.000.000		-		-	0,00
		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar**	**Unit**	**60**	**40.000.000**	**1.578.800**	-	**180.000**	-	0,45
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	20.000.000	1.578.800	-	180.000	-	0,90
		Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendsi	60	20.000.000				-	0,00
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi**	**%**	**70**	**593.600.000**	139.344.600		48.048.866	-	8,09
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi**	**%**	**70**	**593.600.000**	139.344.600	48,53	48.048.866	69,33	8,09
		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	5	51.650.000	26.786.900	-	9.883.330	-	19,14
		Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	49	359.000.000	64.250.000	-	19.500.000	-	5,43
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	100	64.170.000	38.850.000	-	18.665.536	-	29,09
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	100	70.750.000	3.950.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	10	48.030.000	5.507.700	-	0	-	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Peningkatan Promosi Pariwisata Provinsi**	**Tahun**	**1**	**4.500.000.000**	1.431.500.000		483.947.915	-	10,75
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	**Terpenuhinya Sarana Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik di Dalam dan Luar Negeri**	**Tahun**	**1**	**4.500.000.000**	1.431.500.000		483.947.915	-	10,75
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	12	1.000.000.000	808.000.000	4	445.224.790	33,33	44,52
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	12	1.250.000.000	205.065.000	0	4.714.725	-	0,38
PD-4 Pembangunan Kesejahteraan		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	10	2.250.000.000	418.435.000	1	34.008.400	10,00	1,51
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Perlindungan HAKI**	**Tahun**	**1**	**1.000.000.000**	244.000.000		59.801.000	-	5,98
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	**Meningkatnya Sarana Ruang Kreasi dan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Tahun**	**1**	**1.000.000.000**	244.000.000		59.801.000	-	5,98
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	12	370.000.000	140.000.000	3	53.873.000	25,00	14,56
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	6	330.000.000	31.000.000	0	5.928.000	-	1,80
		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	12	300.000.000	73.000.000	0	0	-	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata**	**Orang**	**50**	**500.000.000**	375.825.000	-	14.910.648	-	2,98
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	**Meningkatnya SDM Pariwisata dan Keterampilan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Orang**	**50**	**500.000.000**	163.375.000	-	4.150.000	-	0,83
		Fasiltasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidanfq					48.350.000	-	0	-	-
	Dinas Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi pengembangnan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				**-**	81.775.000	-	0	-	-
						-				-	-
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	100	250.000.000	33.250.000	-	4.150.000	-	1,66
		Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	100	250.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**-**	**-**	**-**	**2.520.000.000**	2.103.396.600		82.705.500	-	3,28
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Pelaku Pariwisata**	**Tahun**	**1**	**200.000.000**	42.800.000	-	23.260.000	-	11,63
		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	100	200.000.000	42.800.000	-	23.260.000	-	11,63
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Lokasi**	**1**	**70.000.000**	7.500.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	5	70.000.000	7.500.000	-	0	-	0,00
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	**Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**lokasi**	**4**	**2.000.000.000**	1.859.896.600	-	48.095.500	-	2,40

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	4	200.000.000		-		-	0,00
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	10	300.000.000	193.610.000	-	37.825.000	-	12,61
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	20	1.500.000.000	1.066.286.600	-	10.270.500	-	0,68
		Perencanaan destinasi pariwisata provinsi					600.000.000	-	0	-	#DIV/0!
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	**-**	**-**	**-**	**250.000.000**	193.200.000	-	11.350.000	-	4,54
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	8	250.000.000	193.200.000	-	11.350.000	-	4,54
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**		-		-	0,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	**Persentase Pemenuhan SPM SPALD Lintas Kab/Kota**	**Persen**	**100**	**200.000.000**		-		-	0,00
		Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/Kota	1	200.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	4	-		-		-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota**	**Persentase**	**100**	**64.115.267.035**	0	-	0	-	0,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**-**	**64.115.267.035**	0	-	0	-	0,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	2	30.907.633.517	0	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	30	30.907.633.518	0	-	0	-	0,00
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	10	300.000.000	0	-	0	-	0,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	4	2.000.000.000	0	-	0	-	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN									
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**-**	**-**	**-**	**19.609.382.000**	**14.309.950.000**	-	**31.475.000**	-	0,16
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	**Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan**	**Ton/hari**	**450**	**19.609.382.000**	**14.309.950.000**	-	**31.475.000**	-	0,16
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari	450	6.000.000.000	14.309.950.000	-	31.475.000	-	0,52
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Liter/Detik	350	7.609.382.000		-		-	0,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangg	300	6.000.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya**	**%**	**15**	**14.662.832.412**	4.601.160.500		1.161.932.000	-	7,92
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	**Jumlah rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan**	**Rekomendasi**	**10**	**105.000.000**	6.189.500	3	195.000	30,00	0,19
		Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	5	105.000.000	6.189.500	3	195.000	60,00	0,19
	Dinas Sosial	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Persentase keluarga fakir miskin dan Rentan lintas kab/kota yang mandiri secara sosial ekonomi**	**%**	**15**	**14.557.832.412**	4.594.971.000	-	1.161.737.000	-	7,98
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	2000	6.157.832.412	4.585.971.000	-	1.161.737.000	-	18,87

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	1000	350.000.000	9.000.000	-	0	-	0,00
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	2500	8.050.000.000		-		-	0,00
	UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**-**	**-**	**-**	**2.520.000.000**	**2.103.396.600**	-	**82.705.500**	-	3,28
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Pelaku Pariwisata**	**Tahun**	**1**	**200.000.000**	**42.800.000**	-	**23.260.000**	-	11,63
		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	100	200.000.000	42.800.000	-	23.260.000	-	11,63
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Lokasi**	**1**	**70.000.000**	7.500.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	5	70.000.000	7.500.000	-	0	-	0,00
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	**Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**lokasi**	**4**	**2.000.000.000**	1.859.896.600	-	48.095.500	-	2,40
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	4	200.000.000		-		-	0,00
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	10	300.000.000		-		-	0,00
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	20	1.500.000.000	1.066.286.600	-	10.270.500	-	0,68
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	**-**	**-**	**-**	**250.000.000**	**193.200.000**	**1**	**11.350.000**	-	4,54

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	8	250.000.000	193.200.000	1	11.350.000	12,50	4,54
PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Kepuasan Masyarakat** **Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi**	**%** **%**	**100** **80**	**6.500.298.089**	4.856.197.800	-	1.864.934.190	-	28,69
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi** **Persentase Kepuasan Masyarakat**	**%** **%**	**80** **100**	**6.500.298.089**	4.856.197.800	-	1.864.934.190	-	28,69
		Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	90	1.285.000.000	572.200.000	100	214.751.900	111,11	16,71
		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1	1.466.668.000	1.087.097.800	-	547.640.290	-	37,34
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	10	225.000.000	40.000.000	-	0	-	0,00
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	10	236.500.000	98.300.000	-	61.017.000	-	25,80
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	100	103.410.089	63.900.000	100	300.000	100,00	0,29
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	1	-		-		-	-
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	45	90.000.000	7.600.000	-	1.225.000	-	1,36
		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	500	182.920.000	86.100.000	187	0	37,40	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	1	2.910.800.000	2.901.000.000	0	1.040.000.000	-	35,73
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial**	**%**	**10**	**7.876.611.966**	**12.607.757.616**	5	1.441.186.551	50,00	18,30
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional		**2**			4		200,00	0,00
			Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis		**18**			17		94,44	0,00
			Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	**%**	**30**			0		-	0,00
		Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis**	**orang**	**90**	**538.722.930**	**12.607.757.616**	180	1.441.186.551	200,00	267,52
			Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis	**dokumen**	**9**			38		422,22	0,00
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	3	103.079.045	**173.129.045**	16	24.755.000	533,33	24,02
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	3	83.934.185	**51.531.685**	16	9.300.000	533,33	11,08
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	90	280.709.600	**1.859.491.200**	180	172.669.571	200,00	61,51

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi.	Dokumen	3	71.000.100	**177.033.750**	6	23.403.600	200,00	32,96
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN**	**orang**	**250**	**7.337.889.036**	**10.346.571.936**	-	**1.211.058.380**	-	16,50
			Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	**Orang**	**1.113**			687		61,73	-
			Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	**Dokumen**	**51**			27		52,94	-
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembang Kompetensi.	Dokumen	10	175.000.000	90.000.000	11	24.126.230	110,00	13,79
		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	3	59.170.400	66.670.400	1	15.682.100	33,33	26,50
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	Orang	250	229.450.000	296.950.000	0	0	-	0,00
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	6	280.386.736	555.386.736	5	73.926.210	83,33	26,37
		Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	15	337.034.100	404.534.100	5	8.527.490	33,33	2,53
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatn Fungsional yang Disusun	Dokumen	7	34.000.000	17.945.900	2	0	28,57	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikui Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan,	Orang	1113	6.150.882.000	8.699.669.000	687	1.062.779.460	61,73	17,28
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabtan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Jabatan	Dokumen	10	71.965.800	215.415.800	3	26.016.890	30,00	36,15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	#DIV/0!
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP Lingkup OPD**		**A**	**19.153.282.095**	18.952.383.959	BB	8.472.523.797	-	44,24
			Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	**%**	**10**					-	#DIV/0!
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah**	**Dokumen**	**36**	**440.229.350**	202.944.350	11	84.656.950	30,56	19,23
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	191.029.450	45.434.450	2	15.888.950	100,00	8,32
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	64.191.950	63.596.950	2	46.489.000	200,00	72,42
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	35.294.000	34.699.000	0	1.513.000	-	4,29
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	26	24.389.000	24.484.000	4	10.573.000	15,38	43,35
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	125.324.950	34.729.950	3	10.193.000	50,00	8,13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi**	**Dok**	**31**	**15.292.520.061**	**15.357.258.660**	9	**7.165.690.149**	29,03	46,86
				org	**88**			88		100,00	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	88	15.062.736.061	15.223.069.660	88	7.117.035.549	100,00	47,25
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	159.470.000	63.885.000	3	21.187.600	25,00	13,29
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun SKPD	Laporan	1	40.675.000	40.675.000	1	16.323.000	100,00	40,13
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	29.639.000	29.629.000	5	11.144.000	27,78	37,60
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah**	**Laporan**	**4**	**43.105.000**	**43.105.000**	1	**16.700.000**	25,00	38,74
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	43.105.000	43.105.000	1	16.700.000	25,00	38,74
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah sarana prasarana Disiplin Pegawai**	**unit**	**1**	**50.000.000**		0		-	0,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	50.000.000		0		-	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah ketersediaan**	**Paket**	**83**	**401.806.365**	**471.226.365**	9	**81.608.869**	10,84	20,31
			Administrasi umum perangkat daerah	**dok/laporan**	**47**			14		29,79	0,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	71.639.225	71.639.225	5	13.933.250	50,00	19,45
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	70	58.257.140	47.250.000	0	0	-	0,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	62.257.140	2	23.509.920	200,00	587,75
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10.000.000	5.000.000	2	900.000	100,00	9,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	15.660.000	7.830.000	2	3.390.000	100,00	21,65
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	242.250.000	277.250.000	12	39.875.699	26,67	16,46
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**Unit**	**26**	**200.110.000**	158.043.265	5	44.700.000	19,23	22,34
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	55.000		0		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	25.000.000	0	0	-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	175.000.000	133.043.265	5	44.700.000	21,74	25,54
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	55.000		0		-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**1.950.836.319**	**2.047.991.319**	100	**957.285.636**	100,00	49,07
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.500.000	750.000	0	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	632.132.319	730.037.319	6	314.424.636	50,00	49,74
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.317.204.000	1.317.204.000	6	642.861.000	50,00	48,80
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**Unit**	**159**	**774.675.000**	**671.815.000**	11	**121.882.193**	6,92	15,73
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	160.720.000	25.000.000	1	8.602.000	4,76	5,35
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	90.000.000	112.860.000	5	52.835.193	83,33	58,71
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	129	242.010.000	252.010.000	5	60.445.000	3,88	24,98
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	281.945.000	281.945.000	0	0	-	0,00
		PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	%	80			65,96%		0,82	0,00
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang memiliki Posyandu Aktif Minimal 90%	%	80			20		25,00	0,00
		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten /Kota yang di advokasi dan disfasilitasipengembangan Posyandu aktif:	Kab/Kota	7			0		-	0,00
		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih & Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Prov	Persentase Puskesmas yang dibina PHBS	%	17			0		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyelengga raan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi penggerkan masy dan media edukasi.	Dokumen	1			0		-	0,00
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah UKBM Aktif	UKBM	7645			5.162		67,52	0,00
		Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan Bimbingan Teknis UKBM	Kab/Kota	10			7		70,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**125.712.346.354**		**31.965.187.059**	-	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian ibu 7% (1)**	**%**				**-**		-	0,00
			Persentase Kabupaten/ Kota dengan penurunan kasus kematian Bayi 5% per tahun (2)	%				**-**		-	0,00
			Persentase kabupaten kota yang telah melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (3)	%				**-**		-	0,00
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan wilayah kerja (4)	%				**-**		-	0,00
			Persentase Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik (5)	%				**-**		-	0,00
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar (6)	%				**-**		-	0,00
			Persentase Puskesmas yang menerapkan BLUD (7)	%				**-**		-	0,00
			Persentase Balita Wasting (8)	%	8			6,09		76,13	0,00
			Persentse kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (SDG's) (9)	%	15			14,9		99,33	0,00
			Proporsi KK dengan akses sanitasi layak (10)	%						-	0,00
			Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin (11)	%	0,4			36,40%		91,00	0,00
			persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.(SDG's) (12)	%				**-**		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) (13)	%	90			43		47,78	0,00
			Persentase cakupan penemuan & pengobatan kasus TBC (14)	%	90			28,44		31,60	0,00
			Persentase kabupaten/ kota yang mencapai API < 1/1000 (15)	%	10			10		100,00	0,00
			Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (16)	%	0,86			80%		93,02	0,00
			Persentase pengobatan penyakit menular pada balita (17)	%	0,85			95%		111,76	0,00
			Persentase skrining penyakit menular pada kelompok berisiko (18)	%				-		-	0,00
			Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan (19)	%				-		-	0,00
			Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM (20)	%				-		-	0,00
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko PTM (21)	%				-		-	0,00
			Persentase kab/ kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/ wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah (22)	%	100			100		100,00	0,00
			Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/ wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah (23)	%	100			100		100,00	0,00
			persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk pada kondisi KLB provinsi(24)	%	100			100		100,00	0,00
			Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masyarakat Miskin melalui PPI-JK oleh Pemerintah (25)	%				-		-	0,00
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi (26)	%				-		-	0,00
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dengan capaian penilaian Indiakator Mutu Nasional > 81 (27)	%				-		-	0,00
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (28)	%				-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani**	**%**			**19.480.746.467**	**-**	**638.224.094**	-	0,00
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen			664.050.100	**-**	108.145.500	-	0,00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Kasus Kematian ibu dengan penurunan kasus 7% Per tahun (1)**	**Kasus**	**76**		**105.707.201.470**	**36**	**31.137.323.965**	47,37	0,00
			Jumlah Kasus Kematian bayi dengan penurunan kasus 5% Per tahun (2)	kasus	671			359		53,50	0,00
			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (3)	%	100			36		35,69	0,00
			persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM-1) (4)	%	100			33		33,10	0,00
			persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar (SPM-2) (5)	%	100			36		35,69	0,00
			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai Standar (SPM-3) (6)	%	100			32		32,41	0,00
			Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM-4) (7)	%	100			29		28,77	0,00
			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (SPM-5) (8)	%	100			71		71,44	0,00
			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai Standar (SPM-6) (9)	%						-	0,00
			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai Standar (SPM-7) (10)	%	100			49		49,18	0,00
			Jumlah Bayi yang mendapatkan pelayanan pengukuran dan penimbangan berat badan sesuai standar (11)	%						-	0,00
			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar (SPM-8) (12)	%						-	-
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART) (13)	%	90			43		47,78	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
			Persentase cakupan penemuan & pengobatan kasus TBC (14)	%	90			28		31,60	-
			Persentase kabupaten/ kota yang mencapai API < 1/1000 (15)	%	100			100		100,00	-
			Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (16)	%	0,86			1		93,02	-
			Persentase pengobatan penyakit menular pada balita (17)	%	0,85			1		111,76	-
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru (18)	%	0,325			0		97,23	-
			Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta (19)	%	0,4			0		90,75	-
			Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar (20)	%	0,88					-	-
			Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+ (21)	%	0,325			0		99,38	-
			Persentase penduduk berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (22)"	%	100			100		100,00	-
			persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (23)	%	100			100		100,00	-
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV (24)	%	90			50		55,78	-
			Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART (25)	%	90			78		86,67	-
			Persentase keberhasilan pengobatan TBC (26)	%	90			82		91,16	-
			Persentase kabupaten/ kota yang mencapai Positivity Rate (PR) < 5% (27)	%	100			100		100,00	-
			Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (28)	%	0,9			1		90,00	-
			Persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar (29)	%	0,95			1		105,22	-
			Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar (30)	%	0,85			1		111,76	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
			Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko (31)	%	10			10		100,00	-
			Target yang tercantum adalah target IMS (Infeksi Menular seksual) tahun 2024 sesuai RAN 2024, adapun RAN 2025 belum tersedia dan target khusus sifilis 2025 belum di rilis	%	202			86		42,57	-
				%							
			Persentase kabupaten/ kota eliminasi rabies (33)	%	5			0		-	-
			Persentase kabupaten/kota dengan Insiden Rate (IR) DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk (34)	%	10			1		10,00	-
			Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM (35)	%						-	-
			Jumlah kabupaten/ kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas (36)	%						-	-
			Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP (37)	%						-	-
			Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP (38)	%						-	-
			Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (39)	%						-	-
			Persentase kabupaten/ kota yang melakukan pelayanan Upaya Berhenti Merokok (40)	%						-	-
			Persentase penduduk usia > 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining (41)	%	10			1		7,40	-
			Persentase Penyandang Gangguan Jiwa yang Memperoleh layanan di fasyankes (42)	%	90			21		23,81	-
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM-11) (43)	%	100			59		58,54	-
			Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabiltasi medis (44)	Orang	360			542		150,56	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
			Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masyarakat Miskin melalui PPI-JK oleh Pemerintah (45)	%						-	-
			Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute (46)	%						-	-
			Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) >81 (47)	%						-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	**Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar**	**Orang**	**33673**		**5.588.458.500**	**88.671**	**271.517.000**	263,33	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Orang	18816		2.405.024.460	33.602	63.430.000	178,58	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen			627.929.785		122.275.000	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen			303.269.800		88.847.000	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Dokumen			226.220.020		0	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Stunting	Orang			5.578.377.200	45.458	130.436.950	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen			175.000.000		0	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1		1.720.057.700	0	51.610.000	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1		5.227.063.585	0	0	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen			76.000.000		0	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			1.771.055.960		140.860.000	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen			208.436.000		100.507.800	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen			241.567.000		45.360.000	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dgn Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Dokumen			88.500.000		0	-	-
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen			78.950.074.200		29.883.665.215	-	-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan	Dokumen			192.710.000		76.740.000	-	-
		Koordinasi & Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota	Dokumen			214.250.000		35.620.000	-	-
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen			563.510.280		5.340.000	-	-
		Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen			67.500.000		36.840.000	-	-
		Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	1		74.999.980	1	0	100,00	-
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	PSC			90.860.000		46.575.000	-	-
		Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE	RS			920.960.000		0	-	-
		Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Analisa Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1		113.500.000	1	0	100,00	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	Puskesmas			227.077.000		11.100.000	-	-
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang memiliki sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**	**Persen**	**0,35**		**196.306.760**	**0**	**135.309.000**	95,14	-
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen			196.306.760		135.309.000	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang menerapkan tata kelola sesuai standar**	**Persen**			**328.091.657**		**54.330.000**	-	-
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	RS			51.010.000		0	-	-
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	RS			76.660.000		0	-	-
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian Indikator Nasional Mutu (INM) sesuai target tahunan	Puskesmas			200.421.657		54.330.000	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								-	-
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	**%**	**80**		**1.693.359.050**		**76.852.100**	-	-
		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 7 dokter Spesilias di Rumah Sakit	%	80		178.270.000	80,23	49.098.400	100,29	-
			Persentase RSUD Kabupaten/Kota dengan 7 dokter spesialis (4 spesialis dasar dan 3 spesialis Penjenjang) di Provinsi NTB	%	60			66		110,00	-
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minamal 9 Tenaga Kesehatan di pusk dan & Tenaga Pseialis Di Kabupaten/Kota Provinsi NTB	Dokumen	1		85.620.000	0	1.750.000	-	-
		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Dokumen	1		92.650.000	-	47.348.400	-	-
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase SDM Kesehatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang meningkat**	**%**	**4,5**		**1.515.089.050**	-	**27.753.700**	-	-
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1		1.420.109.050	-	0	-	-
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	1		94.980.000	-	27.753.700	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						-		-	-
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						-			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat**	**%**			**63.780.000**	-	**4.320.000**	-	-
		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	**Persentase PBF dan PAK yang memenuhi syarat**	**Unit**	**100**		**61.740.000**	-	**4.320.000**	-	-
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Unit	37		61.740.000	19	4.320.000	51,14	-
		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	**Persentase UKOT yang memenuhi syarat**	**%**	**100**		2.040.000,00	**7**	**0**	7,00	-
		Pengendalian Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	%	4		2.040.000,00	0	0	-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						0			
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional** **Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional**	**%** **%**	**10** **4**	**66.286.422.223**	72.004.933.531	-	32.088.382.312	-	48,41
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**Jumlah prasarana olahraga di provinsi yang dikelola**	**Unit**	**2**	**11.821.869.648**	5.918.223.925	-	7.539.825	-	0,06
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Unit	1	11.821.869.648	5.918.223.925	-	7.539.825	-	0,06
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	**Jumlah atlet berprestasi yang dibina**	**Orang**	**30**	**3.900.992.325**	-	-	-	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang		100.000.000	-	-	-	-	-
		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	1	3.800.992.325	-	-	-	-	-
		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	100	-	-	-	-	-	-
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi**	**Organisasi**	**20**	**45.000.000.000**	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	3	45.000.000.000	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	**Terlaksananya kejuaraan olahraga**	**Kegiatan**	**5**	**5.563.560.250**	2.819.209.600	-	0	-	0,00
		Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang	170	3.409.085.625	819.209.600	-	0	-	0,00
		Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan	10	2.154.474.625	2.000.000.000	-	0	-	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Jumlah Pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan**	**%**	**4**	**17.063.222.838**	2.972.062.950	-	533.270.500	-	3,13
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasiltasi**	**Organisasi**	**10**	**11.387.500.000**	1.050.000.000,00	-	500.000.000	-	4,39
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase	75	187.500.000	1.050.000.000	-	500.000.000	-	266,67
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi	1	11.200.000.000		-		-	0,00
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	**Jmlah Pemuda Yang Mengikuti Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan**	**Orang**	**340**	**5.675.722.838**	1.922.062.950	-	33.270.500	-	0,59

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	30	300.157.400	152.387.200	-	0	-	0,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Persentase	10	187.500.000		-		-	0,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	100	457.249.945	697.249.900	-	0	-	0,00
		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Orang	160	343.909.775	381.512.800	-	20.539.400	-	5,97
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen	1	159.375.000		-		-	0,00
		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	76	187.500.000		-		-	0,00
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1	4.040.030.718	690.913.050	-	12.731.100	-	0,32
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP**	**% BB (> -) Poin**	**100 BB (>70 - 80)**	**11.974.805.938**	9.245.158.870	-	3.860.168.068	-	32,24
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**-**		-		-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-		-		-	-
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	-		-		-	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	-		-		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Pemuda dan Olahraga	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**Dokumen**	**1**	**-**		-		-	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	-		-		-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	-		-		-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**6.672.207.689**	6.812.463.190	-	2.975.667.935	-	44,60
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	-		-		-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.895.725	11.463.680	-	7.789.600	-	112,96
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	17.918.250	11.712.600	-	0	-	0,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	168.362.775	113.216.780	-	26.202.740	-	15,56
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	-		-		-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	48	6.479.030.939	6.676.070.130	-	2.941.675.595	-	45,40
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	-		-		-	-
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen pendapatan daerah perangkat daerah**	**Dokumen**	**3**	**15.000.000**		-		-	0,00
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	5.000.000		-		-	0,00
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	5.000.000		-		-	0,00
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	5.000.000		-		-	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**1.321.142.500**	398.289.370	-	66.866.245	-	5,06
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	97.500.000	20.000.000	-	9.256.380	-	9,49

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	39.000.000	11.550.000	-	1.163.500	-	2,98
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	72.455.000	27.089.370	-	16.991.465	-	23,45
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	112.187.500		-		-	0,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	-		-		-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	250.000.000		-		-	0,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	750.000.000	177.000.000	-	36.826.000	-	4,91
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Unit**	**30**	**1.659.061.750**	174.995.000	-	86.028.870	-	5,19
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	49.762.500	10.430.000	-	1.578.000	-	3,17
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.413.199.250	45.325.000	-	29.970.000	-	2,12
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-		-		-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	25.000.000	25.000.000	-	14.877.638	-	59,51
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	171.100.000	94.240.000	-	39.603.232	-	23,15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**9**	**-**		-		-	-
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	7	-		-		-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-		-		-	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-		-		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-		-		-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-		-		-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**1.711.368.359**	1.680.228.000	-	709.942.918	-	41,48
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	313.500.000	297.060.000	-	83.992.918	-	26,79
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.390.472.000	1.382.328.000	-	625.950.000	-	45,02
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4.821.359		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.575.000	840.000	-	0	-	0,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**4**	**596.025.640**	179.183.310	-	21.662.100	-	3,63
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	55.000.000	24.408.800	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	55.000.000	18.344.500	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	5.142.300	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	116.025.640	14.124.400	-	10.289.600	-	8,87
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000	4.019.410	-	0	-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	300.000.000	113.143.900	-	11.372.500	-	3,79
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								-	#DIV/0!

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**%**	**100**	**250.000.000**	**126.500.000**		**11.226.000**	-	4,49
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Penetapan CB Tk. Provinsi	%	100	250.000.000	126.500.000		11.226.000	-	4,49
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	3	100.000.000	47.000.000	0	11.226.000	-	11,23
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	3	150.000.000	79.500.000	0	0	-	0,00
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	**Persentase Cagar Budaya yang dikelola**	**%**	**100**	**0**				-	-
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	0	0		0		-	-
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	0		0		-	-
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	0	0		0		-	-
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0		0		-	-
		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	**Persentase Izin membawa CB yang diterbitkan**	**%**	**100**	**0**				-	-
		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek	0	0		0		-	-
		Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan	0	0		0		-	-
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase Pembinaan Sejara**	**%**	**100**	**250.000.000**	**124.727.450**		**5.200.000**	-	2,08
		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	%	40	250.000.000	124.727.450	0	5.200.000	-	2,08
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	105	100.000.000	57.285.000	0	2.670.000	-	2,67
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	0	0		0		-	-
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen	2	150.000.000	0	0	2.530.000	-	1,69
		Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	0	0				-	-
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B**	**: Rasio %**	**1:8 68,16**	**36.297.395.249**				-	0,00
		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-	-	36.297.395.249				-	0,00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	3	100.000.000		1		33,33	0,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	2	36.197.395.249		1		50,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**	**%**	**100 68,16 86**	**695.139.307.801**	**412.530.006.668**		**178.398.072.760**	-	25,66
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	**-**	**-**	**-**	**355.037.304.800**	**214.824.449.052**		**171.812.883.100**	-	48,39
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	600	250.000.000	150.000.000	0	0	-	0,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	0	108.145.000	37	37.327.000	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	950.000.000	307.667.150	0	34.199.000	-	3,60
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	9.360.000	0	0	-	-
		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	350.000.000		0		-	0,00
		Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	4	850.000.000		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	17	5.242.805.000	2.085.158.758	1	929.471.578	5,88	17,73
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	36	11.674.284.000	4.439.062.091	18	2.512.308.296	50,00	21,52
		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	33	10.153.591.000	2.860.815.122	1	1.404.453.438	3,03	13,83
		Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	2	500.000.000		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	1.087.671.000	272.366.367	3	131.202.091	100,00	12,06
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	350.000.000		0		-	0,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	9	2.838.123.000	967.835.540	4	763.410.477	44,44	26,90
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	500.000.000	779.098.300	7	207.101.700	217,67	41,42
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidi	270	900.000.000	200.000.000	30	63.880.000	11,11	7,10
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	844	385.000.000	25.000.000	20	0	2,37	0,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	50	100.000.000		0		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	0		0		-	-
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	6	1.882.027.000	1.182.655.400	0	60.423.000	-	3,21
		Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0		0		-	-
		Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	15	4.719.750.000		0		-	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4	2.000.000.000	977.500.000	0	0	-	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0		0		-	-
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidi	378	269.946.993.800	190.516.000.000	187	160.824.272.000	49,47	59,58
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	600	600.000.000	252.000.000	0	0	-	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	0	57.140.000	77	2.100.000	-	-
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	0	0		0		-	-
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	1000	500.000.000	300.000.000	0	0	-	0,00
		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0		0		-	-
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	0	0	60.000.000	0	0	-	-
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidi	0	0		0		-	-
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0	312.000.000	0		-	-
		Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	2	400.000.000		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0		0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	1.225.269.000	379.744.812	0	234.472.058	-	19,14
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	13	4.022.588.000	1.055.061.815	1	524.623.320	7,69	13,04
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	73	22.077.849.000	5.616.289.109	14	3.098.515.156	19,18	14,03
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	29	8.668.369.000	1.413.097.326	1	854.392.730	3,45	9,86
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	224.241.000	90.055.870	1	31.667.000	100,00	14,12
		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	Unit	2	400.000.000		0		-	0,00
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	2	739.044.000	284.612.092	0	90.173.256	-	12,20
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	2	1.499.700.000	123.784.300	1	8.891.000	59,50	0,59
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	**Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SMK Persentase Lulusan SMK yang terserap**	**% % : Rasio %**	**91,75 82,79 1:1 37,64**	**302.766.678.950**	**180.526.058.066**		**5.699.018.560**	-	1,88
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	26	26.300.000.000	4.575.901.028	13	3.208.387.534	50,00	12,20
		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	35	10.500.000.000	785.745.138	31	451.360.090	88,57	4,30
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	6	1.910.000.000	180.525.656	14	108.677.000	233,33	5,69
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	750.000.000	7.204.700	2	0	66,67	0,00
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	3.125.000.000	517.155.439	13	380.546.997	130,00	12,18
		Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	450.000.000		0		-	0,00
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	450.000.000		0		-	0,00
		Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	350.000.000		0		-	0,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	10	2.295.000.000	48.274.066	0	0	-	0,00
		Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0		0		-	-
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0		0		-	-
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4	1.720.863.000	970.000.000	0	0	-	-
		Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	51	45.387.357.000	41.828.354.180	0	471.328.630	-	1,04
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0		0		-	-
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	103	500.000.000	492.500.000	0	0	-	0,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	529	385.000.000	82.500.000	0	0	-	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	0	0	60.000.000	0	0	-	-
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	400	400.000.000	269.500.000	0	0	-	0,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidi	423	2.913.078.394	507.057.850	79	91.393.000	18,68	3,14
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidi	355	185.468.218.100	127.375.000.000	167	0	46,90	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	0	0		0		-	-
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	50	100.000.000		0		-	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	0	57.140.000	0	0	-	-
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	9.360.000	0	0	-	-
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	750.000.000	127.000.000	0	3.000.000	-	0,40
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	601.497.000	80.371.000	2	6.125.000	154,00	1,02
		Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	50	250.000.000	240.000.000	0	0	-	0,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	0	89.049.800	18	11.778.900	-	-
		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0		0		-	-
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	5	500.000.000	387.297.000	4	108.045.000	86,40	21,61
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	24551	8.592.850.000	290.000.000	0	0	-	0,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	1	180.000.000	9.255.000	1	7.187.000	100,00	3,99
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	7	1.300.000.000		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	20	5.865.000.000	1.143.103.909	21	676.950.109	105,00	11,54
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0		0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
PD-2 Pembangunan Manusia		Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	3	672.815.456	183.763.300	2	174.239.300	66,67	25,90
		Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0		0		-	-
		Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidi	0	0		0		-	-
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	600	250.000.000	210.000.000	0	0	-	0,00
		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	2	450.000.000		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	1	350.000.000		0		-	0,00
		Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0		0		-	-
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	**Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Rata-rata kompetensi Numerasi SLB Rasio Guru terhadap peserta didik SLB Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B Iklim kebinekaan SLB Rata-rata kompetensi Literasi SLB Iklim keamanan SLB Iklim Inklusivitas SLB**	**% % : Rasio % % % % %**	**91,00 61,19 1:5 86,00 79,13 72,05 79,00 81,00**	**37.335.324.051**	**17.179.499.550**		**886.171.100**	-	2,37
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	72.067.000		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	262.071.000		0		-	0,00
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	318.574.000		0		-	0,00
		Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	786.224.544		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang	1	383.455.000		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang	2	405.129.000		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	185.000.000		0		-	0,00
		Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	150.000.000		0		-	0,00
		Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	Ruang	0	0		0		-	-
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	697.715.000		0		-	0,00
		Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	0	0		0		-	-
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	0	0		0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4	1.000.000.000	525.000.000	1	16.921.300	30,00	1,69
		Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3	660.200.000	881.651.000	0	23.865.000	-	3,61
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1	0		0		-	-
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2100	2.153.275.000	2.510.950.000	453	784.735.000	21,57	36,44
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	250	250.000.000	137.500.000	210	42.575.000	84,00	17,03
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0	0	4.000.000	0	0	-	-
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	50	100.000.000	126.999.900	0	0	-	0,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidi	150	700.000.000	105.000.000	0	0	-	0,00
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidi	53	25.945.333.507	12.503.464.000	28	0	51,89	0,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	0	0		0		-	-
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	50	100.000.000		0		-	0,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	0	0		0		-	-
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	24.500.000	0	0	-	-
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	500.000.000	35.000.000	0	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	142.780.000		0		-	0,00
		Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	0	0		0		-	-
		Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	0	0		0		-	-
		Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	0	0		0		-	-
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	0	0		0		-	-
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	400.000.000	148.624.850	4	18.074.800	191,00	4,52
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	64.069.400		0		-	0,00
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	138.560.400		0		-	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	1	1.000.834.000		0		-	0,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidi	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	186.000.000		0		-	0,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0	112.500.000	0	0	-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0		0		-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	153.000.000		0		-	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	145.000.000		0		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang	1	315.383.800		0		-	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	120.652.400		0		-	0,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	0	0	64.309.800	5	0	-	-
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0		0		-	-
		Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang	0	0		0		-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan**	**%**	**100**	**2.790.000.000**	**4.473.896.400**		**519.969.916**	-	18,64
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan**	**%**	**100**	**1.195.876.000**	**2.768.804.400**		**243.192.566**	-	20,34
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	11	250.000.000	1.452.896.400	0	10.540.566	0,91	4,22
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	120	945.876.000	435.298.000	5	62.280.000	4,17	6,58
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	0	0	880.610.000	3	170.372.000	-	-
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	**Persentase sekolah yang dibina**	**%**	**100**	**1.054.124.000**	**1.504.092.000**		**275.277.350**	-	26,11
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	10	1.054.124.000	896.902.000	0	263.788.750	-	25,02
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	0	0	607.190.000	0	11.488.600	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	0	0		0	11.488.600	-	-
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase Pranata Kebudayaan yang mendapatkan Pembinaan**	**%**	**27,43**	**540.000.000**	**201.000.000**		**1.500.000**	-	0,28
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	0	0		0		-	-
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	55	540.000.000		0		-	0,00
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	0	0		0		-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**%**	**100**	**250.000.000**				-	0,00
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina**	**%**	**100**	**250.000.000**	**201.000.000**		**1.500.000**	-	0,60
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	500	250.000.000		1		0,26	0,00
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	0	0		0		-	-
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	0		0		-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**%**	**100**	**250.000.000**	**120.000.000**		**43.064.200**	-	17,23
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina**	**%**	**100**	**250.000.000**	**120.000.000**		**43.064.200**	-	17,23
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	500	250.000.000	120.000.000	0	43.064.200	-	17,23

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	0	0		0		-	-
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	0		0		-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP OPD**	**BB Nilai**	**BB**	**1.223.740.614.228**	**1.348.221.042.583**		**481.043.547.733**	-	39,31
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**12**	**375.000.000**	**111.478.000**		**72.283.000**	-	19,28
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	25.000.000	29.910.000	2	26.580.000	100,00	106,32
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	125.000.000	30.960.000	0	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	125.000.000	29.910.000	2	27.600.000	200,00	22,08
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	0		0		-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	0		0		-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50.000.000	12.476.000	3	11.645.000	100,00	23,29
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	50.000.000	8.222.000	2	6.458.000	100,00	12,92
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun**	**Dokumen**	**7831**	**1.195.789.246.488**	**1.330.931.649.743**		**478.657.209.484**	-	40,03
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	184156	1.195.334.926.488	1.328.795.989.138	106316	478.300.734.034	57,73	40,01
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	404.320.000	2.135.660.605	8,43	356.475.450	70,25	88,17

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7777	20.000.000		0		-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0		0		-	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	30	0		0		-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	30.000.000		0		-	0,00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	0		0		-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**200.000.000**		**0**		-	0,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0		0		-	0,00
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0		0		-	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	150.000.000		2		50,00	0,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	50.000.000		2		100,00	0,00
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	Laporan	24	0		0		-	-
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	12	0		0		-	-
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0		0		-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**Dokumen**	**3**	**225.000.000**	**91.563.700**		**44.732.160**	-	19,88
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	25.000.000		0		-	0,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	100.000.000	56.064.200	1	17.070.000	60,00	17,07
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	100.000.000	35.499.500	1	27.662.160	60,00	27,66

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0		0		-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	0		0		-	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	542	0		0		-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum**	**paket**	**27**	**550.000.000**	**569.428.700**		**92.742.367**	-	16,86
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	25.000.000	9.990.000	0	3.632.000	13,33	14,53
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	75.000.000		0		-	0,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	25.000.000	13.821.500	1	0	8,33	0,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	25.000.000		0		-	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0		0		-	-
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	25.000.000	5.940.000	5	0	100,00	0,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	25.000.000	5.635.000	12	2.286.900	98,33	9,15
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	300.000.000	301.340.200	1	26.823.467	50,00	8,94
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0		0		-	-
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	232.702.000	1	60.000.000	60,00	120,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan**	**unit**	**29**	**100.000.000**				-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	100.000.000		0		-	0,00
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**-**	**-**	**-**	**3.571.675.740**	**3.921.389.440**		**1.749.468.114**	-	48,98
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0		0		-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	466.746.820	808.504.800	32	284.868.114	265,33	61,03
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0		0		-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.104.928.920	3.112.884.640	33	1.464.600.000	275,08	47,17
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Unit**	**154**	**680.680.500**	**425.080.000**		**169.698.340**	-	24,93
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	595.680.500	425.080.000	53	169.698.340	177,39	28,49
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	65.000.000		0		-	0,00
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	20.000.000		0		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		0		-	-
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**-**	**-**	**-**	**22.249.011.500**	**11.878.362.000**		**0**	-	0,00
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	11	22.249.011.500	11.878.362.000	0	0	-	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								-	-
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah**	**%**	**100**	**500.000.000**	30.730.100	20	2.846.000	20,00	0,57
		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	**Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam**	**Eksemplar**	**300**	**200.000.000**	7.955.500	0	432.000	-	0,22
		Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	10	100.000.000		0		-	0,00
		Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	300	100.000.000	7.955.500	0	432.000	-	0,43
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	**Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah**	**Eksemplar**	**10**	**100.000.000**	11.961.600	**0**	1.300.000	-	1,30
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	10	50.000.000	5.359.200	0	500.000	-	1,00
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	10	50.000.000	6.602.400	0	800.000	-	1,60
		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	**Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi**	**Eksemplar**	**500**	**100.000.000**	10.813.000	**0**	1.114.000	-	1,11
		Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	300	50.000.000	4.719.000	0	1.114.000	-	2,23
		Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	1600	50.000.000	6.094.000	500	0	31,25	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	**Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia**	**Eksemplar**	**250**	**100.000.000**		**0**		-	0,00
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	250	100.000.000		0		-	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca**	**%**	**100**	**3.250.000.000**	1.171.984.700	**25**	161.130.500	25,00	4,96
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca**	**Lokus**	**3**	**305.000.000**	223.565.000	**0**	8.000.000	-	2,62
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-TempatUmum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	1		18.000.000	1	8.000.000	100,00	0,00
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	25	300.000.000	57.565.000	0	0	-	0,00
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	2	5.000.000	148.000.000	0	0	-	0,00
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan**	**Perpustakaan**	**316**	**2.945.000.000**	948.419.700	**0**	153.130.500	-	5,20
		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen	10000	500.000.000	55.052.200	4729	15.458.000	47,29	3,09
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	300	250.000.000		0		-	0,00
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	1	5.000.000		0		-	0,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	10000	1.025.000.000	230.573.000	300	1.490.000	3,00	0,15

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	10	500.000.000	51.630.000	1	16.650.000	10,00	3,33
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar	203	573.000.000	573.000.000	50	119.532.500	24,63	20,86
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	5	15.000.000		0		-	0,00
		Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Indeks	7	250.000.000		0		-	0,00
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	150	200.000.000		0		-	0,00
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	200.000.000	38.164.500	0	0	-	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis**	**%**	**100**	**1.565.000.000**	177.620.400	**40**	13.338.480	40,00	0,85
		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	**Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis**	**Berkas**	**10000**	**965.000.000**	68.758.700	**2500**	10.078.000	25,00	1,04
		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	Laporan	32	150.000.000		0		-	0,00
		Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	Arsip	25	5.000.000		0		-	0,00
		Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	Lembaga	24	10.000.000		0		-	0,00
		Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	46	200.000.000	8.648.100	0	500.000	-	0,25
		Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	Orang	105	50.000.000		0		-	0,00
		Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Arsip	750	100.000.000		0		-	0,00
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Unit	1	100.000.000		0		-	0,00
		Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	24	250.000.000	43.451.500	5	8.879.000	20,83	3,55

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	Arsip	10000	100.000.000	16.659.100	2500	699.000	25,00	0,70
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	**Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan**	**Arsip**	**5000**	**400.000.000**	80.986.700	**500**	350.480	10,00	0,09
		Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	150	100.000.000	5.986.700	10	350.480	6,67	0,35
		Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip	500	100.000.000	75.000.000	0	0	-	0,00
		Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	Arsip	2	100.000.000		0		-	0,00
		Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang	5	100.000.000		0		-	0,00
		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	**Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional**	**Laporan**	**1**	**200.000.000**	27.875.000	**0**	2.910.000	-	1,46
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	10	100.000.000		0		-	0,00
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	150	100.000.000	27.875.000	20	2.910.000	13,33	2,91
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**A Nilai**	**A**	**18.406.627.368**	13.292.919.197		6.039.024.496	-	32,81
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**125.000.000**	22.665.000	**50**	0	50,00	0,00
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	30.000.000	1.050.000	0	0	-	0,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	50.000.000	20.000.000	6	0	50,00	0,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	615.000	0	0	-	0,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	30.000.000	1.000.000	1	0	50,00	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**Dokumen**	**11**	**270.000.000**	3.466.000	**2**	0	18,18	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	30.000.000		0		-	0,00
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	30.000.000	870.000	0	0	-	0,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	30.000.000	930.000	2	0	40,00	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100.000.000	716.000	5	0	50,00	0,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	10	30.000.000	950.000	5	0	50,00	0,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	50.000.000		0		-	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**11.958.578.328**	11.679.194.432	**50**	5.383.660.881	50,00	45,02
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	50.000.000	4.183.850	1	0	50,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	50.000.000	12.040.000	1	10.080.000	100,00	20,16
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	28.239.475	1.217.000	9	0	50,00	0,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	50.000.000	8.376.600	6	0	50,00	0,00
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	30.000.000		0		-	0,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	250.000.000	24.120.000	6	0	50,00	0,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	86	11.470.338.853	11.629.256.982	86	5.373.580.881	100,00	46,85
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	30.000.000		0		-	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**1.210.000.000**	108.281.050	**50**	19.492.045	50,00	1,61

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	200.000.000	13.000.000	25	3.135.000	50,00	1,57
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500	50.000.000	838.500	250	0	50,00	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1500	50.000.000	7.200.000	500	1.260.000	33,33	2,52
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	35	50.000.000	34.132.550	35	2.910.850	100,00	5,82
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	60.000.000	6.600.000	25	217.500	50,00	0,36
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	100.000.000	8.385.000	10	1.980.600	50,00	1,98
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	100.000.000		0		-	0,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	600.000.000	38.125.000	15	9.988.095	50,00	1,66
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Unit**	**147**	**2.013.000.000**	137.408.000	**8**	28.678.520	5,44	1,42
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	200.000.000		0		-	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	500.000.000	788.000	1	0	1,00	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	50.000.000	1	4.000.000	33,33	1,33
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000		0		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	300.000.000		0		-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	25.000.000	25.000.000	1	11.736.195	100,00	46,94
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	388.000.000	61.620.000	5	12.942.325	12,50	3,34

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**64**	**900.000.000**	29.920.000	**0**	0	-	0,00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	200.000.000				-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	600.000.000	29.920.000	0	0	-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50.000.000		0		-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50.000.000		0		-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**1.295.049.040**	1.146.517.560	**50**	559.817.550	50,00	43,23
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	470.000.000	403.015.000	6	196.823.050	50,00	41,88
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	824.049.040	743.502.560	6	362.994.500	50,00	44,05
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1.000.000		0		-	0,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**12**	**635.000.000**	165.467.155	**8**	47.375.500	66,67	7,46
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	300.000.000	68.828.755	4	43.480.000	100,00	14,49
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	21.339.400	0	892.800	-	1,79
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	50.000.000	19.728.500	2	0	100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	30.000.000	7.605.750	1	0	100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	25.000.000	5.233.350	10	0	50,00	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	30.000.000	6.682.600	2	0	100,00	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	150.000.000	36.048.800	0	3.002.700	-	2,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase Peningkatan kunjungan Museum**	**%**	**50**	**1.800.000.000**	**1.448.885.000**		**350.399.158**	-	19,47
		Pengelolaan Museum Provinsi	**Persentase Koleksi museum yang dikelola**	**%**	**50**	**1.800.000.000**	**1.448.885.000**		**350.399.158**	-	19,47
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit	3000	535.700.000	454.326.400	1.200	127.371.558	40,00	23,78
	Museum Negeri	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	30	122.290.200	26.162.500	0	0	-	0,00
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	10	826.888.800	649.525.900	5	121.545.300	50,00	14,70
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	10	246.971.000	243.899.800	6	93.982.300	60,00	38,05
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	10	68.150.000		1		10,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase SPM mencapai target**	**%**	**83,5**	**75.236.597.195**	80.781.851.622		12.609.998.697	-	16,76
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**%**	**100**	**74.786.597.195**	80.781.851.622	-	12.609.998.697	-	16,86
		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	200	956.902.857		0		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	250	54.507.232.338	46.677.632.672	-	7.967.197.967	-	14,62
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	Paket	9	12.000.000.000	10.000.000.000	-	2.930.797.780	-	24,42
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	7.322.462.000	24.104.218.950	1	1.712.002.950	100,00	23,38
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**%**	**100**	**450.000.000**		-		-	0,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	40	450.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP OPD**	**BB Nilai**	**BB**	**134.740.492.805**	130.705.847.258		58.922.610.209	-	43,73
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**39.763.012.805**	36.860.601.978	416	17.478.964.684	416,00	43,96
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	200	39.763.012.805	36.860.601.978	416	17.478.964.684	208,00	43,96
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**	**%**	**7**	**82.544.280.000**	82.544.280.000	7	37.503.366.098	100,00	45,43
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	82.544.280.000	82.544.280.000	1	37.503.366.098	100,00	45,43
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**12.433.200.000**	11.300.965.280	100	3.940.279.427	100,00	31,69
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2.100.000.000	500.000.000	3	390.684.650	100,00	18,60
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10.333.200.000	10.800.965.280	12	3.549.594.777	100,00	34,35

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah**	**%**	**90**	**16.059.676.191**	21.559.676.191	54	0	60,00	0,00
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit**	**%**	**90**	**16.059.676.191**	21.559.676.191	54	0	60,00	0,00
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	34	3.600.820.491	3.600.820.491	68	0	200,00	0,00
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	Paket	12	3.000.000.000				-	0,00
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	3 Gedung 23 unit	12.458.855.700	17.958.855.700	40	0	-	0,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	500	2.698.800.809				-	0,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	3	230.000.000				-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**	**%**	**100**	**33.542.074.189**	36.415.467.752	3	10.145.066.136	3,00	30,25
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**250.000.000**				-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Rumah Sakit Mandalika	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	90	250.000.000				-	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**	**%**	**100**	**14.539.988.832**	19.303.070.952	3	8.034.772.874	3,00	55,26
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	250	14.539.988.832	19.303.070.952	3	8.034.772.874	1,20	55,26
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**776.000.000**					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	100.000.000				-	0,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	226.000.000				-	0,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	450.000.000				-	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**468.000.000**				-	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	360.000.000				-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	13	108.000.000				-	0,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	**-**	**-**					
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	-				-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	-				-	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-				-	-
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD**	**%**	**90**	**12.021.489.183**	12.021.000.000	25	0	27,78	0,00
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	12.021.489.183	12.021.000.000	25	0	2.500,00	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**5.486.596.174**	5.091.396.800		2.110.293.262	-	38,46
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	895.199.374	500.000.000	9	195.824.230	25,00	21,87

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.591.396.800	4.591.396.800	3	1.914.469.032	25,00	41,70
	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS yang memenuhi sa	Persen	80	6.500.000.000	5.000.000.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang memenuhi sa	Persen	80	6.500.000.000	5.000.000.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penun	Unit	6	0	5.000.000.000	-	0	-	-
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,	Paket	20	5.000.000.000		-		-	0,00
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainny	Unit	1	1.500.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**34.259.467.873**	36.338.494.376	-	16.374.785.158	-	47,80
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**15.307.711.905**	16.484.726.208	-	8.024.022.345	-	52,42
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	154	15.307.711.905	16.484.726.208	48	8.024.022.345	31,17	52,42
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**16.500.000.000**	18.000.000.000	-	7.420.533.913	-	44,97
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	16.500.000.000	18.000.000.000	50	7.420.533.913	5.000,00	44,97
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**2.451.755.968**	1.853.768.168	-	930.228.900	-	37,94
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	883.655.968	285.668.168	75	146.178.900	2.500,00	16,54
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.568.100.000	1.568.100.000	50	784.050.000	5.000,00	50,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan**	**%**	**100**	**2.790.000.000**	**4.473.896.400**		**519.969.916**	-	18,64
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan**	**%**	**100**	**1.195.876.000**	**2.768.804.400**		**243.192.566**	-	20,34
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	11	250.000.000	1.452.896.400	0	10.540.566	0,91	4,22
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	120	945.876.000	435.298.000	5	62.280.000	4,17	6,58
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	0	0	880.610.000	3	170.372.000	-	-
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	**Persentase sekolah yang dibina**	**%**	**100**	**1.054.124.000**	**1.504.092.000**		**275.277.350**	-	26,11
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	10	1.054.124.000	896.902.000	0	263.788.750	1,00	25,02
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	0	0	607.190.000	0	11.488.600	-	-
		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	0	0		0		-	-
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase Pranata Kebudayaan yang mendapatkan Pembinaan**	**%**	**27,43**	**540.000.000**				-	0,00
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	0	0		0		-	-
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	55	540.000.000	607.190.000	0	11.488.600	0,18	2,13

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	0	0		0		-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**-**	**-**	**-**	**2.170.724.600**				-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**0**				-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	30.960.000	0	0	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	29.910.000	0	27.600.000	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0		0	0,1	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0		0	0,1	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	12.476.000	0	11.645.000	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	8.222.000	0	6.458.000	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun**	**Dokumen**	**1**	**35.760.000**				-	0,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	35.760.000		6		600,00	0,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0		0		-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0		0		-	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0		0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Taman Budaya	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0		0		-	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0		0		-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0**	**0**				-	-
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0		0		-	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0		0		-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0		0		-	-
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**0**				-	-
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	0	0		0		-	-
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	0	0		0		-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**0**				-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0		0		-	-
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0		1		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0		1		-	-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0		0		-	-
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0		0		-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	**0**		**0**		-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0		0		-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD**	**Laporan**	**12**	**2.030.104.600**		**0**		0,83	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0		**0**		-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	462.304.600		11		91,67	0,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0		0		-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.567.800.000		11		91,67	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Unit**	**10**	**104.860.000**				-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	94.860.000		5		50,00	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000		0		-	-
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		0		-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		0		-	-
	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								-	-
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro**	***% (Persen)***	***500%***	***101.332.300***	1.482.332.300		327.644.100	-	323,34
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase pemberdayaan pelaku usaha menjadi perusahaan rintisan**	***% (Persen)***	***500%***	***101.332.300***	1.482.332.300	-	327.644.100	-	323,34
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	2500	55.510.000	55.510.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	250	45.822.300	1.426.822.300	-	327.644.100	-	715,03
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	0	-		-		-	-
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								-	-
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**-**	**-**	**-**	**-**		-		-	-
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	***Persentase SDM yang ditingkatkan Pengetahuan Perkoperasian***	***%***	***0***	**-**		-		-	-
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	0	-		-		-	-
	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								-	-
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market	**%**	**100**	**340.000.000**	**104.400.000**	-	**9.428.000**	-	2,77
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi**	**Komoditi**	**140**	**340.000.000**	**104.400.000**	-	**9.428.000**	-	2,77
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	70.000.000	15.900.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	50.000.000	20.000.000	-	0	-	0,00
		Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1	70.000.000	13.400.000	-	3.838.000	-	5,48
		Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	30	150.000.000	55.100.000	-	5.590.000	-	3,73
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								-	-
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								-	-
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)**	**%**	**2.24**	**1.470.000.000**	**351.200.000**	**-**	**8.500.000**	-	0,58
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	**Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi□**	**Kecamatan**	**8**	**1.395.000.000**	**305.100.000**	**-**	**7.900.000**	-	0,57
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	50.000.000	14.600.000	-	5.000.000	-	10,00
		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	625.000.000		-		-	0,00
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	670.000.000	290.500.000	-	2.900.000	-	0,43
		Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	1	50.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	**Dokumen Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**Dokumen**	**1**	**75.000.000**	**46.100.000**	**-**	**600.000**	-	0,80
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	75.000.000	46.100.000		600.000	-	0,80
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	#DIV/0!
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	#DIV/0!
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP PD**	**Point**	**81.27**	**8.942.726.000**	**8.369.880.977**	**-**	**3.771.775.185**	-	42,18
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**2**	**20.000.000**	**6.000.000**	**-**	**970.000**	-	4,85
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000		-		-	0,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15.000.000	6.000.000	-	970.000	-	6,47

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Ketahanan Pangan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Serapan Anggaran**	**%**	**95**	**6.816.726.000**	**7.194.926.977**	**-**	**3.242.232.765**	-	47,56
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20.000.000	14.000.000	-	13.550.000	-	67,75
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	5.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	40.000.000	30.700.000	-	11.425.000	-	28,56
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	52	6.751.726.000	7.150.226.977	-	3.217.257.765	-	47,65
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Administrasi Umum**	**Jenis**	**6**	**267.000.000**	**100.250.000**	**-**	**35.488.503**	-	13,29
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	6.750.000	-	0	-	0,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	25.000.000	6.000.000	-	3.730.000	-	14,92
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.500.000		-		-	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	20.000.000	7.500.000	-	3.300.000	-	16,50
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000		-		-	0,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	2.500.000	-	500.000	-	7,14
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	6.000.000	-	300.000	-	2,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	18.000.000	-	6.436.000	-	32,18
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	150.000.000	53.500.000	-	21.222.503	-	14,15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**45**	**269.000.000**	**66.260.000**	**-**	**27.327.328**	-	10,16
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	15.000.000	7.760.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		-		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	200.000.000	58.500.000	-	27.327.328	-	13,66
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Paket**	**4**	**200.000.000**	**1.150.000**	**-**	**0**	-	0,00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	900.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	90.000.000	250.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35.000.000	-	-	-	-	#VALUE!
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	9	915.000.000	-	-	-	-	#VALUE!
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	190.000.000	-	-	-	-	#VALUE!
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	700.000.000	-	-	-	-	#VALUE!
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15.000.000	-	-	-	-	#VALUE!
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000	-	-	-	-	#VALUE!
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Dokumen**	**30**	**455.000.000**	**148.292.000**	**-**	**69.685.633**	-	15,32
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	175.000.000	52.272.000	-	43.205.633	-	24,69
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	14.000.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	15.000.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000	9.500.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70.000.000	23.520.000	-	9.000.000	-	12,86
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000	12.000.000	-	0	-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	70.000.000	22.000.000	-	17.480.000	-	24,97
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								-	#DIV/0!
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**%**	**84.1**	**2.000.000.000**	181.330.000	-	21.378.100	-	1,07
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	**Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**	**Dokumen**	**1**	**319.000.000**		-		-	0,00
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	1	319.000.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	**Penurunan Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang**	**Dokumen**	**1**	**1.270.000.000**	146.361.000	-	18.985.600	-	1,49
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	2	690.000.000	102.730.000	-	12.651.100	-	1,83
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	245.000.000	43.631.000	-	6.334.500	-	2,59
		Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	1	335.000.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	**Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun**	**Dokumen**	**1**	**194.000.000**	34.969.000	-	2.392.500	-	1,23
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	194.000.000	34.969.000		2.392.500	-	1,23
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	**Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang**	**orang**	**400**	**217.000.000**				-	0,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	400	217.000.000				-	0,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								-	#DIV/0!

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**	**%**	**100**	**22.228.103.095**	13.181.805.694		3.029.617.395	-	13,63
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	**-**	**-**	**-**	**2.418.500.000**	806.061.100		898.676.700	-	37,16
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	24	106.000.000	25.000.000		0	-	0,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	7.500.000	3.600.000	30	300.000	25,00	4,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	150.000.000	46.380.000	30	4.340.000	25,00	2,89
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	740.000.000	308.700.000	30	8.190.000	25,00	1,11
		Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	120	45.000.000	25.000.000	30	5.175.000	25,00	11,50
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	20.000.000	31.212.400	30	21.200.000	25,00	106,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	55.000.000	35.685.000	30	1.998.500	25,00	3,63
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	1.220.000.000	289.383.700	30	4.550.000	25,00	0,37
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	75.000.000	41.100.000	30	21.060.000	25,00	28,08
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	**Persentase Layanan Kesos kepada Anak Terlantar dalam Panti**	**%**	**100**	**8.894.734.600**	5.479.299.200	100	988.921.500	100,00	11,12
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	540.000.000	290.327.000	145	90.450.800	145,00	16,75

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	3.770.000.000	2.485.470.000		80.675.000	-	2,14
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	59.659.600	24.956.800	145	5.300.000	145,00	8,88
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	1.020.600.000	663.054.500	145	77.179.250	145,00	7,56
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	60.500.000	20.000.000	145	12.780.000	120,83	21,12
		Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	120.000.000	90.200.000	145	45.000.000	145,00	37,50
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	195.107.000	136.320.000	80	29.914.200	80,00	15,33
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	2.610.000.000	1.365.065.000	145	513.246.750	120,83	19,66
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	312.678.000	253.503.400	145	99.715.000	120,83	31,89
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	206.190.000	150.402.500	145	34.660.500	120,83	16,81
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	-	-	**2.271.823.495**	**797.288.785**	30	**109.905.545**	-	4,84
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	88	84.000.000	32.000.000		20.828.000	-	24,80
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	88	12.480.000	1.400.000	30	0	34,09	0,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	105	138.720.000	98.400.000	30	15.350.000	28,57	11,07
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	105	650.558.339	378.953.800	30	18.500.000	28,57	2,84

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Sosial	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	88	40.000.000	16.000.000	30	2.485.000	34,09	6,21
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	105	11.400.840	35.616.965	30	4.887.800	28,57	42,87
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	88	14.328.256	7.701.720	30	1.487.200	34,09	10,38
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	1.200.000.000	144.625.000	30	38.040.545	25,00	3,17
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	105	120.336.060	82.591.300	30	8.327.000	28,57	6,92
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	**-**	**-**	**-**	**3.450.775.000**	**2.592.378.009**		**965.300.150,00**	-	27,97
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	28.800.000				-	0,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	150	24.400.000	14.400.000	122	6.000.000,00	81,33	24,59
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	207.895.000	164.400.000	122	73.380.000,00	81,33	35,30
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	150	213.400.000	45.000.000	122	20.580.000,00	81,33	9,64
		Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	110	110.000.000	41.000.000	11	14.200.000,00	10,00	12,91
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	110.000.000	6.641.645	122	0,00	244,00	0,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	251.280.000	226.205.800	122	59.997.000,00	81,33	23,88
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	150	232.000.000	166.535.164	122	46.371.650,00	81,33	19,99

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	2.045.000.000	1.776.000.000	122	674951500	81,33	33,00
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	228.000.000	152.195.400	122	69.820.000	81,33	30,62
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	**Persentase Layanan Kesos kepada kelompok rentan/disabilitas**	**%**	**100**	**5.192.270.000**	**3.506.778.600**		**898.676.700**	-	17,31
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	100.000.000	35.425.700	130	10.030.000	108,33	10,03
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	400	338.300.000	297.182.900	4	37.950.000	1,00	11,22
		Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari					14.400.000	130	0	-	-
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	205	768.752.000	530.390.000	130	105.100.000	63,41	13,67
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	30.000.000	16.000.000	130	9.130.000	130,00	30,43
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	50.000.000	10.000.000	130	1.800.000	108,33	3,60
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	400	980.820.000	627.000.000	18	900.000	4,50	0,09
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	75.948.000	74.260.000	130	0	130,00	0,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	15.000.000	13.000.000	130	5.000.000	108,33	33,33
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	105	2.612.650.000	1.732.290.000	130	700.304.700	123,81	26,80

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	220.800.000	156.830.000	130	28.462.000	108,33	12,89
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								-	-
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi**	**0,00%**	**22,5**	**2.183.148.161**	681.874.850	**12,39**	40.976.750	55,07	1,88
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	**Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas**	**Perusahaan**	**5**	**45.000.000**		0		-	0,00
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	45.000.000		0		-	0,00
		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	**Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai**	**LPK**	**7**	**75.000.000**	281.500.000	0	16.574.250	-	22,10
		Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	7	75.000.000	281.500.000	0	16.574.250	-	22,10
		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	**Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi**	**Orang**	**453**	**2.025.000.000**	399.401.450	**295**	24.402.500	65,12	1,21
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	10	300.000.000	13.000.000	0	2.945.500	-	0,98
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	8	250.000.000		0		-	0,00
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	525	1.475.000.000	386.401.450	0	21.457.000	-	1,45
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah**	**Dokumen**	**1**	**38.148.161**	973.400	0	0	-	0,00
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	38.148.161	973.400	0	0	-	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								-	-
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja**	**%**	**100**	**315.500.000**		0		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan**	**Dokumen**	**2**	**315.500.000**		0		-	0,00
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	50	150.500.000		0		-	0,00
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	10	165.000.000		0		-	0,00
	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								-	-
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								-	-
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)**	**%**	**2.24**	**1.470.000.000**	**351.200.000**	**-**	**8.500.000**	-	0,58
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	**Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi□**	**Kecamatan**	**8**	**1.395.000.000**	**305.100.000**	**-**	**7.900.000**	-	0,57
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	50.000.000	14.600.000	-	5.000.000	-	10,00
		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	625.000.000		-		-	0,00
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	670.000.000	290.500.000	-	2.900.000	-	0,43
		Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	1	50.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	**Dokumen Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**Dokumen**	**1**	**75.000.000**	**46.100.000**	**-**	**600.000**	-	0,80
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	75.000.000	46.100.000	-	600.000	-	0,80
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						-		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market**	**%**	**100**	**340.000.000**	**104.400.000**	**-**	**9.428.000**	-	2,77
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi**	**Komoditi**	**140**	**340.000.000**	**104.400.000**	**-**	**9.428.000**	-	2,77
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	70.000.000	15.900.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	50.000.000	20.000.000	-	0	-	0,00
		Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1	70.000.000	13.400.000	-	3.838.000	-	5,48
		Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	30	150.000.000	55.100.000	-	5.590.000	-	3,73
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						-		-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Stok Cadangan Pangan Masyarakat	%	73.18	250.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	2	250.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	2	250.000.000		-		-	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						-		-	-
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis**	**%**	**275.37**	**2.230.000.000**	**2.704.997.000**	**-**	**18.279.600**	-	0,82
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	**Informasi Pengelolaan dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi**	**Laporan**	**2**	**925.000.000**	**1.973.500.000**	**-**	**0**	-	0,00
		Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1	50.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Ketahanan Pangan	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	60	800.000.000	1.973.500.000	-	0	-	0,00
		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	25	50.000.000	-	-	-	-	-
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	25.000.000	-	-	-	-	-
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis	Laporan	1	455.000.000	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	1	230.000.000	-	-	-	-	-
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	1	50.000.000	-	-	-	-	-
		Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1	50.000.000	-	-	-	-	-
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	50.000.000	-	-	-	-	-
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	50.000.000	-	-	-	-	-
		Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	1	25.000.000	-	-	-	-	-
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	**Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan**	**Dokumen**	**1**	**850.000.000**	**126.000.000**	**-**	**0**	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	1	50.000.000	13.000.000	-	0	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	700.000.000	113.000.000	-	0	-	-
		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	100.000.000		-		-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						-		-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP PD**	**Point**	**81.27**	**8.942.726.000**	**8.369.880.977**	**-**	**3.771.775.185**	-	42,18

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**2**	**20.000.000**	**6.000.000**	**-**	**970.000**	-	4,85
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000		-		-	0,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15.000.000	6.000.000	-	970.000	-	6,47
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Serapan Anggaran**	**%**	**95**	**6.816.726.000**	**7.194.926.977**	**-**	**3.242.232.765**	-	47,56
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20.000.000	14.000.000	-	13.550.000	-	67,75
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	5.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	40.000.000	30.700.000	-	11.425.000	-	28,56
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	52	6.751.726.000	7.150.226.977	-	3.217.257.765	-	47,65
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Administrasi Umum**	**Jenis**	**6**	**267.000.000**	**100.250.000**	**-**	**35.488.503**	-	13,29
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	6.750.000	-	0	-	0,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	25.000.000	6.000.000	-	3.730.000	-	14,92
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.500.000		-		-	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	20.000.000	7.500.000	-	3.300.000	-	16,50
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kanto	Paket	1	2.500.000		-		-	0,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	1	7.000.000	2.500.000	-	500.000	-	7,14
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	6.000.000	-	300.000	-	2,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	18.000.000	-	6.436.000	-	32,18

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	150.000.000	53.500.000	-	21.222.503	-	14,15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**45**	**269.000.000**	**66.260.000**	**-**	**27.327.328**	-	10,16
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	15.000.000	7.760.000	-	0	-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		-		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	200.000.000	58.500.000	-	27.327.328	-	13,66
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Paket**	**4**	**200.000.000**	**1.150.000**	**-**	**0**	-	0,00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	900.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	90.000.000	250.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35.000.000	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	9	915.000.000	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	190.000.000	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	700.000.000	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15.000.000	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000	-	-	-	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Dokumen**	**30**	**455.000.000**	**148.292.000**	**-**	**69.685.633**	-	15,32
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	175.000.000	52.272.000	-	43.205.633	-	24,69
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	14.000.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	15.000.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000	9.500.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70.000.000	23.520.000	-	9.000.000	-	12,86
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000	12.000.000	-	0	-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	70.000.000	22.000.000	-	17.480.000	-	24,97
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						-		-	#DIV/0!
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS Lembaga yang terakreditasi Level A**	**%**	**10**	**7.634.260.001**	9.448.215.780	-	1.994.722.000	-	26,13
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	**1. Persentase SDM kesejahteraan sosial perorangan yang memiliki sertifikasi kompetensi 2. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terakreditasi**	**% %**	**10 10**	**7.584.260.001**	9.445.215.780	-	1.994.722.000	-	26,30
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	100	106.810.000		-		-	0,00
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	150	7.143.600.001	9.316.920.780	-	1.994.722.000	-	27,92
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	50	155.030.000	29.870.000	-	0	-	0,00
PD-3 Pembangunan Lingkungan		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	117	178.820.000	98.425.000	-	0	-	0,00
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah izin Undian Geratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diterbikan**	**Rekomendasi**	**5**	**50.000.000**	**3.000.000**	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	5	50.000.000	3.000.000	-	0	-	0,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial**	**%**	**100**	**2.476.620.000**	1.299.805.000	-	254.689.500	-	10,28
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	**Persentase korban bencana sosial dan alam yang terpenuhi kebutuhan dasar**	**%**	**100**	**2.476.620.000**	1.299.805.000	1040	254.689.500	1.040,00	10,28
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	900	662.070.000	441.305.000	-	184.909.500	-	27,93
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	900	664.550.000	341.000.000	-	69.780.000	-	10,50
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	2000	450.000.000	272.500.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	2000	150.000.000	95.000.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	2000	550.000.000	150.000.000	-	0	-	0,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						-		-	-
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase PMB yang terselesaikan kasusnya**	**%**	**100**	**788.655.090**	414.525.500	-	159.146.263	-	20,18
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	**Jumlah Pekerja Migran Bermasalah dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan**	**Orang**	**500**	**788.655.090**	414.525.500	-	159.146.263	-	20,18

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	400	788.655.090	414.525.500	39	159.146.263	9,75	20,18
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)**	**%**	**100**	**1.050.000.000**	164.130.150		30.575.000	-	2,91
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**Jumlan TMP dan MPN kewenangan Provinsi yang di tingkatkan umur fungsional**	**Lokasi**	**2**	**1.050.000.000**	164.130.150	-	30.575.000	-	2,91
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	1	650.000.000	67.645.150	1	30.575.000	100,00	4,70
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	1	150.000.000	59.485.000	-	0	-	0,00
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	1	250.000.000	37.000.000	-	0	-	0,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**	**%**	**100**	**22.228.103.095**	13.181.805.694	-	3.029.617.395	-	13,63
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	**-**	**-**	**-**	**2.418.500.000**	806.061.100	-	66.813.500	-	2,76
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	24	106.000.000	25.000.000	-	0	-	0,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	7.500.000	3.600.000	30	300.000	25,00	4,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	150.000.000	46.380.000	30	4.340.000	25,00	2,89

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	740.000.000	308.700.000	30	8.190.000	25,00	1,11
		Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	120	45.000.000	25.000.000	30	5.175.000	25,00	11,50
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	20.000.000	31.212.400	30	21.200.000	25,00	106,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	55.000.000	35.685.000	30	1.998.500	25,00	3,63
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	1.220.000.000	289.383.700	30	4.550.000	25,00	0,37
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	75.000.000	41.100.000	30	21.060.000	25,00	28,08
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	**Persentase Layanan Kesos kepada Anak Terlantar dalam Panti**	**%**	**100**	**8.894.734.600**	5.479.299.200	100	988.921.500	100,00	11,12
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	540.000.000	290.327.000	145	90.450.800	145,00	16,75
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	3.770.000.000	2.485.470.000		80.675.000	-	2,14
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	59.659.600	24.956.800	145	5.300.000	145,00	8,88
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	1.020.600.000	663.054.500	145	77.179.250	145,00	7,56
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	60.500.000	20.000.000	145	12.780.000	120,83	21,12
		Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	120.000.000	90.200.000	145	45.000.000	145,00	37,50
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	195.107.000	136.320.000	80	29.914.200	80,00	15,33

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	2.610.000.000	1.365.065.000	145	513.246.750	120,83	19,66
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	312.678.000	253.503.400	145	99.715.000	120,83	31,89
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	206.190.000	150.402.500	145	34.660.500	120,83	16,81
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	**-**	**-**	**-**	**2.271.823.495**	797.288.785	30	109.905.545	-	4,84
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	88	84.000.000	32.000.000		20.828.000	-	24,80
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	88	12.480.000	3.600.000	30	300.000	34,09	2,40
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	105	138.720.000	46.380.000	30	4.340.000	28,57	3,13
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	105	650.558.339	308.700.000	30	8.190.000	28,57	1,26
		Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	88	40.000.000	25.000.000	30	5.175.000	34,09	12,94
		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	105	11.400.840	31.212.400	30	21.200.000	28,57	185,95
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	88	14.328.256	35.685.000	30	1.998.500	34,09	13,95
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	1.200.000.000	289.383.700	30	4.550.000	25,00	0,38
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	105	120.336.060	41.100.000	30	21.060.000	28,57	17,50

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	**-**	**-**	**-**	**3.450.775.000**	2.592.378.009		965.300.150	-	27,97
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	28.800.000				-	0,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	150	24.400.000	14.400.000	122	6.000.000	81,33	24,59
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	150	207.895.000	164.400.000	122	73.380.000	81,33	35,30
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	150	213.400.000	45.000.000	122	20.580.000	81,33	9,64
		Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	110	110.000.000	41.000.000	11	14.200.000	10,00	12,91
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	110.000.000	6.641.645	122	0	244,00	0,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	150	251.280.000	226.205.800	122	59.997.000	81,33	23,88
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	150	232.000.000	166.535.164	122	46.371.650	81,33	19,99
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	150	2.045.000.000	1.776.000.000	122	674.951.500	81,33	33,00
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	150	228.000.000	152.195.400	122	69.820.000	81,33	30,62
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	**Persentase Layanan Kesos kepada kelompok rentan/disabilitas**	**%**	**100**	**5.192.270.000**	3.506.778.600		898.676.700	-	17,31
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	100.000.000	35.425.700	130	10.030.000	108,33	10,03
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Dokumen	400	338.300.000		4		1,00	0,00
		Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari					14.400.000	130	0		

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	205	768.752.000	530.390.000	130	105.100.000	63,41	13,67
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	30.000.000	16.000.000	130	9.130.000	130,00	30,43
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	50.000.000	10.000.000	130	1.800.000	108,33	3,60
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	400	980.820.000	627.000.000	18	900.000	4,50	0,09
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	75.948.000	74.260.000	130	0	130,00	0,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	15.000.000	13.000.000	130	5.000.000	108,33	33,33
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	105	2.612.650.000	1.732.290.000	130	700.304.700	123,81	26,80
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	220.800.000	156.830.000	130	28.462.000	108,33	12,89
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	persen point persen	23,6 338,5 4,98	**2.964.500.000**	2.436.932.600		598.622.292	-	20,19
		Mutasi dan Promosi ASN	**Nilai Aspek Promosi dan Mutasi**	**point**	**30**	**770.000.000**	**1.078.109.900**		**195.258.486**	-	25,36
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	275.000.000	154.040.000	1	68.322.000	50,00	24,84
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	110.000.000	77.240.000	0	33.117.346	-	30,11
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	385.000.000	846.829.900	1	93.819.140	12,50	24,37
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan**	**point**	**40**	**1.067.000.000**	668.162.700		195.117.460	-	18,29

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Badan Kepegawaian Daerah	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	16.500.000	-	-	-	-	-
		Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	1	16.500.000	-	-	-	-	-
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	33.000.000	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	220.000.000	47.500.000	-	17.862.460	-	8,12
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	440.000.000	299.462.700	0	137.095.000	-	31,16
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	38.500.000	47.500.000	-	11.510.000	-	29,90
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	38.500.000		-		-	0,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	165.000.000	273.700.000	0	28.650.000	-	17,36
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	38.500.000		-		-	0,00
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	1	16.500.000		-		-	0,00
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	1	27.500.000		-		-	0,00
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	16.500.000		-		-	0,00
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Indeks Kualifikasi ASN**	**persen**	**13,6**	**759.000.000**	**429.240.000**		169.616.346	-	22,35
		Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1	16.500.000	-	-	-	-	-
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1	27.500.000	-	-	-	-	-
		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1	27.500.000	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	1	27.500.000	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	20	27.500.000	-	-	-	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	20	27.500.000	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	27.500.000	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	2	27.500.000	-	-	-	-	-
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	20	38.500.000	72.150.000	3	14.870.000	15,00	38,62
		Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	27.500.000	52.600.000	2	11.900.000	200,00	43,27
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	385.000.000	246.760.000	1	129.096.346	33,33	33,53
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	27.500.000		-		-	0,00
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	400	27.500.000	5.630.000	-	1.850.000	-	6,73
		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	20	27.500.000	52.100.000	0	11.900.000	-	43,27
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	1	16.500.000		-		-	0,00
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Indeks Kinerja ASN**	**persen**	**24,4**	**368.500.000**	**261.420.000**		38.630.000	-	10,48
			Indeks Disiplin ASN	**persen**	**4,98**					-	-
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	2	16.500.000	-	-	-	-	-
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	12	16.500.000	-	-	-	-	-
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	16.500.000	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	132.000.000	94.040.000	0	9.055.000	-	6,86
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1	27.500.000	-	-	-	-	-
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	20	38.500.000	114.680.000	3	16.075.000	15,00	41,75
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	38.500.000	52.700.000	20	13.500.000	10,00	35,06
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	27.500.000	-	-	-	-	-
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	200	38.500.000	-	-	-	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	16.500.000	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terkait BMD**	**%**	**100**		**4.255.102.469**		**642.001.000**	-	-
			Persentase peningkatan objek BMD pada BPKAD yang menghasilkan retribusi	%	2			-0.12		-	-
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun**	**Dokumen**	**2**		**4.255.102.469**		**642.001.000**	-	-
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1		109.992.900	0	18.840.000	-	-
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1		48.578.800	0	40.146.000	-	-
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1		64.612.600	0	37.970.000	-	-
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4		33.605.400	0	0	-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1		807.575.700	0	27.000.000	-	-
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1		1.043.068.134	0	0	-	-
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1		382.435.000	0	34.749.000	-	-
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2		220.150.000	0	0	-	-
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1		5.880.000	0	0	-	-
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	37		1.416.451.150	9	424.796.000	24,32	-
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	166		95.573.200	41	58.500.000	24,70	-
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2		22.810.000	0	0	-	-
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	272		4.369.585	0	0	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan**	**%**	**20**		**998.174.776.484**		**348.544.908.900**	-	-
			Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan	%	10			18		179,18	-
			Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi Infrastruktur	%	40			30		75,13	-
			Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi pengawasan	%	0,6			0		35,60	-
			Tingkat kepatuhan ketentuan alokasi kebencanaan	%	1			2		229,12	-
			Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	%	100			0		-	-
			Persentase Penerbitan SP2D dari Jumlah SPM yang diverifikasi	%	100			100		100,00	-
			Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	%	100			100		100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen	8		2.658.692.250	0	976.104.686	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2		88.339.000	0	0	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2		70.875.300	0	0	-	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42		17.005.000	0	0	-	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	126		10.779.100	42	0	33,33	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42		9.275.000	42	9.275.000	100,00	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	126		2.827.500	42	0	33,33	-
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2		446.691.200	0	0	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	5		617.688.000	1	357.712.300	20,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	5		1.361.727.350	0	609.117.386	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	210		33.484.800	0	0	-	-
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**30**		**733.025.500**	**0**	**169.387.506**	-	-
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	10		151.096.400	0	0	-	-
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	10		138.074.500	0	0	-	-
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	10		151.408.100	0	13.145.500	-	-
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	10		164.730.800	7	119.986.250	70,00	-
		Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	1		67.313.650	0	11.631.106	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2		60.402.050	0	24.624.650	-	-
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun**	**Dokumen**	**155**		**342.061.800**	**36**	**159.672.226**	23,23	-
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12		151.380.900	3	72.041.124	25,00	-
		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1		2.379.400	1	1.499.700	100,00	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	288		45.438.000	72	33.540.000	25,00	-
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	20		6.989.700	7	0	35,00	-
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	260		2.945.000	90	0	34,62	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	14		22.352.600	4	7.591.702	28,57	-
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1		15.477.300	0	4.980.000	-	-
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12		47.128.000	3	35.970.000	25,00	-
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1		42.370.500	0	3.450.000	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10		5.600.400	25	599.700	250,00	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu**	**Dokumen**	**3**		**746.470.680**	**3**	**125.642.760**	100,00	-
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	252		98.793.380	75	15.000.000	29,76	-
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18		35.856.000	4	0	22,22	-
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7		232.052.000	7	98.400.000	100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2		223.767.300	2	12.242.760	100,00	-
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1		68.059.000	0	0	-	-
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		25.507.000	0	0	-	-
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	84		10.831.000	0	0	-	-
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	22		51.605.000	0	0	-	-
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersusun**	**Dokumen**	**14**		**993.425.607.654**	**0**	**347.016.765.122**	-	-
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	13		33.656.621.056	0	18.071.486.102	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	10		683.500.000	0	0	-	-
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	10		161.606.865.872	1	40.000.000	10,00	-
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4		797.478.620.726	0	328.905.279.020	-	-
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang Tersusun**	**Dokumen**	**3**		**268.918.600**	**0**	**97.336.600**	-	-
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2		61.760.500	0	37.806.000	-	-
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1		105.828.650	0	25.383.300	-	-
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	50		101.329.450	0	34.147.300	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		40.032.935.680	-	17.263.913.284	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8		541.200.150	3	95.483.425	37,50	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		185.489.575	2	40.890.025	66,67	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		93.171.500	1	722.500	100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		66.139.000	0	0	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		22.889.500	1	0	100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		14.825.000	0	0	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		56.967.500	1	27.000.000	100,00	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		101.718.075	1	26.870.900	100,00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun**	**Laporan**	**1**		**30.086.358.704**	**1**	**13.262.056.283**	100,00	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	160		29.689.608.439	160	13.133.878.043	100,00	-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1500		26.806.300	375	11.034.600	25,00	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	24		245.214.600	6	71.641.725	25,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1		59.199.115	1	20.367.465	100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4		48.210.000	1	18.320.000	25,00	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	8		17.320.250	1	6.814.450	12,50	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**		**155.936.000**	**3**	**66.198.400**	25,00	-
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3		26.980.000	2	10.370.000	66,67	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12		39.380.000	3	17.629.700	25,00	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1		89.576.000	0	38.198.700	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur**	**Orang**	**30**		**2.897.688.900**	**0**	**1.607.650.100**	-	-
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2		158.868.000	2	33.200.000	100,00	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12		40.917.000	3	17.189.700	25,00	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5		99.000.000	0	0	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100		2.591.303.900	25	1.557.260.400	25,00	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5		7.600.000	0	0	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia**	**Jenis**	**8**		**1.955.911.066**	**7**	**734.684.398**	87,50	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8		49.139.000	2	8.628.500	25,00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27		29.011.500	6	14.190.300	22,22	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25		612.529.650	5	93.072.195	20,00	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50		99.000.000	12	13.645.000	24,00	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1		594.240.000	1	372.040.825	100,00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85		306.721.416	25	209.548.578	29,41	-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	140000		96.834.500	35000	23.559.000	25,00	-
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5		168.435.000	0	0	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**15**		**203.688.300**	**0**	**0**	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50		201.823.300	0	0	-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		1.865.000	0	0	-	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0			0		-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia**	**Jasa**	**4**		**3.451.477.560**	**4**	**1.361.062.126**	100,00	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1		23.625.000	1	5.259.000	100,00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1		1.261.210.000	1	321.502.626	100,00	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1		120.016.000	1	33.110.000	100,00	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1		2.046.626.560	1	1.001.190.500	100,00	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Jenis**	**6**		**740.675.000**	**3**	**136.778.552**	50,00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	19		25.000.000	8	9.997.528	42,11	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50		415.170.000	9	105.041.024	18,00	-
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	200		44.000.000	0	7.160.000	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20		207.035.000	2	0	10,00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		49.470.000	0	14.580.000	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4			0		-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar**	**%**	**100**	**9.097.692.475**				-	0,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**21.188.000**				-	0,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	21.188.000				-	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**100**	**70.467.235**				-	0,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	146	70.467.235				-	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**73.583.500**	80.380.441.788	29.376.007.382		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15.344.000	57.798.700	38.842.300		-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	26.103.000	10.266.600	4.156.300		-	0,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	32.136.500	429.927.200	140.927.400		-	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**968.685.000**		3.837.269.608		-	0,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	33.000.000				-	0,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	110.000.000				-	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	104.400.000				-	0,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	117.509.000				-	0,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	29.806.000				-	0,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	120.700.000				-	0,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	453.270.000				-	0,00
		Fasilitasi Keprotokolan	**Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi keprotokolan**	**%**	**100**	**5.354.920.000**	4.984.559.430	1.638.428.964		-	0,00
		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	960 / 12	616.920.000	851.575.000	26.758.255		-	0,00
	Biro Umum	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	1200 / 12	670.800.000	1.255.570.000	398.830.000		-	0,00
		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	2600 / 12	4.067.200.000	2.877.414.430	1.212.840.709		-	0,00
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	**Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan**	**%**	**100**	**1.270.200.000**	**1.269.103.720**	425.092.056		-	0,00
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	44.040.000	43.299.000	7.200.000		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	12	917.250.000	856.887.000	326.616.606		-	0,00
		Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	2000	308.910.000	368.917.720	91.275.450		-	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**117.000.000**				-	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	92	117.000.000				-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya kualitas layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**1.036.087.240**				-	0,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.019.892.240				-	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	16.195.000				-	0,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**%**	**100**	**185.561.500**				-	0,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	49.217.000				-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	13.592.500				-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	13.635.000				-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	13.492.000				-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	40.794.000				-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	13.895.000				-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	40.936.000				-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP PD**	**Point**	**81.27**	**8.942.726.000**	**8.369.880.977**	-	**3.771.775.185**	-	42,18

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**2**	**20.000.000**	**6.000.000**	-	**970.000**	-	4,85
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000		-		-	0,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15.000.000	6.000.000	-	970.000	-	6,47
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Serapan Anggaran**	**%**	**95**	**6.816.726.000**	**7.194.926.977**	-	**3.242.232.765**	-	47,56
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20.000.000	14.000.000	1	13.550.000	100,00	67,75
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	5.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	40.000.000	30.700.000	-	11.425.000	-	28,56
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	52	6.751.726.000	7.150.226.977	49	3.217.257.765	94,23	47,65
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Administrasi Umum**	**Jenis**	**6**	**267.000.000**	**100.250.000**	-	**35.488.503**	-	13,29
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	6.750.000	-	0	-	0,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	25.000.000	6.000.000	-	3.730.000	-	14,92
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.500.000		-		-	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	20.000.000	7.500.000	-	3.300.000	-	16,50
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000		-		-	0,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	2.500.000	-	500.000	-	7,14
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	6.000.000	-	300.000	-	2,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	18.000.000	-	6.436.000	-	32,18

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	150.000.000	53.500.000	-	21.222.503	-	14,15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**45**	**269.000.000**	**66.260.000**	-	**27.327.328**	-	10,16
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	15.000.000	7.760.000	-	0	-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		-		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	200.000.000	58.500.000	-	27.327.328	-	13,66
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**Paket**	**4**	**200.000.000**	**1.150.000**	-	**0**	-	0,00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	900.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	90.000.000	250.000	-	0	-	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	9	915.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	190.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	700.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000		-		-	0,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Dokumen**	**30**	**455.000.000**	**148.292.000**	-	**69.685.633**	-	15,32
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	175.000.000	52.272.000	9	43.205.633	40,91	24,69
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	14.000.000	-	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	15.000.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000	9.500.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70.000.000	23.520.000	2	9.000.000	100,00	12,86
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000	12.000.000	-	0	-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	70.000.000	22.000.000	-	17.480.000	-	24,97
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	#DIV/0!
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD**	**Tahun**	**1**	**24.511.076.512**	15.438.996.581	-	6.937.112.455	-	28,30
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Aset Barang MIlik Daerah yang tervalidasi baik**	**Laporan**	**4**	**250.000.000**	43.931.200	-	19.980.000	-	7,99
		KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD				-	18.221.000		9.630.000	-	#DIV/0!
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	200.000.000	25.710.200	-	10.350.000	-	5,18
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50.000.000		-		-	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Pelathan Peningkatan SDM Aparatur Sipel Negara**	**Orang**	**80**	**230.000.000**	**15.110.550**	-	0	-	0,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	30.000.000	8.590.800	-	0	-	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50.000.000	6.519.750	-	0	-	0,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	150.000.000		-		-	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Penatausahaan Administasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntable**	**Tahun**	**1**	**10.264.470.349**	**9.902.380.181**	-	4.575.344.791	-	44,57

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Pariwisata	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	200.000.000	11.853.195	-	6.000.000	-	3,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	250.000.000		-		-	0,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	200.000.000	32.053.350	1	8.411.500	50,00	4,21
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	300.000.000	126.933.000	2	27.061.400	16,67	9,02
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	9.314.470.349	9.731.540.636	-	4.533.871.891	-	48,68
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran**	**Tahun**	**1**	**5.230.000.000**	**461.234.560**	-	**212.062.000**	-	4,05
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	2.510.000.000	109.100.000	5	17.510.000	25,00	0,70
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	220.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	6.432.700	-	1.908.900	-	1,27
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	225.000.000	6.375.000	1	3.162.700	2,00	1,41
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	4.590.000		1.995.000	-	3,99
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	600.000.000	17.515.510	2	9.009.000	2,00	1,50
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	175.000.000	3.721.350		1.966.000	-	1,12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.300.000.000	313.500.000	1	176.510.400	10,00	13,58
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah yang memerlukan Pemeliharaan**	**Tahun**	**1**	**884.784.923**	**294.400.000**		**69.908.269**	-	7,90
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	400.000.000	131.010.000	1	8.864.968	1,67	2,22
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	200.000.000	14.100.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	234.784.923	149.290.000	1	61.043.301	4,76	26,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Dokumen pengadaan Barang Milik Daerah**	**Tahun**	**1**	**1.180.000.000**		-		-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1.180.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Tahun**	**1**	**5.151.821.240**	**4.638.782.240**	-	**2.021.588.295**	-	39,24
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.280.000.000	1.187.700.000	1	406.177.610	8,33	31,73
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.251.821.240	3.270.582.240	1	1.615.010.685	8,33	49,66
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	600.000.000	180.000.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	20.000.000	500.000	-	400.000	-	2,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD yang Tepat Waktu**	**Tahun**	**1**	**1.320.000.000**	**83.157.850**	-	**38.229.100**	-	2,90
						-					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		1		100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
						-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	320.000.000		1		50,00	0,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Perdagangan	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting**	**%**	**80**	**500.000.000**	25.500.000	-	7.990.000	-	1,60
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor**	**Pertimbangan Teknis**	**6**	**100.000.000**	8.000.000	1	3.550.000	16,67	3,55
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	100.000.000	8.000.000	1	3.550.000	16,67	3,55
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	**Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor**	**Pertimbangan Teknis**	**7**	**100.000.000**	7.500.000	1	2.190.000	14,29	2,19
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	7	100.000.000	7.500.000	1	2.190.000	14,29	2,19
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	**Jumlah Dokumen Pendukung Ekspor yang diterbitkan Bagi Eksportir**	**Dokumen**	**100**	**100.000.000**				-	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	50	100.000.000				-	0,00
		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	**Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali**	**Pelaku Usaha**	**6**	**200.000.000**	10.000.000	1	2.250.000	16,67	1,13

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	100.000.000	5.500.000	3	2.250.000	50,00	2,25
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	6	100.000.000	4.500.000		0	-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai LAKIP Perangkat Daerah**	**BB Point**	**BB**	**43.184.313.577**	**33.314.926.202**	**-**	**15.321.612.340**	-	35,48
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**54.240.000**	**55.923.000**		**18.950.000**	-	34,94
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	54.240.000	55.923.000	3	18.950.000	25,00	34,94
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**25.388.896.532**	26.562.561.158		12.792.031.892	-	50,38
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	53.617.868	39.144.000	1	36.337.500	100,00	67,77
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	544.386.788	447.240.000	-	134.170.000	-	24,65
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	320	24.790.891.876	26.076.177.158	-	12.621.524.392	-	50,91
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**1.742.488.290**	**986.159.744**	**-**	**241.645.196**	-	13,87
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	66.500.000	29.250.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	202.433.399	306.960.000	3	31.095.000	25,00	15,36
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	122.370.058	94.438.203	3	31.635.930	25,00	25,85
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	166.561.404	123.780.221	3	40.756.810	25,00	24,47
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	304.841.652	73.576.300	3		25,00	0,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	80.245.725	44.825.020	3	19.612.000	25,00	24,44

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Dinas Sosial	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	53.999.178	11.150.000	3	1.497.500	25,00	2,77
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	745.536.874	302.180.000	3	95.590.106	25,00	12,82
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	**8.311.239.808**	**1.022.331.000**		**295.204.888**	-	3,55
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	99.532.872	48.981.000	3	9.191.000	20,00	9,23
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	7.177.442.195	304.500.000		16.200.000	-	0,23
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	584.223.118	367.940.000	3	163.823.669	50,00	28,04
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	450.041.623	300.910.000	6	105.990.219	16,22	23,55
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	**1.182.362.354**	**75.200.000**	-	0	-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	185.770.000		-		-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	99.760.000		-		-	0,00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	462.110.354		-		-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	434.722.000	75.200.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	**5.966.530.220**	**4.372.554.800**		**1.922.900.364**	-	32,23
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.590.314.309	972.114.600	3	291.631.664	25,00	11,26
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.297.441.000	3.349.855.200	3	1.622.771.000	25,00	49,21
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	47.000.000	22.200.000		450.000	-	0,96
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	31.774.911	28.385.000	3	8.047.700	25,00	25,33
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD**	**Dokumen**	**5**	**538.556.373**	**240.196.500**	-	**50.880.000**	-	9,45

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	55.671.500	34.350.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	106.411.368	42.670.000	-	0	-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	271.164.250	115.632.500	3	50.880.000	100,00	18,76
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	3.000.000	-	0	-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	95.309.255	44.544.000	-	0	-	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kepatuhan ketentuan alok	%	20		998.174.776.484		348.544.908.900	-	-
			Tingkat kepatuhan ketentuan alok	%	10			18		179,18	-
			Tingkat kepatuhan ketentuan alok	%	40			30		75,13	-
			Tingkat kepatuhan ketentuan alok	%	0,6			0		35,60	-
			Tingkat kepatuhan ketentuan alok	%	1			2		229,12	-
			Persentase ketepatan waktu penya	%	100			0		-	-
			Persentase Penerbitan SP2D dari Jumlah SPM yang diverifikasi	%	100			100		100,00	-
			Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	%	100			100		100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen	8		2.658.692.250	0	976.104.686	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2		88.339.000	0	0	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2		70.875.300	0	0	-	-
PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42		17.005.000	0	0	-	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	126		10.779.100	42	0	33,33	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42		9.275.000	42	9.275.000	100,00	-
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	126		2.827.500	42	0	33,33	-
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2		446.691.200	0	0	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	5		617.688.000	1	357.712.300	20,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	5		1.361.727.350	0	609.117.386	-	-
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	210		33.484.800	0	0	-	-
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	30		733.025.500	0	169.387.506	-	-
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	10		151.096.400	0	0	-	-
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	10		138.074.500	0	0	-	-
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	10		151.408.100	0	13.145.500	-	-
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	10		164.730.800	7	119.986.250	70,00	-
		Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	1		67.313.650	0	11.631.106	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2		60.402.050	0	24.624.650	-	-
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun	Dokumen	155		342.061.800	36	159.672.226	23,23	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12		151.380.900	3	72.041.124	25,00	-
		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1		2.379.400	1	1.499.700	100,00	-
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	288		45.438.000	72	33.540.000	25,00	-
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	20		6.989.700	7	0	35,00	-
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	260		2.945.000	90	0	34,62	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	14		22.352.600	4	7.591.702	28,57	-
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1		15.477.300	0	4.980.000	-	-
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12		47.128.000	3	35.970.000	25,00	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1		42.370.500	0	3.450.000	-	-
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10		5.600.400	25	599.700	250,00	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu	Dokumen	3		746.470.680	3	125.642.760	100,00	-
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	252		98.793.380	75	15.000.000	29,76	-
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18		35.856.000	4	0	22,22	-
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	7		232.052.000	7	98.400.000	100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2		223.767.300	2	12.242.760	100,00	-
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1		68.059.000	0	0	-	-
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		25.507.000	0	0	-	-
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	84		10.831.000	0	0	-	-
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	22		51.605.000	0	0	-	-
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersusun	Dokumen	14		993.425.607.654	0	347.016.765.122	-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Pelayanan Perbendaharaan	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	13		33.656.621.056	0	18.071.486.102	-	-
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	10		683.500.000	0	0	-	-
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	10		161.606.865.872	1	40.000.000	10,00	-
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4		797.478.620.726	0	328.905.279.020	-	-
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang Tersusun	Dokumen	3		268.918.600	0	97.336.600	-	-
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2		61.760.500	0	37.806.000	-	-
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1		105.828.650	0	25.383.300	-	-
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	50		101.329.450	0	34.147.300	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		40.032.935.680	-	17.263.913.284	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8		541.200.150	3	95.483.425	37,50	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		185.489.575	2	40.890.025	66,67	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		93.171.500	1	722.500	100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		66.139.000	0	0	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		22.889.500	1	0	100,00	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		14.825.000	0	0	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		56.967.500	1	27.000.000	100,00	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		101.718.075	1	26.870.900	100,00	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun**	**Laporan**	**1**		**30.086.358.704**	**1**	**13.262.056.283**	100,00	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	160		29.689.608.439	160	13.133.878.043	100,00	-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1500		26.806.300	375	11.034.600	25,00	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	24		245.214.600	6	71.641.725	25,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1		59.199.115	1	20.367.465	100,00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4		48.210.000	1	18.320.000	25,00	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	8		17.320.250	1	6.814.450	12,50	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**		**155.936.000**	**3**	**66.198.400**	25,00	-
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3		26.980.000	2	10.370.000	66,67	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12		39.380.000	3	17.629.700	25,00	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1		89.576.000	0	38.198.700	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur**	**Orang**	**30**		**2.897.688.900**	**0**	**1.607.650.100**	-	-
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2		158.868.000	2	33.200.000	100,00	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12		40.917.000	3	17.189.700	25,00	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5		99.000.000	0	0	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100		2.591.303.900	25	1.557.260.400	25,00	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5		7.600.000	0	0	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia**	**Jenis**	**8**		**1.955.911.066**	**7**	**734.684.398**	87,50	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8		49.139.000	2	8.628.500	25,00	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27		29.011.500	6	14.190.300	22,22	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25		612.529.650	5	93.072.195	20,00	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50		99.000.000	12	13.645.000	24,00	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1		594.240.000	1	372.040.825	100,00	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85		306.721.416	25	209.548.578	29,41	-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	140000		96.834.500	35000	23.559.000	25,00	-
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5		168.435.000	0	0	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**15**		**203.688.300**	**0**	**0**	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50		201.823.300	0	0	-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		1.865.000	0	0	-	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0			0		-	-

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia**	**Jasa**	**4**		**3.451.477.560**	**4**	**1.361.062.126**	100,00	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1		23.625.000	1	5.259.000	100,00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1		1.261.210.000	1	321.502.626	100,00	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1		120.016.000	1	33.110.000	100,00	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1		2.046.626.560	1	1.001.190.500	100,00	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	**Jenis**	**6**		**740.675.000**	**3**	**136.778.552**	50,00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	19		25.000.000	8	9.997.528	42,11	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50		415.170.000	9	105.041.024	18,00	-
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	200		44.000.000	0	7.160.000	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20		207.035.000	2	0	10,00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		49.470.000	0	14.580.000	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4			0		-	-
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas**	**%**	**100**	**9.401.083.400**	**4.425.317.600**	**100**	**1.032.270.284**	100,00	10,98
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	**Jumlah PPNS Yang Dibina**	**orang**	**4**	**225.600.000**	**141.326.400**	**0**	**0**	-	0,00
		Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	1	40.600.000	14.000.000	0	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	(orang) Laporan	1 (6)	185.000.000	127.326.400	0	0	-	0,00
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum**	**Kasus**	**17**	**5.505.483.400**	**2.613.291.200**	**0**	**593.593.100**	-	10,78
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	100.000.000		**0**		-	0,00
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	10	300.000.000	153.890.000	**1**	35.811.500	10,00	11,94
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	laporan	36	1.400.000.000	950.000.000	**9**	439.255.500	25,00	31,38
	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	Unit	5	2.700.000.000	1.124.200.000	**0**	0	-	0,00
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	10	302.771.400	87.727.000	**2**	15.050.000	20,00	4,97
		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	145	552.712.000	257.674.200	**100**	103.476.100	68,97	18,72
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	150.000.000	39.800.000	**0**	0	-	0,00
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	**Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah**	**Kasus**	**19**	**3.670.000.000**	**1.670.700.000**	**0**	**438.677.184**	-	11,95

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	12	2.520.000.000	1.575.200.000	**6**	418.945.784	50,00	16,62
		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	12	100.000.000	60.000.000	**6**	19.731.400	50,00	19,73
		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	1	50.000.000	35.500.000	**0**	0	-	0,00
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	10	1.000.000.000		**0**		-	0,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**PERSENTASE PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA**	**%**	**100**	**46.327.757.030**		**3**		3,00	0,00
										-	-
										-	-
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD**	**Jenis Fasilitasi**	**4**	**14.210.929.700**	**9.786.628.000**	**3**	**5.659.993.330**	75,00	39,83
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	124.557.100	124.787.100	NA	26.120.400	-	20,97
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	1	470.000				-	0,00
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1	1.017.080.200	827.110.900	NA	337.959.000	-	33,23
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	1	13.068.122.400	8.742.730.000	NA	5.295.913.930	-	40,53
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	700.000	92.000.000		0	-	0,00
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD**	**Laporan**	**2**	**110.487.200**	**50.108.950**	NA	**3.585.000**	-	3,24
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	60.978.850	21.194.000	NA	3.585.000	-	5,88
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	49.508.350	28.914.950	NA	0	-	0,00
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran**	**Laporan**	**5**	**1.387.078.500**	**1.414.708.500**	NA	**11.717.500**	-	0,84
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	199.133.500	199.393.500	NA	11.717.500	-	5,88

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	400.988.500	409.368.500	NA	0	-	0,00
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	176.229.000	176.489.000	NA	0	-	0,00
		Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1	250.519.000	250.779.000	NA	0	-	0,00
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	360.208.500	378.678.500	NA	0	-	0,00
		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi**	**Perda dan Peraturan**	**9**	**4.029.813.100**	**14.890.243.600**	**3**	**7.979.329.902**	33,33	198,01
		Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	1	1.170.000				-	0,00
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	12	296.779.000	186.379.500	3	36.023.500	25,00	12,14
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	3.678.158.000	14.668.088.000	NA	7.943.306.402	-	215,96
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	6	2.000.000				-	0,00
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	50.976.100	35.776.100	NA	-	-	0,00
		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	100	730.000				-	0,00
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**Laporan**	**7**	**762.510.680**	**606.433.660**	NA	**125.016.380**	-	16,40
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	-				-	#DIV/0!
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	-				-	#DIV/0!
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	112.540.300	72.573.170	NA	20.674.810	-	18,37
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	112.887.650	73.732.370	NA	32.427.210	-	28,73
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	312.866.950	311.093.550	NA	29.773.200	-	9,52

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	111.920.680	72.573.170	NA	20.826.010	-	18,61
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	112.295.100	76.461.400	NA	21.315.150	-	18,98
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas**	**Orang**	**65**	**4.526.778.700**	**4.865.424.700**	**0**	**1.982.852.580**	-	43,80
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	19.000.000				-	0,00
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	65	1.560.934.500	3.116.504.500	0	1.295.251.930	-	82,98
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	100	596.200.000	374.300.000	8	158.100.000	8,00	26,52
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	9	456.960.200	456.960.200	8	200.544.000	88,89	43,89
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	58.500.000	58.730.000	NA	8.550.000	-	14,62
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	21.893.500				-	0,00
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1	1.813.290.500	858.930.000	NA	320.406.650	-	17,67
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**Laporan**	**3**	**21.300.159.150**	**25.175.993.150**	NA	**12.742.605.911**	-	59,82
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	1	8.003.600.000	4.846.610.000	NA	2.651.379.547	-	33,13
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	13.073.211.150	20.106.536.150	0	10.047.111.364	-	76,85
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	2	202.748.000	222.847.000	0	44.115.000	-	21,76
		Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	200	20.600.000				-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai AKIP Lingkup OPD**	**Poin**	**75**	**72.540.679.575**	83.276.838.451	**73,76**	38.301.809.324	98,35	52,80
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**28.562.000**	**8.174.000**	**0**	**0**	-	0,00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	20.510.000	4.640.000	NA	0	-	0,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	3.531.000	1.907.000	1	0	50,00	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Sekretariat DPRD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	4.521.000	1.627.000	1	0	50,00	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah**	**Dokumen**	**1**	**970.445.400**	**233.881.000**	NA	**57.680.000**	-	5,94
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	169.000.000	169.000.000	0	49.000.000	-	28,99
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	172.699.200	230.000	NA	0	-	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	15.000.000	40.000.000	0	0	-	0,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	290.000.000			0	-	0,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	323.746.200	24.651.000	1	8.680.000	50,00	2,68
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	-				-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**14.566.906.735**	**13.754.654.926**		**6.753.778.232**	-	46,36
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	30.173.600	29.486.800	1	29.246.200	100,00	96,93
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7500	178.923.250	165.739.250	2290	96.777.150	30,53	54,09
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1.475.400	1.138.400	1	878.400	100,00	59,54
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	316.683.600	144.777.700	NA	76.456.500	-	24,14
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	123	14.039.650.885	13.413.512.776	111	6.550.419.982	90,24	46,66
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**3.735.720.200**	**4.128.657.565**	**88,89**	**1.482.050.559**	88,89	39,67

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	79.666.000	177.749.000	NA	18.799.381	-	23,60
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1.733.500.000	1.461.500.000	NA	670.225.453	-	38,66
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	147.823.400	855.430.000	NA	389.200.000	-	263,29
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7	173.980.000	130.150.000	NA	61.300.000	-	35,23
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	246.034.700	757.066.310	0	140.062.270	-	56,93
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	102.788.000	162.303.000	0	79.320.000	-	77,17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	72.680.000	72.680.000	0	34.205.000	-	47,06
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	226.048.100	486.507.155	0	81.965.455	-	36,26
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	953.200.000	855.430.000	NA	389.200.000	-	40,83
		Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah jenis layanan administrasi DPRD**	**Jenis Layanan**	**4**	**919.635.330**	**799.804.520**	**3**	**238.620.820**	75,00	25,95
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	1	351.018.930	229.520.720	NA	53.684.640	-	15,29
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	147.986.400	90.283.800	NA	26.195.200	-	17,70
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	3	420.000.000	480.000.000	6	158.740.980	200,00	37,80
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	630.000				-	0,00
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Jumlah jenis layanan keuangan DPRD**	**Jenis Layanan**	**3**	**42.664.406.590**	**53.745.791.360**	**1**	**26.189.056.403**	33,33	61,38
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	65	390.000.000	390.000.000	0	0	-	0,00
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	2	152.750.000	897.750.000	0	0	-	0,00
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	65	42.121.656.590	52.458.041.360	65	26.189.056.403	100,00	62,17
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Unit**	**6**	**1.641.366.000**	**3.360.468.000**	**73**	**559.219.663**	1.216,67	34,07

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	35.000.000	0			-	0,00
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	25.000.000	17.500.000	1	9.335.000	16,67	37,34
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	310.796.000	262.438.000	2	89.990.000	20,00	28,95
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	372.500.000	2.200.460.000	2	172.157.000	66,67	46,22
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	167.600.000	192.600.000	2	62.731.906	50,00	37,43
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	66	730.470.000	687.470.000	66	225.005.757	100,00	30,80
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**	**Unit**	**4**	**1.243.062.000**	**736.113.800**	**1**	**160.000.000**	25,00	12,87
						-					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	32.000.000	0		0	-	0,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	695.000.000	0		0	-	0,00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	408.950.000	311.113.800	1	160.000.000	100,00	39,12
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	107.112.000	425.000.000	0	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**6.207.308.020**	**6.035.225.520**	**100**	2.751.872.247	100,00	44,33
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	966.500.000	843.645.000	NA	3.730.000	-	0,39
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5.219.433.020	5.103.025.520	NA	2.432.288.800	-	46,60
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	21.375.000	88.555.000	NA	3.730.000	-	17,45
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**22**	**563.267.300**	**474.067.760**	**6,00**	**109.531.400**	27,27	19,45
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	154.011.400	121.785.900	4,00	27.347.500	25,00	17,76
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	23.869.000	56.205.160	0	0	-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	108.733.600	95.901.800	1	2.861.900	100,00	2,63
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	13.048.300	9.711.800	1	0	100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	40.292.400	37.866.400	0	32.536.000	-	80,75
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	30.184.000	17.183.000	0	0	-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	193.128.600	135.413.700	0	46.786.000	-	24,23
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN	persen point persen	23,6 338,5 4,98	**2.964.500.000**	2.436.932.600		598.622.292	-	20,19
		Mutasi dan Promosi ASN	**Nilai Aspek Promosi dan Mutasi**	**point**	**30**	**770.000.000**	**1.078.109.900**		**195.258.486**	-	25,36
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	275.000.000	154.040.000	1	68.322.000	50,00	24,84
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	110.000.000	77.240.000	0	33.117.346	-	30,11
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	8	385.000.000	846.829.900	1	93.819.140	12,50	24,37
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan**	**point**	**40**	**1.067.000.000**	668.162.700	-	195.117.460	-	18,29
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	16.500.000		-		-	0,00
		Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	1	16.500.000		-		-	0,00
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	33.000.000		-		-	0,00
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	220.000.000	47.500.000	-	17.862.460	-	8,12

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	440.000.000	299.462.700	0	137.095.000	-	31,16
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	38.500.000	47.500.000	-	11.510.000	-	29,90
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	38.500.000		-		-	0,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	165.000.000	273.700.000	0	28.650.000	-	17,36
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	38.500.000		-		-	0,00
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	1	16.500.000		-		-	0,00
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	1	27.500.000		-		-	0,00
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	16.500.000		-		-	0,00
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Indeks Kualifikasi ASN**	**persen**	**13,6**	**759.000.000**	**429.240.000**	-	169.616.346	-	22,35
		Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1	16.500.000		-		-	0,00
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan	1	27.500.000		-		-	0,00
		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1	27.500.000		-		-	0,00
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	1	27.500.000		-		-	0,00
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	20	27.500.000		-		-	0,00
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	20	27.500.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	27.500.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	2	27.500.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	20	38.500.000	72.150.000	3	14.870.000	15,00	38,62
		Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	27.500.000	52.600.000	2	11.900.000	200,00	43,27
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	3	385.000.000	246.760.000	1	129.096.346	33,33	33,53
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	27.500.000				-	0,00
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	400	27.500.000	5.630.000	-	1.850.000	-	6,73
		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	20	27.500.000	52.100.000	0	11.900.000	-	43,27
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	1	16.500.000				-	0,00
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Indeks Kinerja ASN**	**persen**	**24,4**	**368.500.000**	**261.420.000**		38.630.000	-	10,48
			Indeks Disiplin ASN	**persen**	**4,98**					-	-
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	2	16.500.000				-	0,00
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	12	16.500.000				-	0,00
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	16.500.000				-	0,00
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	132.000.000	94.040.000	0	9.055.000	-	6,86
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1	27.500.000				-	0,00
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	20	38.500.000	114.680.000	3	16.075.000	15,00	41,75
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	38.500.000	52.700.000	20	13.500.000	10,00	35,06
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	27.500.000				-	0,00
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	200	38.500.000				-	0,00
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	16.500.000				-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD**	**Tahun**	**1**	**24.511.076.512**	15.438.996.581	-	6.937.112.455	-	28,30

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Aset Barang MIlik Daerah yang tervalidasi baik**	**Laporan**	**4**	**250.000.000**	**43.931.200**	-	19.980.000	-	7,99
						-	18.221.000		9.630.000	-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	200.000.000	25.710.200	-	10.350.000	-	5,18
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50.000.000		-		-	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Pelathan Peningkatan SDM Aparatur Sipel Negara**	**Orang**	**80**	**230.000.000**	**15.110.550**	-	0	-	0,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	30.000.000	8.590.800	-	0	-	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50.000.000	6.519.750	-	0	-	0,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	150.000.000		-		-	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Penatausahaan Administasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntable**	**Tahun**	**1**	**10.264.470.349**	**9.902.380.181**	-	4.575.344.791	-	44,57
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	200.000.000	11.853.195	-	6.000.000	-	3,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	250.000.000		-		-	0,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	200.000.000	32.053.350	1	8.411.500	50,00	4,21
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	300.000.000	126.933.000	2	27.061.400	16,67	9,02
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	9.314.470.349	9.731.540.636	-	4.533.871.891	-	48,68
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran**	**Tahun**	**1**	**5.230.000.000**	**461.234.560**	-	**212.062.000**	-	4,05
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	2.510.000.000	109.100.000	5	17.510.000	25,00	0,70
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	220.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
	UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	6.432.700	-	1.908.900	-	1,27
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	225.000.000	6.375.000	1	3.162.700	2,00	1,41
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	4.590.000		1.995.000	-	3,99
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	600.000.000	17.515.510	2	9.009.000	2,00	1,50
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	175.000.000	3.721.350		1.966.000	-	1,12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.300.000.000	313.500.000	1	176.510.400	10,00	13,58
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah yang memerlukan Pemeliharaan**	**Tahun**	**1**	**884.784.923**	**294.400.000**		**69.908.269**	-	7,90
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	400.000.000	131.010.000	1	8.864.968	1,67	2,22
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		-		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	200.000.000	14.100.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	234.784.923	149.290.000	1	61.043.301	4,76	26,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Dokumen pengadaan Barang Milik Daerah**	**Tahun**	**1**	**1.180.000.000**		-		-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1.180.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Tahun**	**1**	**5.151.821.240**	**4.638.782.240**	-	**2.021.588.295**	-	39,24
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.280.000.000	1.187.700.000	1	406.177.610	8,33	31,73
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.251.821.240	3.270.582.240	1	1.615.010.685	8,33	49,66
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	600.000.000	180.000.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	20.000.000	500.000	-	400.000	-	2,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD yang Tepat Waktu**	**Tahun**	**1**	**1.320.000.000**	**83.157.850**	-	**38.229.100**	-	2,90
						-					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		1		100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	320.000.000				-	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD**	**Tahun**	**1**	**24.511.076.512**	15.438.996.581	-	6.937.112.455	-	28,30
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Aset Barang MIlik Daerah yang tervalidasi baik**	**Laporan**	**4**	**250.000.000**	**43.931.200**	-	19.980.000	-	7,99
						-	18.221.000		9.630.000		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	200.000.000	25.710.200	-	10.350.000	-	5,18
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50.000.000		-		-	0,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Pelathan Peningkatan SDM Aparatur Sipel Negara**	**Orang**	**80**	**230.000.000**	**15.110.550**	-	0	-	0,00
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	30.000.000	8.590.800	-	0	-	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50.000.000	6.519.750	-	0	-	0,00
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	150.000.000		-		-	0,00

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Penatausahaan Administasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntable**	**Tahun**	**1**	**10.264.470.349**	**9.902.380.181**	-	4.575.344.791	-	44,57
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	200.000.000	11.853.195	-	6.000.000	-	3,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	250.000.000		-		-	0,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	200.000.000	32.053.350	1	8.411.500	50,00	4,21
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	300.000.000	126.933.000	2	27.061.400	16,67	9,02
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	9.314.470.349	9.731.540.636	-	4.533.871.891	-	48,68
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Perkantoran**	**Tahun**	**1**	**5.230.000.000**	**461.234.560**	-	**212.062.000**	-	4,05
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	2.510.000.000	109.100.000	5	17.510.000	25,00	0,70
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	220.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	6.432.700	-	1.908.900	-	1,27
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	225.000.000	6.375.000	1	3.162.700	2,00	1,41
	UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	4.590.000		1.995.000	-	3,99
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	600.000.000	17.515.510	2	9.009.000	2,00	1,50
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	175.000.000	3.721.350		1.966.000	-	1,12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.300.000.000	313.500.000	1	176.510.400	10,00	13,58
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah yang memerlukan Pemeliharaan**	**Tahun**	**1**	**884.784.923**	**294.400.000**		**69.908.269**	-	7,90
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	400.000.000	131.010.000	1	8.864.968	1,67	2,22

PRIORITAS DAERAH	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU RKPD (Rp)	PAGU APBD	CAPAIAN KINERJA			
								REALISASI TARGET	REALISASI KEUANGAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN THD PAGU RKPD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		-		-	0,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	200.000.000	14.100.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	234.784.923	149.290.000	1	61.043.301	4,76	26,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Dokumen pengadaan Barang Milik Daerah**	**Tahun**	**1**	**1.180.000.000**		-		-	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1.180.000.000		-		-	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**Tahun**	**1**	**5.151.821.240**	**4.638.782.240**	-	**2.021.588.295**	-	39,24
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.280.000.000	1.187.700.000	1	406.177.610	8,33	31,73
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.251.821.240	3.270.582.240	1	1.615.010.685	8,33	49,66
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	600.000.000	180.000.000	-	0	-	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	20.000.000	500.000	-	400.000	-	2,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD yang Tepat Waktu**	**Tahun**	**1**	**1.320.000.000**	**83.157.850**	-	**38.229.100**	-	2,90
						-					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		1		100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	250.000.000		-		-	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	320.000.000				-	0,00